



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN JEPARA
TAHUN

2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum	1
B. Perencanaan Pembangunan Daerah	17
C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	103
 BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
DAERAH	109
A. Capaian Kinerja Makro	109
B. Capaian Kinerja Penyelenggraan Urusan Pemerintahan	109
C. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	303
 BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
.....	358
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	358
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan (Penugasan)	362
1. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diterima	365
2. Matriks Capaian Kinerja Tugas Pembantuan yang diberikan (Penugasan).....	379
 BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPPAIAN STANDAR PELAYANAN	
MINIMAL (SPM)	380
 BAB V PENUTUP	479
 LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. Indikator Kinerja Kunci Output.	
2. Indikator Kinerja Kunci Outcome.	

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobilalamin, segala rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan ridho-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 ini dapat disusun dan disampaikan tepat pada waktunya.

Laporan pertanggungjawaban ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah. Harapan kami, laporan ini selain bisa memberikan manfaat juga menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan *Good Governance*.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, dibuat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pedoman penyusunan LPPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang terdiri atas, capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun dengan semangat Trus Karya Tataning Bumi serta dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Kami sangat berharap bahwa kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin baik dan terus meningkat setiap tahunnya.

Evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai maupun yang belum dalam proses pembangunan. Ini bisa menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun yang akan datang sehingga Pemerintah Daerah bisa mengelola dengan lebih baik lagi untuk mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2021 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan LPPD ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan lindungan dan kekuatan kepada kita untuk terus membangun Kabupaten Jepara Trus Karya Tataning Bumi 1549.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jepara, Maret 2022



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

A. Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sehingga dikeluarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah guna lebih terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta meningkatkan potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 33);

b. Data Geografis Wilayah Kab. Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara. Secara geograis, Kabupaten Jepara terletak berbatasan langsung dengan laut Jawa disebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, sebelah barat berbatasan dengan laut Jawa dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Dengan geografis seperti itu, Kabupaten Jepara memiliki wilayah pantai yang cukup panjang. Secara Topografis, Kabupaten Jepara yang merupakan daerah kawasan utara Jawa ini dibagi dalam empat (4) wilayah yaitu : wilayah pantai di bagian tengah dan selatan, wilayah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, wilayah pegunungan di bagian timur yang merupakan lereng barat dari gunung Muria serta wilayah perairan atau kepulauan di bagian utara yang merupakan rangkaian kepulauan Karimunjawa.

Dengan kontur wilayah tersebut, Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 meter sampai dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), dengan daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0–2 m dpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0–1.301 m dpl yang merupakan perbukitan.

Tabel
Data Ketinggian dari Permukaan Air Laut
Kabupaten Jepara

No.	Nama Kecamatan	Ketinggian (meter)
1	Kedung	0 – 2
2	Pecangaan	2-17
3	Welahan	2 – 7
4	Mayong	13 - 438
5	Batealit	68 - 378
6	Jepara	0 – 50
7	Mlonggo	0 - 300
8	Bangsri	0 - 594
9	Keling	0 - 1.301
10	Karimunjava	0 - 100
11	Tahunan	0 – 46
12	Nalumsari	13 - 736
13	Kalinyamatan	2 – 29
14	Kembang	0 - 1.000
15	Pakis Aji	0 - 1.000
16	Donorojo	0 - 619

Sumber : Jepara Dalam Angka 2021

Secara administratif luas Kabupaten Jepara adalah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16

kecamatan, 184 desa, 11 kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling, yaitu 12.311,588 Ha dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370.001 Ha.

1. Letak Geografis

Kabupaten Jepara secara geografis terletak pada posisi 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan dan 110° 9' 48, 02" sampai 110° 58' 37,40" Bujur Timursehingga merupakan daerah paling ujung sebelah utara dari Provinsi Jawa Tengah.

2. Luas Wilayah Kabupaten

Tabel Luas Wilayah Kab. Jepara per kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Luas Wilayah (Ha)
1	Kedung	43,063	4.306,281
2	Pecangaan	35,878	3.587,806
3	Welahan	27,642	2.764,205
4	Mayong	65,043	6.504,268
5	Batealit	88,879	8.887,865
6	Jepara	24,667	2.466,699
7	Mlonggo	42,402	4.240,236
8	Bangsri	85,352	8.535,241
9	Keling	123,116	12.311,588
10	Karimunjava	71,200	7.120,000
11	Tahunan	38,906	3.890,581
12	Nalumsari	56,965	5.696,538
13	Kalinyamatan	23,700	2.370,001
14	Kembang	108,124	10.812,384
15	Pakis Aji	60,553	6.055,280
16	Donorojo	108,642	10.864,216

Sumber : Jepara Dalam Angka 2021

Peta Wilayah Kabupaten Jepara



3. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha . Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 hadan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil yaitu Kecamatan Kalinyamatan yaitu 2.370,001 ha.

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut terbagi atas :

- lahan sawah/wilayah tak terbangun meliputi tambak, pertanian , kawasan perkebunan serta konservasi.
- bukan lahan sawah/tanah kering/*build up area* yang terdiri dari pemukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, kawasan industri, transportasi .

Lahan sebagaimana dimaksud adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai modal dalam suatu sektor perekonomian. Penggunaan lahan akan cenderung berubah di masa yang akan datang dari lahan persawahan menjadi pemukiman, fasilitas umum dan sebagainya. Hal ini terjadi karena adanya

pertambahan penduduk, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan teknologi.

4. Iklim

Kabupaten Jepara sebagaimana daerah lainnya beriklim tropis terdiri dari musim kemarau dan musim hujan yang silih berganti sepanjang tahun. Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember – April dipengaruhi oleh musim barat sedang musim kemarau antara bulan Mei – Oktober dipengaruhi angin musim timur Besar rata-rata jumlah curah hujan tahunan wilayah Jepara utara adalah 2000-2.500 mm/tahun dan Jepara bagian selatan adalah 2.500-3000 mm/tahun , dengan jumlah hari hujan 102 hari. Suhu udara di Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 ° celcius dan tertinggi pada 33,71 ° celcius, dengan kelembaban udara rata –rata sekitar 84%.

c. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah tertentu. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada suatu waktu tertentu disebut dengan Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*). Data ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan dan pendidikan yang berwawasan gender. Berdasarkan jenis kelamin, dari total penduduk Kabupaten Jepara yaitu 1.213.170 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 610.239 orang dan perempuan sebanyak 602.931 orang.

**Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	KEDUNG	39,924	39,247	79,171
2.	PECANGAAN	42,874	42,803	85,677
3.	WELAHAN	39,793	38,745	78,538
4.	MAYONG	46,464	46,173	92,637

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
5.	BATEALIT	43,881	43,032	86,913
6.	JEPARA	41,283	41,001	82,284
7.	MLONGGO	43,509	42,141	85,650
8.	BANGSRI	51,330	50,811	102,141
9.	KELING	32,818	32,983	65,801
10.	KARIMUNJAWA	5,183	4,933	10,116
11.	TAHUNAN	56,280	54,945	111,225
12.	NALUMSARI	56,280	38,651	77,338
13.	KALINYAMATAN	31,505	31,045	62,550
14.	KEMBANG	35,460	35,974	71,434
15.	PAKISAJI	31,157	30,382	61,539
16.	DONOROJO	30,091	30,065	60,156
T O T A L		610,239	602,931	1,213,170

Sumber Data : Data Base Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester II Tahun 2021

Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara
Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	44.983	42.188	87.171
2.	5-9	51.409	48.963	99.372
3.	10-14	52.005	49.330	101.335
4.	15-19	44.035	42.744	86.779
5.	20-24	50.958	49.108	100.066
6.	25-29	49.367	47.939	97.306
7.	30-34	45.969	44.187	90.156
8.	35-39	50.492	50.066	100.558
9.	40-44	47.704	46.839	94.543
10.	45-49	43.263	44.057	87.320
11.	50-54	37.013	37.806	74.819

No.	Struktur Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
12.	55-59	30.849	32.480	63.329
13.	60-64	24.334	24.879	49.213
14.	65-69	16.802	16.359	33.161
15.	70-74	10.133	11.766	21.899
16.	75+	10.923	15.220	26.143
Jumlah		610.239	602.931	1.213.170

Sumber Data : Data Base Kependudukan (Data Konsolidasi Bersih/DKB) semester II Tahun 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Kabupaten Jepara

Secara administratif, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, 184 desa dan 11 Kelurahan, 4.766 RT dan 1.015 RW. Jarak terdekat dengan ibukota kabupaten adalah kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km .

Jumlah Kecamatan dan Desa Kab. Jepara Tahun 2021

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	33.20.03	Welahan	15		15
2.	33.20.12	Nalumsari	15		15
3.	33.20.04	Mayong	18		18
4.	33.20.13	Kalinyamatan	12		12
5.	33.20.02	Pecangaan	12		12
6.	33.20.05	Batealit	11		11
7.	33.20.11	Tahunan	15		15
8.	33.20.06	Jepara	5	11	16
9.	33.20.01	Kedung	18		18
10.	33.20.07	Mlonggo	8		8
11.	33.20.15	Pakisaji	8		8
12.	33.20.08	Bangsri	12		12
13.	33.20.14	Kembang	11		11
14.	33.20.16	Donorojo	8		8

No.	Kode	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
15.	33.20.09	Keling	12		12
16.	33.20.10	Karimunjawa	4		4
TOTAL			184	11	195

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, Kabupaten Jepara memiliki 42 Perangkat Daerah dan 150 Unit Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan Aparatur Sipil Negara yang dimiliki oleh Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 7.422 orang.

**Tabel Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah PNS
Kab Jepara Tahun 2021**

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
1.	Sekretariat Daerah	B	9
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	A	4
3.	Inspektorat	A	4
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	A	5
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	A	5
6.	Badan Kepegawaian Daerah	B	4
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah raga	A	6
8.	Dinas Kesehatan	B	12
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	B	5
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	C	3

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	A	5
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	A	4
13.	Dinas Lingkungan Hidup	A	4
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A	5
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	4
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	A	3
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	A	5
18.	Dinas Perikanan	A	4
19.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	A	4
20.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	A	4
21.	Dinas Perhubungan	A	4
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	B	3
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	A	4
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	A	4
25.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	3
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	B	1

No.	Nama OPD	Tipe	Jumlah Unit Kerja
27.	Kecamatan Kedung	A	2
28.	Kecamatan Pecangaan	A	2
29.	Kecamatan Kalinyamatan	A	2
30.	Kecamatan Welahan	A	2
31.	Kecamatan Mayong	A	2
32.	Kecamatan Nalumsari	A	2
33.	Kecamatan Batealit	A	2
34.	Kecamatan Tahunan	A	2
35.	Kecamatan Jepara	A	2
36.	Kecamatan Mlonggo	A	2
37.	Kecamatan Pakis Aji	A	2
38.	Kecamatan Bangsri	A	2
39.	Kecamatan Kembang	A	2
40.	Kecamatan Keling	A	2
41.	Kecamatan Donorojo	A	2
42.	Kecamatan Karimunjawa	A	2
TOTAL			150

Tabel Jumlah Pegawai Kabupaten Jepara Tahun 2021

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
1.	Sekretariat Daerah	104
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39
3.	Inspektorat	35
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	37
5.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	42
6.	Badan Kepegawaian Daerah	36
7.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah raga	4.586
8.	Dinas Kesehatan	1.067
9.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	109

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	22
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	25
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	21
13.	Dinas Lingkungan Hidup	63
14.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	42
15.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	23
16.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	26
17.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	136
18.	Dinas Perikanan	26
19.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	34
20.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	93
21.	Dinas Perhubungan	65
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	24
23.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	35
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	44
25.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	17
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11
27.	Kecamatan Kedung	23
28.	Kecamatan Pecangaan	25
29.	Kecamatan Kalinyamatan	25
30.	Kecamatan Welahan	29
31.	Kecamatan Mayong	26
32.	Kecamatan Nalumsari	34
33.	Kecamatan Batealit	23
34.	Kecamatan Tahunan	19

No.	Nama OPD	Jumlah Peg.
35.	Kecamatan Jepara	81
36.	Kecamatan Mlonggo	21
37.	Kecamatan Pakis Aji	18
38.	Kecamatan Bangsri	22
39.	Kecamatan Kembang	26
40.	Kecamatan Keling	18
41.	Kecamatan Donorojo	17
42.	Kecamatan Karimunjawa	27
43.	Sekretariat KPU	1
44.	RSU RA Kartini	486
T O T A L		7683

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 2.337.123.960.000,-** (*Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.380.695.854.292,-** (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) **atau 101,86%** dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	Pendapatan Asli Daerah	372.970.362.000	408.635.273.817
	➤ Pendapatan Pajak Daerah	145.610.370.000	170.338.793.994
	➤ Pendapatan Retribusi Daerah	23.959.478.000	22.109.554.775
	➤ Pendapatan Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	15.982.319.000	15.982.320.047
	➤ Lain-lain PAD yg	187.418.195.000	200.204.605.001

NO	URAIAN PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	sah		
2.	Pendapatan Transfer	1.851.178.431.000	1.860.076.513.360
	➤ Transfer Pemerintah Pusat	1.648.500.098.000	1.642.016.699.042
	➤ Pendapatan Transfer Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	202.678.333.000	218.059.814.318
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	112.975.167.000	111.984.067.115
	➤ Pendapatan Hibah	112.975.167.000	111.984.067.115
	➤ Pendapatan Lainnya	0	0
J U M L A H		2.337.123.960.000	2.380.695.854.292

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Anggaran Belanja Daerah *Kabupaten* Jepara Tahun 2021 sebesar **Rp. 2.535.023.323.067,-** (*Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.309.409.441.220,-** (*Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) dengan rincian Belanja sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	BELANJA OPERASI	1.847.021.615.830	1.655.253.388.636
	➤ Belanja Pegawai	1.010.432.787.157	878.730.858.705
	➤ Belanja Barang & Jasa	690.857.987.673	637.300.676.791
	➤ Belanja Subsidi	184.086.000	184.086.000
	➤ Belanja Hibah	76.004.977.000	72.113.934.140

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
	➤ Belanja Bantuan Sosial	69.541.778.000	66.923.833.000
2	BELANJA MODAL	251.799.936.517	231.972.750.951
	➤ Belanja Modal Tanah	400.000.000	399.985.280
	➤ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.228.671.874	56.997.778.481
	➤ Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.822.660.798	46.182.347.378
	➤ Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.197.933.500	123.619.830.032
	➤ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.150.670.345	4.772.809.780
	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.692.643.720	11.268.210.497
	➤ Belanja Tidak Terduga	24.692.643.720	11.268.210.497
	➤ BELANJA TRANSFER	411.519.127.000	410.915.091.136
	➤ Belanja Bagi Hasil	17.529.677.000	17.457.641.136
	➤ Belanja Bantuan Keuangan	393.979.450.000	393.457.450.000
	J U M L A H	2.535.023.323.067	2.309.409.441.220

3. Target dan Realisasi Transfer Daerah Tahun 2021

Target Transfer Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 sebesar **Rp. 411.509.127.000,-** (*Empat Ratus Sebelas Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 410.915.091.136,-** (*Empat Ratus Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian Belanja sebagai berikut :

NO	URAIAN TRANSFER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	17.529.677.000	17.457.641.136
	➤ Transfer Bagi Hasil	17.529.677.000	17.457.641.136
2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	393.979.450.00	393.457.450.000
	➤ Transfer Bantuan Keuangan	393.979.450.00	393.457.450.000
	J U M L A H	411.509.127.000	410.915.091.136

4. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

Total Pembiayaan *Daerah* yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagai berikut:

- Penerimaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp. 209.475.363.067,-** (*Dua Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*) dengan Realisasi sebesar **Rp. 209.480.363.067,-** (*Dua Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*)
- Pengeluaran Daerah *dianggarkan* sebesar **Rp 11.576.000.000,-** (*Sebelas Milliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*) **Rp. 11.576.000.000,-** (*Sebelas Milliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).

B. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 permasalahan strategis Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Derajat dan upaya pelayanan kesehatan belum optimal.

Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jepara masih belum optimal pada tahun 2019. Prevalensi Stunting pada tahun 2019 masih sebesar 19,61% walaupun sudah di bawah capaian Provinsi Jateng sebesar 20%. Angka penyandang HIV-AIDS di Jepara masih menduduki peringkat 1 se-Jawa Tengah. Kasus kematian Ibu juga masih tinggi, yaitu sebanyak 13 kasus di Tahun 2019. Rasio tenaga kesehatan belum memenuhi standar SNI dan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama juga masih belum ideal. Selain itu, adanya pandemi virus secara global yaitu Covid-19 pada akhir tahun 2019 sampai tahun 2020 ini menimbulkan permasalahan daerah di bidang kesehatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Persebaran virus yang cepat dengan sarana dan prasarana kesehatan yang belum siap untuk menanggulangi virus tersebut menyebabkan masalah ini belum dapat ditangani secara optimal.

2. Masih rendahnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara.

Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Jepara ditandai oleh masih rendahnya jalan kabupaten dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memiliki sarana pelengkap. Ruas jalan dengan kondisi baik baru mencapai 36,10% (314,864 km), dengan ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang mencapai 13,72% (119,64 km) dan saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 22,87%. Selain itu berkaitan dengan infrastruktur untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama juga masih belum ideal. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Kabupaten Jepara masih kekurangan sebanyak 19 Puskesmas yang tidak mudah dipenuhi karena harus disesuaikan dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

Penyediaan infrastruktur layanan dasar untuk akses air bersih, sanitasi layak, dan rumah layak huni serta penanganan sampah juga perlu didorong lebih baik. Karena hal tersebut mempengaruhi taraf kesehatan masyarakat.

3. Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi.

Angka kemiskinan (P0) di Kabupaten Jepara kendati mengalami penurunan setiap tahun namun masih perlu mendapatkan perhatian. Angka kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 6,66% menurun dari Tahun 2018 yaitu sebesar 7%, namun demikian jumlah absolut penduduk miskin di Kabupaten Jepara masih cukup besar (83.500 jiwa pada Tahun 2019) meskipun trennya menurun setiap tahun. Di awal tahun 2020 dengan adanya bencana nasional mewabahnya Covid 19 di Indonesia, berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia yang diproyeksikan turun tajam di masa pandemi ini. Hal tersebut mengakibatkan naiknya angka kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran serta pertumbuhan ekonomi juga melambat. Dan jika tidak segera di tangani maka bisa berdampak sosial.

4. **Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah.**

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Jepara pada Tahun 2019 mencapai 90,91% naik dibandingkan Tahun 2018 sebesar 90,66%. Sementara itu, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Jepara meningkat menjadi 50,62% pada Tahun 2018 dari sebelumnya 48,76 pada Tahun 2017, meskipun demikian IDG Kabupaten Jepara merupakan paling rendah di antara Kabupaten Pati, Kudus, Rembang dan Blora.

5. **Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 7%.**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada Tahun 2019 mencapai 6,02% meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,85%. Pertumbuhan ekonomi Jepara juga lebih tinggi dibanding Jawa tengah dan Nasional. Namun hal ini masih perlu ditingkatkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 7%. Terbitnya Perpres Nomor 79 Tahun 2019 merupakan pendorong percepatan pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, apalagi Jepara memiliki potensi besar di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor yang memberikan kontribusi tinggi pada PDRB Jepara, meskipun di tahun 2019 turun sebagai akibat naiknya sektor konstruksi, transportasi pergudangan, informasi dan komunikasi. Potensi pariwisata di Jepara juga diharapkan meningkat, melalui penguatan konektivitas aksesibilitas dalam pengembangan infrastruktur yaitu pengembangan Bandara Dewandaru di Karimunjawa, peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa, Pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Jepara, pembangunan jalan Demak-Jepara (coastal road). Selain itu dengan meningkatnya investasi baik PMA maupun PMDN di Jepara juga diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Jepara dan sekitarnya.

Namun demikian di tengah adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia dari akhir tahun 2019 sampai saat ini menimbulkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara global. Menurut Menteri Keuangan, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini turun menjadi 2,3% dari baseline 5,3% bahkan di kondisi sangat berat mungkin menurun dampak *negatif growth* di angka 0,4%.

6. Pelestarian lingkungan.

Usaha pelestarian lingkungan di Kabupaten Jepara hingga saat ini masih belum optimal disebabkan masih rendahnya cakupan pelaksanaan penjarangan kualitas air, udara dan tanah bahkan tahun 2019 turun dibanding tahun 2018. Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019 turun menjadi 64,69 atau masih berkategori cukup dari sebelumnya 66,54. Permasalahan sampah juga masih perlu upaya dalam penanganan, karena baru 15% dari total produksi sampah di Jepara sebanyak 251.072 ton/tahun, turun sebesar 2,28%. Permasalahan tersebut dikhawatirkan mengakibatkan dampak negatif pada daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam terhadap keberlanjutan pembangunan di Jepara. Akibat dari kurangnya memerhatikan keberlanjutan lingkungan semakin meningkatkan potensi bencana di Jepara. Kejadian bencana yang sering terjadi di Jepara adalah banjir, longsor, kekeringan dan puting beliung.

Berbagai permasalahan yang terkait pelestarian lingkungan ke depan harus ditangani antara lain belum optimalnya kegiatan konservasi rawan longsor dan wilayah potensi kekeringan, perilaku masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan juga perlu diintervensi. Mitigasi bencana juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan koordinasi seluruh komponen masyarakat dalam pengurangan resiko bencana untuk perencanaan pembangunan yang memerhatikan pelestarian lingkungan.

7. Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan antara lain : belum optimalnya pelaksanaan manajemen ASN, pelayanan publik yang belum menjalankan standar pelayanan, belum optimalnya penataan kelembagaan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam mendorong pelayanan yang efektif dan efisien, akuntabilitas kinerja pemerintahan juga belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintahan disusun mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi kinerja yang setiap tahun selalu ada perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu Jepara berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dan meningkatkan penggunaan teknologi informasi..

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka meningkatkan dan/atau mempertahankan kinerja pembangunan menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka diwujudkan visi dan misi berbasis pada analisis lingkungan strategis dan isu-isu strategis. Seperti moto Kabupaten Jepara yaitu "***Trus Karya Tataning Bumi***" yang artinya terus bekerja keras membangun daerah, diharapkan visi Kabupaten Jepara sebagai pemicu bagi seluruh komponen masyarakat (*stakeholders*) untuk terus bekerja keras membangun daerah dalam rangka untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

1. VISI

Visi yang diusung oleh Kabupaten Jepara adalah :
“Mewujudkan Jepara Madani Yang Berkarakter, Maju Dan BerdayaSaing”

2. MISI

Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan visi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya
2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan

program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 memuat visi misi dan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun tersebut. Adapun program pembangunan daerah tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Program Pembangunan Daerah Tahun 2021 Berdasarkan RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-2022

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penanggung jawab
				Target	Rp (juta)	
1.	URUSAN PENDIDIKAN					
1	Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal				21.305,26	Disdikpora
		APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	%	59,5		
		Angka Melek Huruf Penduduk 15 th>	%	99,93		
2	Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar				34.002,21	Disdikpora
		Nilai Pemetaan Mutu SD Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	5,14		
		Nilai Pemetaan Mutu SMP Pendidikan (PMP) Standar Nasional Pendidikan	Nilai	5,09		
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket A (%)	%	108,5		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,23		
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02		
		Angka Kelulusan	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		(AL) SD/MI				
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100		
		Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	nilai	7,1		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,7		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPL B/P paket B	%	89,5		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/SMPL B/P	%	83		
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,07		
		Persentase SD dan SMP yang telah Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti	%	80,41		
					19.658,24	
		Capaian Hasil Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SD	Nilai	3,97		
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Nilai Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Standar PTK SMP	Nilai	4,2		Disdikpora
		Pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	89		
2.	URUSAN KESEHATAN					Dinkes, RSUD
4	Program Kefarmasian dan Alkes				16.369,78	Dinkes
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan	%	90		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		kesehatan di puskesmas				
		Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memasarkan produk farmasi tanpa ijin edar	%	15		
		Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar	%	65		
5	Program Kesehatan Masyarakat				2.443 ,94	Dinkes
		Proporsi Rumah Tangga berPHBS	%	83		
		Proporsi desa siaga aktif mandiri	%	15		
		Persentase puskesmas melaksanakan kegiatan Keluarga Sehat	%	100		
		Persentase balita pendek (stunting)	%	22		
		Prevalensi anemia ibu hamil	%	21		
		Prevalensi anemia remaja putri	%	39		
		Persentase Desa melaksanakan STBM	%	100		
		Proporsi tempat fasilitas umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	79		
		Proporsi tempat pengelolaan makanan (TPM) memenuhi syarat higiene sanitasi	%	63		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
6	Program Pelayanan Kesehatan				199.241,87	Dinkes, RSUD
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)	%	94,5		
		Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100		
		Cakupan kunjungan bayi	%	99,1		
		Cakupan pelayanan anak balita	%	97		
		Cakupan imunisasi dasar lengkap	%	93,5		
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	%	95		
		Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (IR DBD)	Angka	43		
		Case Notification Rate (CNR) TB Paru	%	88		
		Cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	%	80		
		AFP Rate	Angka	2,4		
		Cakupan penemuan kasus baru HIV/AIDS	%	1,22		
		Persentase ODHA yang mendapat akses ARV	%	63		
		Proporsi kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas	%	28,5		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Persentase desa/kelurahan dengan Posbindu	%	90		
		Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan kesehatan	%	100		
		Persentase penduduk yang tercover jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	%	75		
		Persentase FKTP yang bekerjasama dengan BPJS tersertifikasi akreditasi	%	60		
		Persentase pelayanan kesehatan pada penduduk miskin non kuota yang bermasalah kesehatan	%	100		
		BOR	%	79,1		
		Av-Los	Hari	4,8		
		TOI	Hari	1,3		
		BTO	Kali	60,4		
		NDR	0/00	22,1		
		IKM	Nilai	100		
7	Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan				6.363,46	Dinkes
		Persentase puskesmas dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	80		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan SIK (Sistem Informasi Kesehatan)	%	100		
8	Program Sumber Daya Manusia				230,56	Dinkes

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek	%	90		
		Persentase puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	65		
		Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1 : 5.000		
		Rasio tenaga bidan per satuan penduduk	Rasio	1 : 1.000		
		Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	Rasio	1 : 855		
3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
9	Program Infrastruktur Pedesaan				7.101 ,26	DPUPR
		Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik	%	10		
10	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan				198.3 98,98	DPUPR
		Persentase jalan kabupaten rusak yang ditangani	% / tahun	5,73		
11	Program Penataan Ruang Daerah				4.708 ,13	DPUPR
		Persentase tataruang yang digunakan sebagaimana mestinya	%	100		
12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				46.11 2,06	DPUPR
		Persentase bangunan pemkab yang dibangun & dipelihara	% / tahun	14		
13	Program Pengendalian Banjir				6.455 ,69	DPUPR
		Persentase jalan kabupaten yang memiliki	%	6,05		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		drainase dalam kondisi baik				
		Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	93,39		
		Persentase wilayah bebas banjir perkotaan	%	97,59		
		Persentase wilayah bebas banjir pedesaan	%	99,35		
14	Program Sumberdaya Air				16.13 9,22	DPUPR
		Rasio jaringan irigasi baik terhadap areal budidaya	rasio m/ha	10,47		
4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
15	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman				25.20 4,85	Disperki m
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	96,59		
		Persentase makam yang memiliki sarana dan prasarana lengkap	%	76,19		
16	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh				32.97 0,12	Disperki m
		Persentase luas kawasan kumuh sesuai SK Bupati di kawasan perkotaan yang tertangani	%	100		
		Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	% /tahun	3,65		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					
17	Program Darurat Bencana Dan Logistik				876,13	BPBD, Dinsosp ermade s & BPKAD (2018)
		Persentase bencana daerah yang tertangani	%	100		
18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan				194,59	Bakesba ngpol, Satpol PP dan Damkar (2017- 2018)
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,12		
		Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	-		
19	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan				877,05	Bakesba ngpol
		Persentase lembaga masyarakat yang dilatih menjaga ketenteraman umum	%	100		
20	Program Pemeliharaan Ketentraman Dan Pencegahan Tindak Kriminal				881,66	Bakesba ngpol, Satpol PP dan Damkar (2017- 2018)
		Kasus Kriminalitas	Kasus	697		
		Jumlah kasus narkoba	Kasus	-		
21	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				6.494,42	BPBD, Satpol PP dan Damkar
		Persentase pengembangan desa siaga bencana	%	10,77		
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	%	0,00596		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	78,6		
		Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	100		
		Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	-		
		Persentase bencana daerah yang tertangani	%			
22	Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba				290,51	Bakesba ngpol
		Jumlah kasus narkoba	Kasus	11		
23	Program Pendidikan Politik Masyarakat				99,6	Bakesba ngpol, Setda (2018)
		Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih	%	tidak ada pemilu		
24	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				850,31	Bakesba ngpol, Satpol PP dan Damkar
		Persentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan kebangsaan	%	0,12		
		Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	-		
25	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan				1.373,22	Satpol PP dan Damkar
		Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	rasio	59,94		
26	Program Peningkatan				1.138,97	Satpol PP dan

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	36		Damkar
27	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana				862,3	BPBD
		Persentase penanganan daerah pasca bencana	%	13,33		
6.	URUSAN SOSIAL					
28	Program Pemberdayaan Sosial				1.896 ,49	Dinsosp ermade s
		Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	87,87		
		Persentase (%) PMKS skala kab yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	81,6		
		Persentase (%) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di bentuk dan dibina	%	80		
29	Program Penanganan Bencana				141,1 6	Dinsosp ermade s
		Persentase (%) korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100		
30	Program Penanganan Fakir Miskin				429,6 3	Dinsosp ermade s
		Persentase (%) Verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iur	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		(PBI) Jaminan Kesehatan				
31	Program Penanganan Korban Perdagangan Orang				546,24	Dinsosp ermade s
		Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	87,18		
32	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				2.682,09	Dinsosp ermade s
		Persentase (%) PMKS skala kab yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar	%	67		
		Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	38,64		
		Persentase (%) anak terlantar yang di tangani	%	29,2		
33	Program Rehabilitasi Sosial				110,48	Dinsosp ermade s
		Persentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100		
		Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit	%	55,85		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR						
1.	URUSAN TENAGA KERJA					
34	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				1.194 ,30	Diskop UKM Nakertr ans
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,8		
		AKAD (antar kerja antar daerah)	orang	14		
		AKAN (antar kerja antar negara)	orang	235		
35	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja				2.978 ,84	Diskop UKM Nakertr ans
		Persentase tenaga kerja yang siap kerja	%	2,8		
		Besaran tenaga kerja yang membuka usaha mandiri	%	3,1		
36	Program Perlindungan &Pengembanga n Lembaga Ketnagakerjaan				516,4 6	Diskop UKM Nakertr ans
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	54		
		Persentase perselisihan pengusaha-pekerja yang diselesaikan	%	100		
2.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
37	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender Dan Anak				1.973 ,95	DP3AP2 KB
		Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara	Skor	-		
		persentase Kecamatan	%	37,5		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Layak Anak (KELANA)				
		persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	%	19,49		
		persentase kelembagaan PUG aktif	%	100		
		persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100		
		Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Per 1.000	0,08		
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	per 1.000	1,25		
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Penanganan Sesuai Standar	%	100		
		Rasio Kekerasan Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	Per 1.000	0,68		
		38	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			
persentase Perempuan Rentan yang dientaskan	%			69,72		
3.	URUSAN PANGAN					
39	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan				3.616 ,11	DKPP
		Ketersediaan energi per kapita	K.kal/k ap/hr	2.440		
		Ketersediaan protein per kapita	gr/kap /hr	76		
		Persentase wilayah rawan pangan yang tertangani	%	100		
		Penguatan cadangan	%	43		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		pangan (beras)				
		Stabilitas harga pangan (gabah) di tingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP		
		Stabilitas harga pangan (beras) di tingkat Konsumen	%	CV< 5%		
		Jumlah wilayah terfasilitasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan	kecam atan	16		
		skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	92,1		
		Konsumsi energi dan protein per kapita				
		- Energi	kkal/ka p/ hari	2.060,00		
		- Protein	gr/kap /hari	58		
		4.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
40	Program Pengelolaan Limbah B3				115,28	DLH
		Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin	%	65		
41	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				4.970,88	DLH
		Persentase RTHK Publik	%	7,37		
42	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				24.208,83	DLH
		Persentase penanganan sampah	%	18,18		
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan				2.342,49	DLH
		Cakupan pengawasan terhadap	%/tah un	60		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Hidup	pelaksanaan AMDAL				
		Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL/UPL	%/tah un	17,94		
		Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%			
44	Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat				119,89	DLH
		Persentase aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	100		
45	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam				2.015,10	DLH
		Rasio cakupan penghijauan wilayah lahan kritis, rawan longsor dan sumber mata air.	%/tah un	1,5		
5.	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
46	Program Penataan Administrasi Kependudukan				2.983,45	Disdukc apil
		Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	94,12		
		Persentase Cakupan Bayi ber-akte Kelahiran (0-60 hari)	%	59,3		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Persentase Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 18 tahun	%	81,86		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	63,23		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	12,15		
		Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,3		
		Persentase Cakupan kepemilikan Akte Kematian	%	48,05		
6.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
47	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				886,65	Dinsosp ermade s
		Persentase BUMDES yang aktif	%	39,13		
48	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				2.024,34	Dinsosp ermade s, Setda (2017- 2018)
		Persentase Desa kategori tertib Penyelenggara n Keuangan Desa	%	88,04		
		persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	-		
		persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	%	-		
49	Program				2.068	Setda

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				,22	(2017-2018), Dinsosp ermade s, Kecama tan
		PKK Aktif	%	100		
		Posyandu Aktif	%	100		
		Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	60,08		
50	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa				280,39	Dinsosp ermade s, Setda (2017-2018)
		Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang Aktif	%	90,56		
		LPM Berprestasi	%	30		
7.	URUSAN PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB					
51	Program Keluarga Berencana				1.497,72	DP3AP2 KB
		TFR (Total Fertility Rate)	nilai	2,32		
		Cakupan peserta KB aktif	%	73,1		
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun)	per 1.000	32,01		
		Angka Dropout KB	%	21,91		
		persentase ketersediaan alokon	%	100		
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa atau kelurahan	%	100		
		Rasio pembantu pembina keluarga berencana (PPKBD)	rasio per desa	1,07		
		Cakupan Pelayanan PIK	%	4,37		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		KRR Terhadap Remaja				
52	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri				885,35	DP3AP2 KB
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	10,49		
53	Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.577,03	DP3AP2 KB
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	%	74,96		
8.	URUSAN PERHUBUNGAN					DISHU B
54	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan				37.258,54	
		Persentase ketersediaan Rambu laut	%	63		
		Persentase ketersediaan rambu rambu lalu lintas	%	45		
		Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota;	%	84		
55	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan				2.858,95	DISHUB
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang sesuai standar	%	46		
56	Program				917,6	DISHUB

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas				3	
		Persentase kecelakaan fatal	%	14		
57	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor				783,91	DISHUB
		Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	83		
58	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan				1.392,58	DISHUB
		Persentase ketersediaan angkutan darat;	%	6,18		
		Rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengaawasan per 6 bulan);	Rasio	0,000136		
		Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	-		
59	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				3.592,13	DISHUB
		Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik;	%	98		
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik;	%	86		
9.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
60	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi				2.073,20	Diskomi nfo
		Persentase desa yang mampu mengoperasikan e-gov	%	100		
61	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa				4.658,70	Diskomi nfo, Setwan (2017-2018)
		Persentase updating website PD (%)	%	80		
		Persentase media informasi	%	75		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		untuk masyarakat				
62	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	persentase permohonan KIP yang ditindaklanjuti	%	100	64,56	Diskominfo, Diskarpus (2017-2018)
10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
63	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri	%	1,1	1.128,82	Diskop UKM Nakertrans, Setda (2017-2018)
		Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	-		
64	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang mandiri pembiayaan dan pemasaran	%	0,11	202,89	Diskop UKM Nakertrans
65	Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan	Persentase Koperasi yang memiliki diversifikasi usaha	%	84,32	175,23	Diskop UKM Nakertrans
66	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UKM yang berdayasaing	%	2,53	808,81	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase OVOP yang berkembang	%	-		
67	Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber daya Lokal	Persentase OVOP yang berkembang	%	2	166	Diskop UKM Nakertrans
68	Program Penguasaan				276,67	Diskop UKM

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah Mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK)	%	58,26		Nakertr ans
69	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi				355,06	Diskop UKM Nakertr ans
		Persentase koperasi aktif	%	84,33		
11.	URUSAN PENANAMAN MODAL					
70	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi				947,14	DPMPTS P
		Nilai Realisasi Investasi - PMDN	Rp	115.000.000.000		
		- PMA	US \$	67.000.000		
71	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah				55,33	DPMPTS P
		Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	orang	21.740		
12.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
72	Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda				1.952,85	DISDIK PORA
		Cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan	%	2		
73	Progam Pengembangan Olahraga				3.120,50	DISDIK PORA
		Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional	Jumlah	9		
		Persentase cabang olahraga yang berprestasi	%	55		
13.	URUSAN STATISTIK					
74	Program Pengembangan data/informasi Statistik Sektoral				461,12	Diskomi nfo
		Persentase ketersediaan dokumen	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		statistik sektoral				
14.	URUSAN PERSANDIAN					
75	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	persentase informasi terenkripsi yang diserahkan kepada Kepala Daerah	%	100	46,11	Diskominfo
15.	URUSAN KEBUDAYAAN					
76	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan gelaran seni	%	100	3.098,73	Disparbud
		Persentase gedung kesenian yang memenuhi standar	%	100		
		Cakupan Organisasi Seni	%	66,6		
77	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Misi Kesenian	%	100	1.355,69	Disparbud
78	Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan gelaran seni	%	-	534,9	Disparbud
		Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	55,56		
16.	URUSAN PERPUSTAKAAN					
79	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi	Rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka	%	47	438,06	Diskarpus

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Jumlah dunia usaha/swasta/k omunitas yang berpartisipasi dalam peningkatan budaya gemar membaca masyarakat	unit	13		
80	Program Pengembangan Perpustakaan				2.614 ,55	Diskarp us
		Jumlah Perpustakaan:				
		· Daerah	unit	1		
		· Keliling	unit	7		
		· Lokasi sasaran keliling	lokasi	141		
		· Kecamata n	unit	9		
		· Desa	unit	70		
		· Masyaraka t	unit	25		
		· Sekolah	unit	260		
		Persentase pustakawan yang bersertifikasi	%	0,6		
		Jumlah pustakawan berdasarkan tingkatan	orang	5		
		· Terampil	orang	4		
		· Ahli	orang	1		
17. URUSAN KEARSIPAN						
81	Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip				69,17	Diskarp us
		Jumlah arsip statis yang di akses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	buku	60		
		Jumlah masyarakat pengguna arsip statis	orang	280		
82	Program Pengelolaan				765,4 6	Diskarp us

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN	Persentase arsiparis yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan	%	1,09		
		persentase unit kerja dan perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip)	%	61		
83	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah				1.106 ,69	Diskarp us
		Jumlah arsip statis yang di selamatkan	dokum en	190.000		
URUSAN PILIHAN						
1.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
84	Program Pengembangan Usaha Kecil Perikanan				2.539 ,61	Dinas Perikan an
		Persentase kelompok usaha kecil perikanan tingkat lanjut ke atas	%	19,15		
85	Program Pengembangan Budidaya Perikanan				9.591 ,31	Dinas Perikan an
		Produksi perikanan budidaya	Ton	23.062,00		
		persentase Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Telah Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)	%	15,69		
86	Program Pengembangan Perikanan Tangkap				25.20 5,51	Dinas Perikan an
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9.350,48		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
2.	URUSAN PARIWISATA.					
87	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				23.194,37	Disparbud
		Jumlah obyek wisata unggulan	Obyek	5		
88	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				977,58	Disparbud
		Jumlah desa wisata	Desa	11		
89	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				7.636,16	Disparbud
		Tingkat Pengeluaran Wisatawan				
		- Wisman	Rp/hari	1.255.000		
		- Wisnus	Rp/hari	505.000		
		Rata-rata lama menginap				
		- Wisman	Malam	3		
		- Wisnus	Malam	2		
90	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan				1.293,90	DKPP
		Persentase kelompok tani yang berkualitas	%	Pemula : 31,96 Lanjutan : 45.27 Madya : 17.32 Utama : 5.45		
91	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak				331,08	DKPP
		Angka kesakitan / morbiditas ternak				
		- ternak besar (%)	%	1,1		
		- ternak kecil (%)	%	1,4		
		- ternak unggas (%)	%	1,5		
92	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Peternakan				2.305,14	DKPP
		Persentase pelaku usaha pertanian/keompok tani yang sudah	%	23,77		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		menerapkan teknologi				
93	Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan				6.527 ,62	DKPP
		Jumlah produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	616,405.05		
		Jumlah produksi pertanian tanaman hortikultura utama	ton	388,069.21		
		Jumlah produksi pertanian tanaman perkebunan	ton	168,144.74		
		Jumlah produksi daging	kg	2,254,112.35		
		Jumlah produksi telur	kg	2,319,845.09		
		Jumlah produksi susu	lt	18.991,07		
4.	URUSAN PERDAGANGAN					
94	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				525	Disperin dag
		Persentase serapan resi gudang	%	9		
95	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				433,4 5	Disperin dag
		Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%	66,67		
96	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor				3.221 ,74	Disperin dag, Setda (2017-2018)
		Nilai Ekspor	Juta US\$	240		
97	Program Peningkatan Sarana Perdagangan				110.9 80,39	Disperki m (2017); Disperin dag
		Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat	%	33,33		
		Persentase Lokasi PKL yang tertata (sesuai SK)	%			

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
98	Program Standarisasi Alat Ukur				899,19	Disperin dag
		persentase peningkatan alat timbang dan ukur yang ditera	%	10		
5.	URUSAN PERINDUSTRIAN					
99	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah				3.043,40	Setda (2017-2018); Disperin dag
		Jumlah sentra industri yang berkembang	sentra	15		
100	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				553,34	Disperin dag
		Peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi	unit/ta hun	120		
6.	URUSAN TRANSMIGRASI					
101	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				175,23	
		Jumlah transmigrasi umum	KK	5		
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
102	Program Perencanaan Pembangunan Daerah				4.307,84	BPKAD (2017-2018), Bapped a
		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran	%	65		
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	-		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
2.	KEUANGAN					
103	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				11.62 9,46	Disinda g & Setda (2017- 2018), DKPP (2018), BPKAD
		Rasio Belanja Langsung terhadap Total APBD	%	44,32	33,5 5	
		Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)	%	14,52	17,1 7	
		Rasio SILPA thdp total belanja tahun sebelumnya	%	6	12,5 1	
		Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja	%	92,5	90,6 1	
		Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD	%	120,95	91,2 7	
		Peningkatan PAD	%	8,74	5	
		Rasio Belanja Modal dibanding Total Belanja Daerah	%	18,83	10,0 3	
		Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung dibanding Total Belanja Daerah	%	40,82	49	
		Persentase tanah milik Pemda yang bersertifikat	%	76	55	
3.	KEPEGAWAIAN					
104	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur				2.819 ,29	Setda (2018); BKD
		Persentase PNS yang kenaikan pangkatnya tepat waktu	%	100		
		Persentase PNS struktural yang mengikuti kegiatan	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		assesment				
		Persentas kasus pelanggaran disiplin PNS dalam satu tahun yang ditangani	%	100		
105	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				4.800 ,27	BKD, Setda
		Persentase Peningkatan SDM ASN melalui Pendidikan dan Pelatihan	%	58,22		
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	-		
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu	%	-		
4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
106	Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian				5.351 ,62	Bapped a
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang ekonomi, prasarana dan pengembangan wilayah yang dapat diimplementasik an	%	60		
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang pemerintahan, sosial dan budaya yang dapat diimplementasik an	%	60		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Persentase dokumen perencanaan dan penelitian bidang penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan	%	60		
5.	FUNGSI LAIN					
	SEKRETARIAT DAERAH					
107	Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa				1.443 ,31	Setda
		persentase Desa yang menyusun LPPDesa dan LKPJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100		
		persentase desa yang mampu meyusun APBDes tepat waktu	%	92,39		
108	Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah				871,5 2	Setda
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun LKJiP tepat waktu	%	85		
		Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukuran	%	70		
109	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah				1.879 ,53	Setda
		Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten,	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
		Provinsi dan Pusat				
110	Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan				694,45	Setda
		Nilai LPPD	opini	sangat memuaskan		
111	Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum				1.042,13	Setda
		persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	100		
112	Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah				1.752,26	Setda
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	100		
113	Program Peningkatan Koordinasi dibidang Kesejahteraan Rakyat				7.359,48	Setda
		Persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bdkesejahteraan rakyat pada tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	%	100		
114	Program peningkatan kualitas pelayanan publik				253,62	Setda
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun SOP	%	100		
	SEKRETARIAT DPRD					
115	Program Peningkatan				20.289,31	Setwan

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
	Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	35		
	PENGAWASAN					
116	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan				518,55	Inspekt orat
		Zona Integritas pada Kabupaten Jepara	Unit Pelaya nan/P D	WBK : 1 WBBM : 1		
117	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				297,3	Inspekt orat
		Kapabilitas APIP	level	3		
118	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				2.073 ,20	Inspekt orat, BKD, Setda
		Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	%	100		
		Persentase laporan hasil tindaklanjut temuan hasil pengawaasan yang telah ditindaklanjuti	%	100		
		Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI	%	100		
		Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui LPSE	%	-		
	PEMERINTAHAN UMUM					
119	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				29,51	Setda (2017-2018), DPMPTS P
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklaniuti	%	100		

No.	Urusan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Sat.	2021		PD Penang gung jawab
				Target	Rp (juta)	
120	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				48.955,94	Semua PD
		Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	%	100		
121	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan				5.533,45	Setda (2017-2018), Setwan
		Persentase Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang di syahkan	%	100		
		persentase Kajian Produk Hukum Daerah	%	-		
122	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				6.755,42	Diskominfo (2017), Setda
		persentase pemenuhan pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	12		
123	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan				3.502,27	Semua PD
		Persentase Serapan Anggaran	%	100		
		Nilai LPPD	opini	-		
124	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				7.146,69	Semua PD
		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana	%	100		
	TOTAL				1.126.312,44	

Sumber: RPJMD Kab. Jepara Tahun 2017-202

Tabel Kegiatan Pembangunan Daerah
dalam RKPD Tahun 2021

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	OPD

	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
01	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.150.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
02	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	221.080.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
03	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.556.430.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
04	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.169.245.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
05	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.673.256.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
06	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.459.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
07	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	90.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
08	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	102.019.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
09	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	225.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
10	Pengadaan Mebel Sekolah	482.334.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	385.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.769.587.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	719.852.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
14	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	294.231.400	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	9.245.575.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	79.244.927.087	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	652.890.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
18	Pemeliharaan Mebel Sekolah	258.108.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
19	Penambahan Ruang Kelas Baru	230.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
20	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	230.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

21	Pembangunan Laboratorium	250.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
22	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	805.130.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.568.487.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.754.795.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
25	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.152.739.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
26	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.457.832.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	603.771.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
28	Pengadaan Mebel Sekolah	1.037.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	64.653.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.560.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
31	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
32	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	770.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
33	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	318.407.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
34	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	457.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
35	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.116.308.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.095.373.022	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
37	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	739.456.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
38	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	84.220.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
39	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	241.052.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
40	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	394.962.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
41	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	210.049.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

42	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	7.230.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
43	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	150.799.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
44	Pengelolaan Dana BOP PAUD	25.363.200.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
45	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55.627.583.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
46	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	903.375.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
47	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	734.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	53.254.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
49	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	46.111.699.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
50	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	420.705.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
51	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	7.335.100.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
52	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	68.850.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
53	Pembangunan Puskesmas	7.877.399.000	Dinas Kesehatan
54	Pengembangan Puskesmas	0	Dinas Kesehatan
55	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	275.000.000	Dinas Kesehatan
56	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7.740.548.000	Dinas Kesehatan
57	Pengadaan Obat, Vaksin	3.399.650.000	Dinas Kesehatan
58	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.527.914.000	Dinas Kesehatan
59	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	229.017.000	Dinas Kesehatan
60	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	220.535.000	Dinas Kesehatan
61	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.026.547.000	Dinas Kesehatan
62	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.823.714.000	Dinas Kesehatan
63	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	105.592.000	Dinas Kesehatan

64	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.841.000	Dinas Kesehatan
65	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	90.204.000	Dinas Kesehatan
66	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.430.000	Dinas Kesehatan
67	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	220.131.000	Dinas Kesehatan
68	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2.850.000	Dinas Kesehatan
69	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.500.000	Dinas Kesehatan
70	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9.095.000	Dinas Kesehatan
71	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	27.000.000	Dinas Kesehatan
72	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	85.533.000	Dinas Kesehatan
73	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.428.664.000	Dinas Kesehatan
74	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.986.151.000	Dinas Kesehatan
75	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	121.061.000	Dinas Kesehatan
76	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.119.983.000	Dinas Kesehatan
77	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.139.551.000	Dinas Kesehatan
78	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	2.695.000	Dinas Kesehatan
79	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	51.161.467.000	Dinas Kesehatan
80	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	105.957.000	Dinas Kesehatan
81	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	90.000	Dinas Kesehatan
82	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	40.000.000	Dinas Kesehatan
83	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.166.938.000	Dinas Kesehatan
84	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.994.984.000	Dinas Kesehatan
85	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	7.640.000	Dinas Kesehatan

86	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	345.832.000	Dinas Kesehatan
87	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	113.986.714.910	Dinas Kesehatan
88	Operasional Pelayanan Puskesmas	63.357.731.524	Dinas Kesehatan
89	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	675.393.000	Dinas Kesehatan
90	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	7.415.000	Dinas Kesehatan
91	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	104.076.000	Dinas Kesehatan
92	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	168.547.000	Dinas Kesehatan
93	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	168.547.000	Dinas Kesehatan
94	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	481.816.000	Dinas Kesehatan
95	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.875.000	Dinas Kesehatan
96	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	929.964.000	Dinas Kesehatan
97	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.000.000	Dinas Kesehatan
98	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.340.000	Dinas Kesehatan
99	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	74.782.000	Dinas Kesehatan
100	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	454.294.000	Dinas Kesehatan
101	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	19.350.000	Dinas Kesehatan

	antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
102	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	9.100.000	Dinas Kesehatan
103	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.000.000	Dinas Kesehatan
104	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	167.309.000	Dinas Kesehatan
105	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	55.600.000	Dinas Kesehatan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
106	Pembangunan Tanggul Sungai	4.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	398.640.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
108	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.350.720.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
109	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	26.544.820.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
110	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	11.549.320.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
111	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	98.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
112	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	66.680.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
113	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.102.245.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
114	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.711.317.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
115	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
116	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	91.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

	Terpusat Skala Kota		
117	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	6.568.567.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
118	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	6.450.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
119	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	117.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
120	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	27.480.357.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
121	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.245.282.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
122	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15.050.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
123	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
124	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20.805.926.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
125	Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.610.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
126	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
127	Pembangunan Jalan	18.758.720.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
128	Pelebaran Jalan Menuju Standar	10.681.049.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
129	Rekonstruksi Jalan	29.729.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
130	Rehabilitasi Jalan	2.893.948.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
131	Pemeliharaan Berkala Jalan	26.567.137.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
132	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

133	Penggantian Jembatan	1.809.903.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
134	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
135	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
136	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	50.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
137	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
138	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
139	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	20.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
140	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
141	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.550.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
142	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	25.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
143	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
144	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.590.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
145	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
146	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	33.341.381.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
147	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman	1.569.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

	Kumuh		
148	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	924.289.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
149	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	580.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
150	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	61.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
151	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	62.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
152	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	10.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
153	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	195.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
154	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	25.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
155	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.710.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
156	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	16.000.000	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
157	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
158	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	Kabupaten/Kota		
159	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
160	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	130.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
161	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	80.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
162	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
163	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
164	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	26.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
165	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	374.066.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
166	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	548.890.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
167	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.900.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
168	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
169	Penyediaan Permakanan	350.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
170	Penyediaan Alat Bantu	391.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
171	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	2.526.150.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan

			Masyarakat dan Desa
172	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	95.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
173	Penyediaan Permakanan	75.500.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
174	Penyediaan Sandang	25.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
175	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.918.858.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
176	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	224.902.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
177	Penyediaan Makanan	495.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
178	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	19.250.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
179	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	24.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
180	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	30.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
181	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	959.687.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
182	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
183	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	4.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan

			Transmigrasi
184	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	17.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
185	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	6.377.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
186	Pelayanan antar Kerja	5.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
187	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	6.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
188	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	5.200.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
189	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
190	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	7.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
191	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	5.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
192	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	18.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
193	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
194	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	16.398.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

195	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	13.650.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
196	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	13.650.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
197	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
198	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	3.999.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
199	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
200	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	58.283.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
201	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	23.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
202	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	268.590.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	52.190.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
204	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.030.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	323.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
206	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.765.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
207	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
208	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.705.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
209	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.699.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
210	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.245.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		

211	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	525.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
212	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	22.133.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
213	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	29.859.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
214	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	42.265.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
215	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	180.535.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
216	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
217	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	16.468.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
218	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	79.990.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
219	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	741.350.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
220	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
221	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	496.980.000	Dinas Lingkungan Hidup
222	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	16.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
223	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	174.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
224	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

225	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
226	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
227	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	620.121.000	Dinas Lingkungan Hidup
228	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.638.825.000	Dinas Lingkungan Hidup
229	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	91.825.000	Dinas Lingkungan Hidup
230	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	0	Dinas Lingkungan Hidup
231	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7.984.000	Dinas Lingkungan Hidup
232	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
233	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
234	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.507.525.000	Dinas Lingkungan Hidup
235	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	145.718.000	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
236	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	307.500.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
237	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	95.800.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
238	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	75.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

239	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	25.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
240	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	460.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
241	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	45.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
242	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	70.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
243	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
244	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.000.000	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
245	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.268.150.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
246	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.636.400.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
247	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	30.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
248	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	35.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
249	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.449.466.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
250	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	134.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
251	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	35.600.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

252	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	87.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
253	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	647.772.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
254	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	60.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
255	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	39.800.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
256	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10.010.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
257	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	96.450.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
258	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	30.590.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
259	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	197.372.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

260	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	39.213.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
261	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.152.768.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
262	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	35.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
263	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.080.789.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
264	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.363.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
265	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.856.063.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
266	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.305.971.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
267	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	39.706.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian

			Penduduk dan Keluarga Berencana
268	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	13.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
269	Peningkatan Kesertaan KB Pria	13.790.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
270	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	28.140.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
271	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	790.528.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
272	Pembinaan Terpadu Kampung KB	10.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
273	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
274	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	66.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

275	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	594.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
276	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	155.318.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
277	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	46.513.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
278	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.196.000.000	Dinas Perhubungan
279	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	204.518.000	Dinas Perhubungan
280	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	600.000.000	Dinas Perhubungan
281	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	24.000.000	Dinas Perhubungan
282	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	67.700.000	Dinas Perhubungan
283	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000	Dinas Perhubungan
284	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	354.850.000	Dinas Perhubungan
285	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100.000.000	Dinas Perhubungan
286	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	880.000.000	Dinas Perhubungan
287	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	1.100.000	Dinas Perhubungan

288	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30.000.000	Dinas Perhubungan
289	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	10.000.000	Dinas Perhubungan
290	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	Dinas Perhubungan
291	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Perhubungan
292	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	654.085.000	Dinas Perhubungan
293	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	Dinas Perhubungan
294	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	12.693.000.000	Dinas Perhubungan
295	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	90.000.000	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
296	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	370.225.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
297	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	337.285.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
298	Pelayanan Informasi Publik	388.744.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
299	Layanan Hubungan Media	1.758.060.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
300	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	90.100.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
301	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	221.684.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
302	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.031.519.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
303	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	255.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

304	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	25.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
305	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
306	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	42.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
307	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
308	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
309	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.197.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
310	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
311	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	247.381.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
312	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	34.655.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
313	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	21.020.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
314	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	51.150.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
315	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	504.473.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
316	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	17.015.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
317	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	27.313.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
318	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	92.841.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
319	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	30.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
320	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12.320.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
321	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.362.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
322	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	248.112.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
323	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	32.304.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
324	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	95.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
325	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	250.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
326	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	605.600.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
327	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	229.829.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
328	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat	684.620.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

	Kabupaten/Kota		
329	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	453.060.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
330	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	704.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
331	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	173.500.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
332	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	25.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
333	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	79.400.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
334	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
335	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	856.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
336	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	470.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
337	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	35.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
338	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
339	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	30.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
340	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	40.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
341	Pelindungan Cagar Budaya	105.800.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
342	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	239.200.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
343	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	361.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
344	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana	125.000.000	Dinas Pariwisata dan

	dan Prasarana Museum		Kebudayaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
345	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
346	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	182.500.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
347	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	10.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
348	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
349	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
350	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	40.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
351	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	60.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
352	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	20.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
353	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	10.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
354	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	44.300.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
355	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	21.163.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
356	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	12.025.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
357	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	18.682.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
358	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	13.080.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
359	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	750.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
360	Penyediaan Prasarana Usaha	155.040.000	Dinas Perikanan

	Perikanan Tangkap		
361	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.392.800.000	Dinas Perikanan
362	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	250.000.000	Dinas Perikanan
363	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	300.000.000	Dinas Perikanan
364	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	86.200.000	Dinas Perikanan
365	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	Dinas Perikanan
366	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	744.765.000	Dinas Perikanan
367	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	617.755.000	Dinas Perikanan
368	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.000.000	Dinas Perikanan
369	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50.000.000	Dinas Perikanan
370	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	144.600.000	Dinas Perikanan
371	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	Dinas Perikanan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
372	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.762.159.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
373	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

374	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	371.777.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
375	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
376	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	330.368.288	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
377	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	11.697.410.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
378	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	27.575.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
379	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	300.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
380	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	900.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
381	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	25.200.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
382	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
383	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	393.571.428	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
384	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	368.638.284	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
385	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	10.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
386	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	32.900.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
387	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	135.620.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
388	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	188.872.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
389	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	210.300.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

390	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	141.940.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
391	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2.992.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
392	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	71.060.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
393	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.072.275.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
394	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	540.100.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
395	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	387.475.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
396	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.790.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
397	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	82.800.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
398	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
399	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	42.624.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
400	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	35.776.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
401	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
402	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	64.256.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
403	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	156.046.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
404	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	594.800.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
405	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	195.950.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

406	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.127.646.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
407	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
408	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
409	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	18.370.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
410	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
411	Peningkatan Citra Produk Ekspor	32.236.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
412	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	43.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
413	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
414	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
415	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	60.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
416	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.379.213.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
417	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	81.300.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
418	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
419	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.408.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja dan

			Transmigrasi
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
420	Penataan Administrasi Pemerintahan	25.380.000	Sekretariat Daerah
421	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	15.000.000	Sekretariat Daerah
422	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	142.650.000	Sekretariat Daerah
423	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.129.868.000	Sekretariat Daerah
424	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	18.590.420.250	Sekretariat Daerah
425	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	841.750.000	Sekretariat Daerah
426	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	138.000.000	Sekretariat Daerah
427	Fasilitasi Bantuan Hukum	546.270.000	Sekretariat Daerah
428	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	213.860.000	Sekretariat Daerah
429	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	135.878.000	Sekretariat Daerah
430	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	86.000.000	Sekretariat Daerah
431	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	484.485.000	Sekretariat Daerah
432	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	509.550.000	Sekretariat Daerah
433	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	78.000.000	Sekretariat Daerah
434	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000	Sekretariat Daerah
435	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	120.000.000	Sekretariat Daerah
436	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	348.000.000	Sekretariat Daerah
437	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	175.000.000	Sekretariat Daerah
438	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	196.280.000	Sekretariat Daerah
439	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2.981.540.108	Sekretariat Daerah
	SEKRETARIAT DPRD		

440	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	814.103.000	Sekretariat DPRD
441	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.648.365.000	Sekretariat DPRD
442	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	580.000.000	Sekretariat DPRD
443	Penyusunan Tata Tertib DPRD	26.500.000	Sekretariat DPRD
444	Pembahasan KUA dan PPAS	25.000.000	Sekretariat DPRD
445	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.000.000	Sekretariat DPRD
446	Pembahasan APBD	25.000.000	Sekretariat DPRD
447	Pembahasan APBD Perubahan	25.000.000	Sekretariat DPRD
448	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	25.000.000	Sekretariat DPRD
449	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	286.500.000	Sekretariat DPRD
450	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	294.600.000	Sekretariat DPRD
451	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	304.900.000	Sekretariat DPRD
452	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	248.300.000	Sekretariat DPRD
453	Bimbingan Teknis DPRD	2.305.525.000	Sekretariat DPRD
454	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	756.825.000	Sekretariat DPRD
455	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	240.000.000	Sekretariat DPRD
456	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	384.000.000	Sekretariat DPRD
457	Pelaksanaan Reses	2.871.300.000	Sekretariat DPRD
458	Pengawasan Kode Etik DPRD	480.310.000	Sekretariat DPRD
459	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.902.121.000	Sekretariat DPRD
460	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	130.000.000	Sekretariat DPRD
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
	PERENCANAAN		
461	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	394.134.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
462	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

			Daerah
463	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	63.870.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
464	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
465	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.566.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
466	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	160.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
467	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.015.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
468	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	35.225.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
469	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28.869.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
470	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	70.170.875	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	KEUANGAN		
471	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	145.625.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

			Daerah
472	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	157.325.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
473	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	101.825.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
474	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	77.075.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
475	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	57.428.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
476	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	91.852.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
477	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	513.080.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
478	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	446.920.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
479	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	351.370.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
480	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
481	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
482	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	15.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
483	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	180.840.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
484	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	40.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
485	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	132.080.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

	Lainnya		
486	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	48.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
487	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	45.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
488	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	20.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
489	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
490	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	598.080.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
491	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	15.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
492	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
493	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	27.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
494	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	240.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
495	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	35.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
496	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	77.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
497	Analisis Perencanaan dan Penyaluran	393.979.450.000	Badan Pengelolaan

	Bantuan Keuangan		Keuangan dan Aset Daerah
498	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24.836.718.720	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
499	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	17.529.677.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
500	Penyusunan Standar Harga	60.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
501	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
502	Penatausahaan Barang Milik Daerah	127.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
503	Inventarisasi Barang Milik Daerah	47.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
504	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.521.910.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
505	Penilaian Barang Milik Daerah	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
506	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	185.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
507	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
508	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
509	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	65.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
510	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	904.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
511	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	803.964.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
512	Penagihan Pajak Daerah	2.750.206.000	Badan Pengelolaan

			Keuangan dan Aset Daerah
513	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	67.600.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
514	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	476.630.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	KEPEGAWAIAN		
515	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1.572.125.000	Badan Kepegawaian Daerah
516	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	115.664.000	Badan Kepegawaian Daerah
517	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	65.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
518	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	51.872.000	Badan Kepegawaian Daerah
519	Pengelolaan Data Kepegawaian	95.241.000	Badan Kepegawaian Daerah
520	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	48.865.000	Badan Kepegawaian Daerah
521	Pengelolaan Mutasi ASN	17.315.000	Badan Kepegawaian Daerah
522	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	46.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
523	Pengelolaan Promosi ASN	544.930.000	Badan Kepegawaian Daerah
524	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	93.657.000	Badan Kepegawaian Daerah
525	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1.200.000	Badan Kepegawaian Daerah
526	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	9.641.000	Badan Kepegawaian Daerah
527	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.500.000	Badan Kepegawaian Daerah
528	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	11.686.000	Badan Kepegawaian Daerah
529	Pembinaan Disiplin ASN	69.487.000	Badan Kepegawaian Daerah
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
530	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah	435.545.000	Badan Kepegawaian Daerah

	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
531	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	305.837.500	Badan Kepegawaian Daerah
532	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	291.793.000	Badan Kepegawaian Daerah
533	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.021.814.000	Badan Kepegawaian Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
534	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
535	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	85.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
536	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	105.440.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
537	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	331.261.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
538	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	226.725.750	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

			Daerah
539	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
540	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	97.307.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
541	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	120.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
542	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	98.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
543	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	20.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
544	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	42.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
545	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	92.800.000	Inspektorat
546	Reviu Laporan Kinerja	32.550.000	Inspektorat
547	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	60.950.000	Inspektorat
548	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	31.000.000	Inspektorat
549	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	79.500.000	Inspektorat
550	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	19.050.000	Inspektorat
551	Pendampingan, Asistensi dan	315.000.000	Inspektorat

	Verifikasi Penegakan Integritas		
	UNSUR KEWILAYAHAN		
552	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.000.000	Kecamatan Kedung
553	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.250.000	Kecamatan Kedung
554	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.000.000	Kecamatan Kedung
555	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	Kecamatan Kedung
556	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	Kecamatan Kedung
557	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.500.000	Kecamatan Kedung
558	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.000.000	Kecamatan Kedung
559	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.500.000	Kecamatan Kedung
560	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.365.000	Kecamatan Pecangaan
561	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.700.000	Kecamatan Pecangaan
562	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.588.000	Kecamatan Pecangaan
563	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14.800.000	Kecamatan Pecangaan
564	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6.000.000	Kecamatan Pecangaan
565	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.000.000	Kecamatan Pecangaan
566	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	Kecamatan Pecangaan
567	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.000.000	Kecamatan Pecangaan
568	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.880.000	Kecamatan Pecangaan

569	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.088.000	Kecamatan Kalinyamatan
570	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17.061.000	Kecamatan Kalinyamatan
571	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.212.000	Kecamatan Kalinyamatan
572	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000	Kecamatan Kalinyamatan
573	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	17.381.500	Kecamatan Kalinyamatan
574	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.452.000	Kecamatan Kalinyamatan
575	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.500.000	Kecamatan Kalinyamatan
576	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.500.000	Kecamatan Kalinyamatan
577	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.128.000	Kecamatan Kalinyamatan
578	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.945.000	Kecamatan Kalinyamatan
579	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.960.000	Kecamatan Welahan
580	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.335.000	Kecamatan Welahan
581	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.950.000	Kecamatan Welahan
582	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.400.000	Kecamatan Welahan
583	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.384.000	Kecamatan Welahan
584	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	32.055.000	Kecamatan Welahan
585	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.790.000	Kecamatan Welahan
586	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.370.000	Kecamatan Welahan

587	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.400.000	Kecamatan Welahan
588	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.410.000	Kecamatan Welahan
589	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18.010.000	Kecamatan Mayong
590	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.005.000	Kecamatan Mayong
591	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.710.000	Kecamatan Mayong
592	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.230.000	Kecamatan Mayong
593	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.900.000	Kecamatan Mayong
594	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.140.000	Kecamatan Mayong
595	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.300.000	Kecamatan Mayong
596	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.650.000	Kecamatan Mayong
597	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.070.000	Kecamatan Mayong
598	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.810.000	Kecamatan Mayong
599	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37.105.000	Kecamatan Nalumsari
600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.719.000	Kecamatan Nalumsari
601	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.175.000	Kecamatan Nalumsari
602	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.200.000	Kecamatan Nalumsari
603	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.750.000	Kecamatan Nalumsari
604	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.214.000	Kecamatan Nalumsari

605	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21.970.000	Kecamatan Nalumsari
606	Kecamatan Batealit	3.102.994.000	Kecamatan Nalumsari
607	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8.000.000	Kecamatan Nalumsari
608	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	Kecamatan Nalumsari
609	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.940.000	Kecamatan Nalumsari
610	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.230.000	Kecamatan Nalumsari
611	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000	Kecamatan Nalumsari
612	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.930.000	Kecamatan Nalumsari
613	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.000.000	Kecamatan Nalumsari
614	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.335.000	Kecamatan Tahunan
615	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.500.000	Kecamatan Tahunan
616	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.120.000	Kecamatan Tahunan
617	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.000.000	Kecamatan Tahunan
618	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.200.000	Kecamatan Tahunan
619	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.034.000	Kecamatan Tahunan
620	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.775.000	Kecamatan Tahunan
621	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.080.000	Kecamatan Tahunan
622	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.160.000	Kecamatan Tahunan

623	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.480.000	Kecamatan Tahunan
624	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50.000.000	Kecamatan Jepara
625	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	Kecamatan Jepara
626	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	550.000.000	Kecamatan Jepara
627	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	550.000.000	Kecamatan Jepara
628	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	115.000.000	Kecamatan Jepara
629	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	130.000.000	Kecamatan Jepara
630	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000	Kecamatan Jepara
631	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.500.000	Kecamatan Jepara
632	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	Kecamatan Jepara
633	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	Kecamatan Jepara
634	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.507.420	Kecamatan Jepara
635	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.834.192	Kecamatan Jepara
636	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.400.000	Kecamatan Mlonggo
637	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.520.000	Kecamatan Mlonggo
638	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.540.000	Kecamatan Mlonggo
639	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000	Kecamatan Mlonggo
640	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.145.000	Kecamatan Mlonggo
641	Kecamatan Pakisaji	3.057.026.000	Kecamatan Mlonggo

642	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	18.754.000	Kecamatan Mlonggo
643	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.800.000	Kecamatan Mlonggo
644	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.793.000	Kecamatan Mlonggo
645	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.600.000	Kecamatan Mlonggo
646	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.000.000	Kecamatan Mlonggo
647	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	Kecamatan Mlonggo
648	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.453.000	Kecamatan Mlonggo
649	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.500.000	Kecamatan Mlonggo
650	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	18.330.000	Kecamatan Mlonggo
651	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11.866.000	Kecamatan Bangsri
652	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.614.000	Kecamatan Bangsri
653	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.350.000	Kecamatan Bangsri
654	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.300.000	Kecamatan Bangsri
655	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.200.000	Kecamatan Bangsri
656	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	42.414.000	Kecamatan Bangsri
657	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.720.000	Kecamatan Bangsri
658	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.500.000	Kecamatan Bangsri
659	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.800.000	Kecamatan Bangsri

660	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.802.000	Kecamatan Bangsri
661	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	22.830.000	Kecamatan Kembang
662	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.000.000	Kecamatan Kembang
663	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.000.000	Kecamatan Kembang
664	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.300.000	Kecamatan Kembang
665	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.400.000	Kecamatan Kembang
666	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.200.000	Kecamatan Kembang
667	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.400.000	Kecamatan Kembang
668	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.570.000	Kecamatan Kembang
669	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.300.000	Kecamatan Kembang
670	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000	Kecamatan Kembang
671	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.390.000	Kecamatan Keling
672	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	34.325.000	Kecamatan Keling
673	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.000.000	Kecamatan Keling
674	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000	Kecamatan Keling
675	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.970.000	Kecamatan Keling
676	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000	Kecamatan Keling
677	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.500.000	Kecamatan Keling

678	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6.840.000	Kecamatan Keling
679	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15.300.000	Kecamatan Donorojo
680	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000	Kecamatan Donorojo
681	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.500.000	Kecamatan Donorojo
682	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.780.000	Kecamatan Donorojo
683	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.450.000	Kecamatan Donorojo
684	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.289.000	Kecamatan Donorojo
685	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.000.000	Kecamatan Donorojo
686	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.760.000	Kecamatan Donorojo
687	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	803.965.000	Kecamatan Karimunjawa
688	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.825.000	Kecamatan Karimunjawa
689	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.760.000	Kecamatan Karimunjawa
690	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.639.000	Kecamatan Karimunjawa
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
691	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	140.650.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
692	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	1.378.677.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
693	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	76.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
694	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	90.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
695	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	161.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
696	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	135.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

C. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Latar Belakang

Salah satu tugas Pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran masyarakat itu sendiri.

Disamping itu fungsinya komponen mempercepat kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat daya saing daerah terhadap produk-produk yang dihasilkan serta birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani, transparan dan akuntabel. Oleh karenanya dalam rangka mencapai arah yang jelas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur dengan jelas dan tegas terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, sehingga pada masing-masing tingkatan pemerintahan, sehingga pada masing-masing tingkatan pemerintahan dapat dengan terus melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, tidak terkecuali dengan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya berpedoman dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Tramtibum dan Linmas
6. Urusan Sosial

2. Dasar Hukum

Agar supaya pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat mudah untuk dievaluasi, maka perlu peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 8 ayat (2);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

- c. Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial;
- e. Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PUPR;
- f. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan;
- g. Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah kabupaten / Kota;
- h. Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota;
- i. Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- j. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/868/Bangda tanggal 13 Februari 2018 tentang Pelaksanaan SPM;
- m. Peraturan Bupati Jepara Nomor 116 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2021.

3. Kebijakan Umum

Bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara harus ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2017 – 2022. Namun demikian RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2017 – 2022 disusun sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sehingga diperlukan langkah-langkah penyesuaian agar kegiatan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar bagi masyarakat terakomodir dalam program-program RPJMD tahun 2017 – 2022.

Langkah-langka adaptif yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Organisasi Perangkat Daerah sebagai pendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terutama yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Jepara, meliputi :

a. Pendataan / Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui jumlah dan identitas lengkap warga masyarakat yang berhak memperoleh barang / jasa terhadap kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

b. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Langkah Perangkat Daerah melakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dimaksudkan agar diketahui selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang / jasa serta sarana dan atau prasarana atas dasar jumlah warga masyarakat penerima pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan standar biaya yang berlaku.

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Setelah dilakukan pengumpulan data terhadap kebutuhan pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasarnya serta sudah diketahui dari penghitungan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, maka tahap selanjutnya adalah Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai penghitungan yang telah dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pengampu SPM untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD, oleh karena itu Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan harus memastikan bahwa program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja

PD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan bahwa anggaran program dan kegiatan terhadap pemenuhan pelayanan dasar sudah masuk dalam APBD.

4. Arah dan Kebijakan

Guna memastikan komitmen Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Jepara, langkah selanjutnya adalah mengawal program dan kebijakan yang telah masuk pada RKPD untuk dibahas bersama DPRD dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam satu tahun anggaran yang akan datang. Komitmen dari anggota DPRD terutama yang ada di Badan Anggaran sangat menentukan sekali atas realisasi terhadap rencana pemenuhan pelayanan dasar. Apabila dalam pembahasan KUA PPAS dapat disetujui oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dalam RAPBD Kabupaten Jepara. Didalam pemenuhan kebutuhan jenis pelayanan dasar masyarakat yang diukur dari capaian masing-masing indikator, maka untuk mewujudkannya setiap tahun pada APBD harus melaksanakan kegiatan pada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang telah di SPM-kan sesuai kemampuan anggaran daerah, dan kegiatan-kegiatan tersebut mendasarkan pada program yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022. Secara umum pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kabupaten Jepara telah berjalan dengan baik dan telah mencapai target sebagaimana yang ditetapkan pemerintah pusat melalui kementerian dan non kementerian terkait.

5. Landasan Penyusunan

Karena PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum diberlakukan secara penuh terhadap penyusunan laporan SPM tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, maka berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota se Jawa Tengah dengan Pemprov Jawa Tengah Cq. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu untuk mengetahui capaian program pada masing-masing indikator RPJMD perlu adanya pembandingan dua tahun anggaran sebelumnya sehingga dapat ditentukan target dan capaian untuk Standar Pelayanan Minimal selanjutnya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. Capaian Kinerja Makro

Indikator kinerja makro yang memuat Indeks Pembangunan manusia sampai dengan Rasio Gini, data yang disajikan adalah tahun 2020 dan tahun 2021 yang diambil berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik baik dari Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Jepara.

Tabel 1.19
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,99	72,36
2	Angka Kemiskinan:		
	Jumlah Penduduk Miskin (000)	91,14	95,22
	Persentase Penduduk Miskin	7,17	7,44
	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,60	0,88
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,07	0,17
	Garis Kemiskinan	407 056	419.028
3	Angka Pengangguran :		
	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,70	4,23
4	Pertumbuhan Ekonomi **	-1,92	4,63**
5	Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rupiah) ¹	848.114	1.014.416
6	Rasio Gini ²	0,343	-

Data BPS Kabupaten Jepara Tahun 2021
 **Angka Sementara
¹ Pengeluaran perkapita/bulan berdasarkan hasil SUSENAS
² Data tahun 2021 belum tersedia

II. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).
 - ❖ Urusan Pendidikan.

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Untuk urusan pendidikan capaian kinerjanya diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci keluaran, yaitu :

1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta).

Di Kabupaten Jepara, pada tahun 2021 dari 970 PAUD yang ada, 552 unit PAUD sudah terakreditasi atau capaian kinerjanya sebesar 53.81%.

2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

Di sepanjang tahun 2021, dari 37.693 peserta didik PAUD, baik negeri maupun swasta semuanya sudah menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa).

Dari 37.693 peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara belum ada yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa) di sepanjang tahun 2021

4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak 1.940 orang

5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta).

Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara memiliki 4.272 orang pendidik.

6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.

Pendidik pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini

pada tahun 2021 sebanyak 2.576 orang pendidik dari 4.272 orang pendidik yang ada. .

7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Dari 902 orang kepala sekolah PAUD di Kabupaten Jepara, jumlah Kepala Sekolah yang memiliki ijazah sebanyak 704 orang.

8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi.

Sampai dengan tahun 2021, SD dan SMP negeri di Kabupaten Jepara yang terakreditasi sebanyak 689 unit dari 697 unit SD dan SMP yang ada.

9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

Dari 82.350 peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang ada di Jepara sudah seluruhnya menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.

10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah. Dari 26.996 peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, seluruhnya sudah mendapatkan perlengkapan dasar dari Pemkab Jepara.

11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.

Dari 82.350 siswa yang ada di Kabupaten Jepara, sebanyak 38.353 siswa yang bebas biaya pendidikan atau capaiannya sebesar 46,79%.

12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.
- Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara terdapat 26.996 siswa SMP. Pada tahun yang sama terdapat 1.976 siswa yang bebas biaya pendidikan atau sebesar 7,32%.
13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).
- Kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Jepara sebanyak 5.478 orang.
14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).
- Kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 2.122 orang.
15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar.
- Pada tahun 2021 terdapat 4.915 orang pendidik pada jenjang Sekolah Dasar.
16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).
- Pada tahun 2021 terdapat 1.765 orang pendidik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, baik negeri maupun swasta.
17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).
- Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 2.322 orang.
18. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).
- Kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah Menengah Pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 495 orang.
19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta).

Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 1.287 orang.

20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta).

Tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 555 orang.

21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat.

Tenaga pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara sebanyak 2.077 orang.

22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.

Tenaga pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 1.044 orang.

23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara dari 428 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta), yang sudah memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 413 orang.

24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV

atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara dari 93 orang kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta), yang sudah memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 63 orang.

25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Dari 905 orang tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) ada 674 orang yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau capaiannya sebesar 74,48%.

26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Dari 564 orang tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) ada 376 orang yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau capaiannya sebesar 66,67%.

27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta).

Di tahun 2021, dari 17 PKBM yang ada di Jepara ada 9 unit PKBM yang sudah terakreditasi atau capainya sebesar 52,94%.

28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah.

Dari 684 peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sudah seluruhnya menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah atau capaiannya sebesar 100%..

29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan.

Dari 684 siswa paket A dan B yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2021, sejumlah 544 peserta didik menerima pembebasan biaya pendidikan atau 79,53%.

30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).

Kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak 139 orang.

31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta).

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) di kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 133 orang.

32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak 110 orang.

33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

Di tahun 2021, belum ada kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1.

Sedangkan kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sebanyak 20 orang.

❖ **Kesehatan.**

Memiliki luas wilayah 100.413.189 Ha dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara terdiri atas 16 kecamatan, 184 desa, 11

kelurahan serta 1.015 RW dan 4.766 RT. Wilayah Jepara memiliki kontur tanah yang beragam, termasuk wilayah perairan atau kepulauan yang terletak cukup jauh dari ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat, masalah kesehatan sudah tentu menjadi masalah yang cukup serius bagi Kabupaten Jepara. Memiliki 1 rumah sakit negeri dan beberapa rumah sakit swasta dan klinik kesehatan dengan tenaga medis yang tersedia, diharapkan mampu mendorong terciptanya kesehatan yang baik bagi masyarakat. Untuk Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Dengan dukungan anggaran serta pegawai, baik PNS maupun THL yang bertugas di berbagai tempat seperti di Puskesmas-puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Jepara, diharapkan mampu melayani kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat Jepara.

Untuk urusan kesehatan capaian kinerjanya diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Kunci Keluaran, yaitu :

1. Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar.
Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Jepara memiliki 6 rumah sakit rujukan.
2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya.
Akreditasi rumah sakit diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu sebuah rumah sakit dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan. Bagi rumah sakit sendiri, akreditasi bisa menjadi cara untuk mengukur kinerja rumah sakit. Di Kabupaten Jepara, sampai dengan tahun 2021 ada 6 unit rumah sakit yang sedang dipersiapkan akreditasinya.
3. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia.
Dukungan logistic kesehatan yang tersedia bagi ibu hamil sebanyak 22 Puskesmas, 24.100 buku KIA, ANC kit, Tablet Fe, Imunisasi TT, Ini diharapkan mampu untuk mendukung kesehatan ibu hamil.
4. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal

Sampai dengan tahun 2021, ada 324 dokter dan 723 bidan yang menangani pelayanan antenatal.

5. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia. Kabupaten Jepara pada tahun 2021 menyiapkan dukungan logistik yang disediakan untuk pelayanan persalinan adalah sebagai berikut : 14 Puskesmas PONEB, Bidan Kit, 24.100 buku KIA, Tablet Vitamin A ibu bersalin

6. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat).

Untuk jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sebanyak Bidan PONEB: 259 orang; Dokter PONEB: 72 orang, Bidan Praktek Mandiri 292 orang, Bidan Di RS: 161 orang.

7. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan bayi baru lahir.

Dukungan logistik yang disediakan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir tersedia KN kit dan buku KIA sebanyak 24.100, Form MTBM

8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar.

Sedangkan untuk SDM yang ada sebanyak 732 bidan.

9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk kesehatan balita.

Untuk kepentingan kesehatan balita, Pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan dukungan logistik berupa SDIDTK kit, 1.133 Posyandu, Pemberian Vitamin A balita

10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

SDM yang tersedia untuk pelayanan kesehatan balita sebanyak 324 dokter, 216 Bidan di Desa, 71 Tenaga Gizi, 5752 kader posyandu.

11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk anak usia pendidikan dasar.

Untuk tahun 2021 sebanyak 11 SHK (school health kit).

12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar.
SDM yang menangani kesehatan anak usia dasar yaitu 788 Guru UKS SD/MI; 192 Guru UKS SMP/MTs, 123 guru UKS, SMA, SMK, MA
13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia bagi usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Logistik yang disediakan untuk kategori ini yaitu : 174 Posbindu Kit.
14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Untuk mendukung kesehatan penduduk usia 15-59 tahun, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki 22 programer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu.
15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia untuk pelayanan usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Pemerintah Kabupaten Jepara telah memiliki 313 Posyandu lansia, 74 Lansia Kit, 22 Puskesmas Santun Lansia untuk pelayanan usia 60 tahu keatas.
16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan usia 60 tahun keatas sesuai standar.
Tersedia Dokter sebanyak 22 orang dokter puskesmas, Bidan sebanyak 22 orang serta Perawat sejumlah 22 orang.
17. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita hipertensi yang tersedia sesuai standar.
Ada 174 Posbindu yang disediakan bagi penderita hipertensi pada tahun 2021
18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar.
Ada 22 programer PTM Puskesmas dan 990 kader Posbindu.

19. Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita DM yang tersedia.
Ada 174 Posbindu yang melayani penderita Diabetes Melitus (DM).
20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar
Ada 22 programer PTM Puskesmas dan 990 kader Posbindu.
21. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita ODGJ berat yang tersedia tahun 2021 sebanyak 16 pedoman kesehatan jiwa
22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita ODGJ berat sesuai standar.
Sedangkan SDM yang bertugas melayani penderita ODGJ berat yaitu sebanyak 2 perawat terlatih, 1 dokter terlatih.
23. Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk penderita TBC yang tersedia sesuai standar pada tahun 2021
Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para penderita penyakit TBC, telah disediakan logistic kesehatan berupa : OAT FDC kategori Kat 313 paket, kombipipak 10 paket, FDC anak 48 paket, FDC Kat II 6 paket, pot sputum 13.200 buah, kaca slide 775 buah, reagen Zn 720 paket, catridge TCM TBC 4.640
24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar.
Untuk mendukung logistic kesehatan yang sudah disediakan, ada 23 petugas TB terlatih, 15 perawat TB terlatih, 21 petugas laborat terlatih.
25. Jumlah dukungan logistik kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.
Pada tahun 2021 disediakan 18.500 rapid HIV dan 18.500 Rapid sipilis.

26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Terdapat 10 dokter, 10 perawat, 10 analis, 10 farmasi, 10 rekam medis, 6 PPIA, 3 Dokter PDP, dan 3 Dokter PPIA , yang bertugas di Puskesmas dan Rumah Sakit RA. Kartini.

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Jepara berada dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terkait perijinan.

Capaian kinerja urusan ini diukur melalui Indikator Kinerja Kunci Output sebagai berikut :

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab (ha).

Di Kabupaten Jepara memiliki 97 kewenangan atas kawasan permukiman rawan banjir.

2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab (m).

Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di Wilayah Sungai kewenangan Kabupaten Jepara sepanjang 13.050 meter.

3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab (ha).

Di Kabupaten Jepara memiliki 700 Ha luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten.

4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di Wilayah Sungai kewenangan kab (m).

Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi ada 20.400 M yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kewenangan kab. Di tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara No. 520/421 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Jepara.
6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten. Di tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memiliki Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten Wilayah Sungai Kewenangan kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara No. 520/421 Tahun 2020 tentang Rencana Pola Tanam dan Tata Tanam Kabupaten Jepara.
7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten. Kabupaten Jepara telah memiliki prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten yaitu berupa Penguat tebing sepanjang 27 DAS
8. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik. Dari total panjang jaringan irigasi primer yaitu 10.596 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 4.238 meter atau 40%.
9. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik. Dari total panjang jaringan irigasi sekunder yaitu 1.249.933 meter, yang dalam kondisi baik sepanjang 302.378,22 meter atau 24,19%.
10. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik. Pada tahun 2021, dari seluruh jaringan irigasi tersier yaitu sepanjang 13.810 meter, yang dalam kondisi baik sebesar 4.143 meter atau 30%.

11. Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara sudah memiliki dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten, Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Rencana induk sistem penyediaan air minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040.
12. Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara telah menetapkan Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten.
13. Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaran SPAM
Di Kabupaten Jepara ada 1 (satu) buah BUMD yang menyelenggarakan SPAM yaitu PDAM.
14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM.
Izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM yaitu sebanyak 8 izin.
15. Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara tidak melakukan kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.
16. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.
Di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 terdapat 298.156 rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S.
17. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.
Sampai dengan tahun 2021, ada 300 unit rumah yang menggunakan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T.

18. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.

Sedangkan rumah yang menggunakan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T sebanyak 298.456 unit rumah.

19. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja.

Di Kabupaten Jepara pada tahun 2021, rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja sebanyak 528 rumah.

20. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.

Di Kabupaten Jepara, sebanyak 528 rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja.

21. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik kabupaten jepara tahun 2021 sebanyak 528.

22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar.

Dari 402.129 rumah di wilayah pengembang SPALD S yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk sebanyak 298.156. rumah dengan capaian 74%.

23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman.

Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T sebanyak 2.851 rumah dari total 402.129 rumah di wilayah pengembangan SPALD T.

24. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman.

Dari total rumah di wilayah pengembangan SPALD T yaitu 402.129 rumah, sebanyak 298.156 rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T

25. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat
Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat sebanyak 298.156 rumah, dari 402.129 rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S.
26. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia sebanyak 206 sedangkan yang dibutuhkan 402.129 dengan capaian 1%
27. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja
Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia pada tahun 2021 sebesar 78%
28. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD.
Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD sebanyak 2.650 rumah dari total 2.650 rumah yang dilayani dengan SPALD-T di Kabupaten Jepara dengan capaian 100%
29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja.
Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot pada tahun 2021 dalam wilayah pengembangan SPADLD-S sebesar 1,52%.
30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi.
Dari 3 bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang ada di Jepara 100% laik fungsi.
31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting.
Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan sebanyak 180 izin.
32. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung.
Tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memiliki Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung yaitu Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011

33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memiliki Keputusan Bupati tentang penetapan tim ahli bangunan gedung
34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan.
Kabupaten Jepara memiliki 36 bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan.
35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten.
Jepara memiliki 163 bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk kepentingan strategis daerah kabupaten.
36. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten.
Ada 163 bangunan gedung negara milik Pemerintah Kabupaten Jepara.
37. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat.
Sampai dengan tahun 2021, di Kabupaten Jepara ada 163 bangunan yang dipelihara.
38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten.
Jalan kewenangan kabupaten yang ditetapkan kepala daerah dalam SK adalah sepanjang 872.142 kilometer.
39. Panjang jalan yang dibangun
Pada tahun 2021, panjang jalan yang dibangun adalah 14.842,49 kilometer.
40. Panjang jembatan yg dibangun
Tahun 2021, karena alasan adanya pandemic covid-19, maka pembangunan jembatan hanya sepanjang 15,40 meter.
41. Panjang jalan yang ditingkatkan.
Ada 25.449,53 kilometer jalan yang ditingkatkan sepanjang tahun 2021.

42. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan.
Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan adalah 10 meter.
43. Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi.
Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi 11.692,55 kilometer.
44. Panjang jembatan yang direhabilitasi.
Jembatan yang direhabilitasi pada tahun 2021 sepanjang 123,5 meter
45. Panjang jalan yang dipelihara.
Sedangkan jalan yang dilakukan pemeliharaannya sepanjang 50.667,00 kilometer.
46. Panjang jembatan yang dipelihara.
Panjang jembatan yang dipelihara sepanjang 9 meter
47. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten.
Tahun 2021, tidak ada Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten Jepara.
48. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten.
Ada pada tahun 2021 ada 55 tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten Jepara.
49. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten.
Ada 6 orang tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten Jepara.
50. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.
Tidak ada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kabupaten yang aktif dengan data termutakhir.
51. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD
Ada data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari APBD yaitu Potensi Pasar Jasa Konstruksi/RUP 2021

52. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN.
Ada data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN yaitu Potensi Pasar Jasa Konstruksi/RUP 2021
53. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya.
tersedia data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten yang bersumber dari pendanaan lainnya.
54. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.
Tidak tersedia data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala.
55. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten.
Kabupaten Jepara memiliki data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten yaitu Keputusan Bupati Jepara Nomor 142 Tahun 2011.
56. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.
Tidak tersedia data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh

menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.

57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.

Di Kabupaten Jepara tidak tersedia data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis.

58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota.

Di Kabupaten Jepara tidak tersedia data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota.

59. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

Tahun 2021 di Kabupaten Jepara tidak tersedia data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.

60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

Tidak tersedia data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

61. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya. Tidak tersedia data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.
Untuk data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya di Kabupaten Jepara tersedia.
63. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.
Untuk data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tidak tersedia.
64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten.
Badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 570
65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2021 tidak ada perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten Jepara.
66. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2021 ada 570 badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten Jepara.
67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2021 tidak ada badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten Jepara.
68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui.

Pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui tidak ada

69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tahun 2021 tidak ada pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.

71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

Tidak ada pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**

1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya.

Pada tahun 2021, ada 36 kawasan rawan bencana dan direncanakan penanganannya.

2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam.

Rumah yang terkena bencana alam sebanyak 36 unit rumah.

3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.

Ada 36 orang yang rumahnya terkena bencana alam pada tahun 2021

4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi.

Dari 36 rumah yang terkena bencana alam, seluruhnya sudah direhabilitasi sesuai rencana aksi.

5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi.

Dari 36 rumah yang terkena bencana alam, seluruhnya sudah dibangun kembali sesuai rencana aksi.

6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi.

Pada tahun 2021 sebanyak 36.

7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.

Terkait dengan bencana alam yang terjadi, di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jepara tidak menyiapkan rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana.

8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi.

Seluruh korban bencana alam yaitu sebanyak 36 orang telah terfasilitasi.

9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.

Pada tahun 2021, luasan dan lokasi pencadangan lahan adalah 0,9%

10. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM.

Di tahun 2021, rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak 75

11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Rumah tangga yang menerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada
12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Rumah tangga yang menerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM tidak ada
13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Sedangkan rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak 52 RT.
14. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM.
Pada tahun 2021, rumah tangga penerima layanan mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM sebanyak 23 RT
15. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah
Pengadaan tanah pada tahun 2021 adalah 0,9 hektar.
16. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha.
Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 tidak ada.
17. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH
Peningkatan RTLH sebanyak 12.172 unit.
18. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh.
Penanganan infrastruktur kawasan kumuh seluas 49,27 hektar.
19. Jumlah rumah di kabupaten.

- Jumlah rumah di Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2021 adalah 305.628 rumah.
20. Jumlah unit PK RTLH.
- Sedangkan Rumah Tidak Layak Huni, adalah 9.680 unit rumah.
21. Jumlah rumah tidak layak huni.
- Pada tahun 2021, di Kabupaten Jepara masih terdapat 51.513 unit rumah yang tidak layak huni.
22. Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun).
- Rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun) sepanjang tahun 2021 tidak ada.
23. Rasio rumah dan KK
- Jumlah KK yang ada yaitu 406.037, sedangkan total rumah yang ada di Jepara yaitu 305.628 unit atau 133%.
24. Jumlah rumah pembangunan baru.
- Tidak ada rumah pembangunan baru sepanjang tahun 2021.
25. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU
- Pada tahun 2021 perumahan yang terfasilitasi PSU sebanyak 12 perumahan.
26. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum.
- Sampai tahun 2021, di Kabupaten Jepara ada 1.178 rumah yang sudah terfasilitasi air minum.
27. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan.
- Sebanyak 1.178
28. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site).
- Rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) sebanyak 1.178 rumah.
29. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH
- Perumahan yang terfasilitasi RTNH pada tahun 2021 sejumlah 1.178 unit
30. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU.
- Rumah yang terfasilitasi akses PJU tidak ada
31. Jumlah pengembang yang tersertifikasi.

Pengembang yang tersertifikasi pada tahun 2021 sebanyak 12

32. Jumlah pengembang yang teregistrasi

Pengembang yang teregistrasi sebanyak 12 pada tahun 2021

33. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.

Pada tahun 2021, jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan sebanyak 12

❖ **Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan branded Kota Ukir, Kabupaten Jepara menjadi daerah yang sangat terbuka bagi banyak investor dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, dengan kontur tanah yang beragam, Kabupaten Jepara memiliki potensi resiko bencana yang cukup tinggi, terutama longsor dan banjir. Untuk urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan yang ditangani.

Sepanjang tahun 2021, pelanggaran dan pengaduan trantibum yang ditangani oleh Satpol PP dan Damkar sebanyak 35 kali

2. Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan

Untuk mendukung kinerja Pemkab dalam urusan ini, sebanyak 1.970 orang Satlinmas yang telah dilantik dan dikukuhkan.

3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memiliki 8 Perda yang telah ditegakkan.

4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS
Di Kabupaten Jepara ada 1 orang Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas PPNS.
5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum
Untuk membantu pelaksanaan dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, Satpol PP dan Damkar didukung dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP).
6. Tersedianya sarana prasarana minimal
Dalam melaksanakan tugas penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, Satpol PP dan Damkar didukung dengan sarana prasarana minimal.
7. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal
Kabupaten Jepara sampai dengan tahun 2021 belum melaksanakan Kajian Resiko Bencana (KRB)
8. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana
IKK ini diukur melalui jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana yaitu sebanyak 1.250.608 jiwa dibandingkan dengan seluruh jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yaitu 1.250.608 jiwa sehingga capaian kinerjanya adalah 100% karena di Kabupaten Jepara informasi kebencanaan dilakukan melalui berbagai cara. Selain melalui sosialisasi tatap muka, informasi juga disampaikan melalui radio Kartini (milik Pemkab) juga melalui media sosial yang dikelola oleh Pemkab Jepara
9. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan
Dari 13.375 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, sebanyak 125 orang yang telah mengikuti pelatihan.

10. Persentase warga negara yang ikut pelatihan

Dari 13.375 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, sebanyak 125 orang yang telah mengikuti pelatihan.

11. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

Dari 1.250.608 jiwa warga negara yang berada di kawasan rawan bencana seluruhnya mendapat layanan pusdalops, jadi capaian kinerjanya mencapai 100%.

12. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan.

Dari 1.250.608 penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana seluruhnya sudah mendapatkan peralatan perlindungan, Jadi capaian kinerja IKK ini adalah 100%.

13. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB.

Pada tahun 2021, tidak ada penetapan status KLB.

14. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.

Dari total 2 seluruh penetapan kejadian Luar biasa yang ada di Jepara, semuanya telah memenuhi kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana. Capaian kinerjanya adalah 100%

15. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana

Pada BPBD kab Jepara terdapat 869 orang petugas dalam penanganan darurat yang terdiri dari PNS BPBD, Tenaga Harian Lepas dan relawan. Semuanya aktif dalam setiap penanganan darurat bencana yang terjadi.

16. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.

Sepanjang tahun 2021 terdapat 1.020 orang korban dalam kejadian bencana yang seluruhnya berhasil di cari, ditolong dan di evakuasi.

17. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten.

layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia atau operasi darurat non kebakaran yang ditangani Satpol PP dan Damkar pada tahun 2021 sebanyak 322 layanan.

18. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan.

Guna mendukung upaya penyelamatan kebakaran, kabupaten Jepara memiliki 2 Pos sektor Damkar dengan sarana dan prasarana lengkap.

19. Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan.

Untuk menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara di bidang penyelamatan kebakaran, ada 26 aparatur yang selama 24 jam berjaga secara bergantian.

20. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa.

Sedangkan untuk Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa, di Kabupaten Jepara belum memiliki.

21. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

Kabupaten Jepara memiliki 9 jenis sarana dan prasana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi.

22. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran, Kabupaten Jepara memiliki 28 aparatur yang memenuhi standar kualifikasi pemadam.
23. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran. Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Jepara belum memiliki relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
24. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran. Sepanjang tahun 2021, Kabupaten Jepara melalui Satpol PP dan Damkar tidak menyelenggarakan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran.

❖ **Sosial**

Kehidupan sosial masyarakat selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan jaman. Dalam proses perubahan ini seringkali muncul berbagai masalah sosial yang bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan dan kriminal serta permasalahan-permasalahan lain kerap kali menjadi masalah berat bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Jepara. Kondisi-kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik tentu akan menjadi polemik dan permasalahan serius bagi pemerintah.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terus berupaya dalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Keberhasilan urusan sosial diukur dengan indikator kinerja kunci (output) sebagai berikut :

1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki

Untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Jepara menyiapkan 2 (dua) jenis layanan pengaduan yaitu secara online dan offline yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM

Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM yang terdata sebanyak 1.413 anak.

3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk

Untuk tahun 2021, Tim Reaksi Cepat belum terbentuk.

4. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau.

Sebanyak 189 orang penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng dapat dijangkau oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2021.

5. Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.

Untuk fasilitas kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai akses khusus layanan kedaruratan hanya memiliki 2 (satu) unit. Kedepannya diharapkan fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkat.

6. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi.

Pada tahun 2021, sebanyak 123 Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng mendapatkan paket permakanan sesuai standar gizi yang diberikan oleh Pemkab Jepara.

7. Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.

Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Jepara memiliki 1 (satu) buah shelter atau rumah singgah yang dapat dipergunakan sebagai tempat tinggal sementara.

8. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang.
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang sebanyak 123 orang.
9. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu.
Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu sebanyak 121 orang.
10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter
Alat bantu yang disediakan di rumah singgah/shelter pada tahun 2021 sebanyak 9 paket
11. Jumlah paket perbekalan yang tersedia.
Untuk paket perbekalan, pada tahun 2021 belum tersedia.
12. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.
Sepanjang tahun 2021 belum ada Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.
13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.
Untuk tenaga kesehatan yang dipersiapkan di rumah singgah/shelter, belum tersedia.
14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan.
Pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan sebanyak 41 orang.
15. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/pusat kesejahteraan sosial.

Sebanyak 118 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/pusat kesejahteraan sosial selama tahun 2021.

16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat.

Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat sepanjang tahun 2021 sebanyak 6 paket.

17. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.

Bagi warga masyarakat, kepemilikan dokumen kependudukan sangat penting untuk bermacam-macam kepentingan. Karena itulah Pemkab Jepara melalui Dinsospermasdes memberikan fasilitas bagi Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Sepanjang tahun 2021, kabupaten jepara tidak ada penyandang distabilitas terlantar lanjut usia terlantar gepeng.

18. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.

Setiap warga Negara memiliki hak untuk memperoleh akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Pada tahun 2021, tidak ada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses dasar tersebut.

19. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

Sebanyak 15 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga pada tahun 2021.

20. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga.

Sepanjang tahun 2021, 15 orang Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng berhasil direunifikasikan dengan keluarganya.

21. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk.

Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk ada 5 orang.

22. Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan.

Pada tahun 2021 ada 318 orang yang mendapatkan makanan.

23. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang.

Untuk korban bencana belum ada ada paket sandang.

24. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki.

Kabupaten Jepara tidak memiliki penampungan pengungsi.

25. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan.

Untuk kelompok rentan, belum ada paket permakanan khusus.

26. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial.

Untuk pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana blm ada.

27. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial sebanyak 33 orang.

❖ **Tenaga Kerja.**

Pada saat pertambahan penduduk semakin meningkat maka persoalan penyerapan tenaga kerja menjadi masalah yang cukup pelik bagi Negara. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat serta penyerapan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kompetensi maupun jenjang pendidikan tentu menjadi kendala tersendiri. Di Kabupaten Jepara urusan tenaga kerja ditangani oleh Dinas Koperas, UKM dan Tenaga Kerja. Diskop UKM Nakertrans

terus berupaya mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Tingkat keberhasilan urusan tenaga kerja diukur melalui indikator kinerja output sebagai berikut :

1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Jepara tidak memiliki perencanaan tenaga kerja pada tahun 2021
2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.
Untuk akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja, pada tahun 2021 sebesar 0%
3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja.
Tahun 2021, sebanyak 75 perusahaan
4. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster.
Pada tahun 2021 penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi sebanyak 3. Sedangkan keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2021 sebanyak 8, sehingga capaiannya sebesar 37,5%.
5. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.
Dari 5 orang instruktur yang ada di Kabupaten Jepara ada 4 yang telah bersertifikat kompetensi atau 80%.
6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.
Dari 128 peserta pelatihan, instruktur yang tersedia sebanyak 5 orang atau 3,91%.
7. Persentase LPK yang terakreditasi.
Dari 42 LPK yang ada di Jepara, baru ada 2 LPK yang terakreditasi pada tahun 2021 atau 4,76%.
8. Persentase LPK yang memiliki perizinan.
Dari 42 LPK yang ada di Jepara, baru ada 7 LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2021 atau 16,67%.
9. Jumlah penganggur yang dilatih.
Jumlah penganggur yang dilatih pada tahun 2021 sebanyak 488 orang.
10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan.

Dari 126 orang lulusan bersertifikat pelatih, sebanyak 128 lulusannya bersertifikat pelatihan.

11. Persentase penyerapan lulusan.

Dari 128 orang yang lulus pada tahun 2021, yang sudah bekerja sebanyak 66 orang atau 52%.

12. Lulusan bersertifikat kompetensi.

Tahun 2021 sebanyak 3.6 %

13. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan.

Dari 57 calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang terdaftar 100% mendapatkan pelatihan.

14. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI).

Pada tahun 2021 terdapat 57 orang Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI).

15. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas.

Dari 976 perusahaan yang ada di Jepara, baru 14 perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas atau 1,43 %.

16. Data tingkat produktivitas total.

Tingkat produktivitas total di tahun 2021 adalah 4,63%

17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP).

Di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 terdapat 260 perusahaan yang memiliki tenaga kerja lebih dari 10 orang. Dari jumlah tersebut, baru 62 perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan.

18. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB.

Dari 18 perusahaan yang memiliki Serikat pekerja/Serikat Buruh, ada 16,67% perusahaan yang telah memiliki PKB atau sebanyak 3 perusahaan

19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan.
Pada tahun 2021 ada 56 perusahaan.
20. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.
Dari 260 perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB), 25% atau 65 perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah.
21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dari 1.764 perusahaan wajib lapor, hanya 976 sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
22. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih.
Sepanjang tahun 2021, dari 260 perusahaan yang ada di Kabupaten Jepara, terdapat 29 perusahaan yang berselisih atau sekitar 11.15%.
23. Jumlah mogok kerja.
Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pemogokan kerja.
24. Jumlah penutupan perusahaan.
Penutupan perusahaan tidak ada pada tahun 2021
25. Jumlah perselisihan kepentingan.
Sedangkan untuk perselisihan kepentingan terdapat 5 perselisihan di tahun 2021
26. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan.
Sementara itu untuk perselisihan antar SP/SB tidak ada.
27. Jumlah perselisihan PHK.
Terkait dengan perselisihan PHK, sepanjang tahun 2021 terdapat 41 perselisihan.
28. Jumlah Pekerja yang ter-PHK.
Pekerja yang terkena PHK sebanyak 79 orang.

29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite.
Perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite ada 10 perselisihan.
30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan.
Kabupaten Jepara tidak ada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan.
31. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
Dari 46 kasus perselisihan yang terjadi, terdapat 7 perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial.
32. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten.
Pada tahun 2021, terdapat 6.632 lowongan kerja yang tersedia.
33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kabupaten.
Sedangkan pencari kerja yang terdaftar sebanyak 18.473 orang.
34. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten.
Di tahun 2021 terdapat 43 Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kabupaten Jepara.
35. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam kabupaten.
Tidak ada Tenaga Kerja Khusus terdaftar di Kabupaten Jepara di tahun 2021
36. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
Terdapat 1 orang pejabat Fungsional Pengantar Kerja di Kabupaten Jepara.
37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kabupaten.
Pada tahun 2021 tidak terdapat Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal di Kabupaten Jepara.
38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten.

Sepanjang tahun 2021, ada 4.503 perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Jepara.

39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER).

Di tahun 2021, tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) sebanyak 6.566 orang.

40. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.

Terdapat 40 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi di tahun 2021.

41. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.

Terdapat 57 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.

42. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangan.

Pada tahun 2021 tidak ada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapat fasilitasi kepulangannya.

43. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.

Dari 57 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terdapat di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2021, semuanya mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.

44. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya.

Dari 20 Orang Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya, seluruhnya diberdayakan atau 100% capaian kinerjanya.

45. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk.
- Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi point penting dalam pembangunan. Perempuan mempunyai peran yang sangat strategis dalam segala lini kehidupan. Namun demikian, dalam perjalanannya, peran perempuan masih kerap dianggap kurang penting. Untuk menghilangkan marginalisasi terhadap peran perempuan dibutuhkan pemahaman-pemahaman yang lebih luas.

Di Kabupaten Jepara, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Di kepalai oleh seorang perempuan yaitu Ir. Inah Nuroniah, DP3AP2KB diharapkan mampu menjawab segala tantangan peran perempuan dalam pembangunan.

Tingkat keberhasilan urusan ini ditentukan dengan beberapa indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. Jumlah lembaga pemerintahan kabupaten yang telah dilatih PUG.
Lembaga pemerintahan yang telah dilatih PUG sebanyak 33 lembaga.
2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten.
Program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten sebanyak 43 program/53 kegiatan.
3. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan DP3AP2KB untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak.

Media Massa memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan. Karena itulah Pemerintah Kabupaten Jepara bekerjasama dengan 6 media massa yang ada di Jepara, baik media cetak maupun elektronik.

4. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.

Pada tahun 2021, kabupaten Jepara telah memiliki 12 lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal.

5. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani.

Dari 34 korban kekerasan anak di Kabupaten Jepara, seluruhnya sudah dapat dilayani. Capaian kinerjanya mencapai 100%.

6. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan.

Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan sejumlah 40 lembaga

7. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD).

Sedangkan lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD) baru 2 lembaga.

8. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan.

Tahun 2021, tidak ada kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan.

9. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih.

Di tahun 2021, Kabupaten Jepara sudah melatih 100 orang kader perempuan.

10. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.

Tahun 2021, tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan.

11. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten.

Begitu pula, tidak ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten.

12. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi.

Kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi ada 1 kebijakan/program.

13. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi.

lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi, sejumlah 1.

14. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani.

Dari 20 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan, seluruhnya sudah mendapatkan layanan. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

❖ Pangan

Urusan pangan ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Capaian kinerja urusan pangan diukur melalui indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan.

Untuk infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, kabupaten Jepara memiliki 1 buah gudang yaitu Gudang Cadangan Pangan Kabupaten Jepara.

2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya.

Pada tahun 2021, kabupaten Jepara melaksanakan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local.

Untuk regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal, tidak tersedia.

4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Sepanjang tahun 2021, capaian target mencapai 100% kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan

Kabupaten Jepara memiliki peta ketahanan dan kerentanan pangan yaitu Buku Peta FSVA Tahun 2021

6. Tertanganinya kerawanan pangan.

Pada tahun 2021, di kabupaten Jepara memiliki mencapai 100%

7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.

Selama tahun 2021, Kabupaten Jepara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan cadangan pangan capaian target mencapai 100%

8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar

Kabupaten Jepara pada tahun 2021 telah melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yaitu melalui bintek Mutu Gizi.

❖ **Pertanahan**

Di Kabupaten Jepara, urusan pertanahan ada pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara untuk beberapa indikator dan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara terkait perijinannya. Capain Kinerja urusan pertanahan di ukur melalui bebrapa indikator kinerja kunci output sebagai berikut :

1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati

Pada tahun 2021, Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun sebanyak 18 buah. Sedangkan izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya sebanyak 18 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek.

Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek dengan SK Bupati tidak ada.

3. SK Bupati / Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah pada tahun 2021 tidak ada.

4. Dokumen Izin membuka tanah.

Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan izin membuka tanah.

5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten.

Kabupaten Jepara belum memiliki Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten.

❖ **Lingkungan Hidup**

Urusan Lingkungan Hidup ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan kabupaten terhadap Indeks kualitas Air, Udara dan Tutupan lahan.

Dari indikator ini kualitas lingkungan di Kabupaten Jepara adalah :

- Indeks kualitas Air (IKA) : 51,67
- Indeks Kuialitas Udara (IKU) : 77,73
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan : 44,45

2. Tersedianya data informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten.

Di Kabupaten Jepara informasi penanganan sampah terdiri dari

- Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah
 - Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbunan sampah
 - Tersedianya informasi terkait TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan.
3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten
- Sepanjang tahun 2021, izin lingkungan, PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten sebanyak 15 izin. semua usulan permohonan yang terregistrasi sudah semua .
4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab.
- Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten sebanyak 15 izin sedangkan PPLHD tidak ada.
5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kabupaten.
- Pada tahun 2021, di Kabupaten Jepara belum ada Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kabupaten.
6. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
- Sepanjang tahun 2021, tidak ada usulan MHA sehingga tidak ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.
7. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang ditangani.

Dari total pengaduan masyarakat yang terintegrasi sebanyak 11 aduan, dan yang sudah ditangani sebanyak 11, jadi realisasi sebesar 100%

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara. Capaian kinerja Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Penerbitan akta perkawinan

Dari 710 peristiwa perkawinan jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebanyak 701 dokumen, capaian kinerjanya sebesar 98,73%.

2. Penerbitan akta perceraian

Pada tahun 2021, peristiwa perceraian terjadi sebanyak 192, dan akta perceraian yang diterbitkan sebanyak 182 atau 94,79%.

3. Penerbitan akta kematian.

Sepanjang tahun 2021, peristiwa kematian yang terjadi di Kabupaten Jepara cukup banyak yaitu mencapai 12.921 dan semuanya telah diterbitkan akta kematian 100%.

4. Penyajian data kependudukan.

Data kependudukan skala kabupaten yang diterbitkan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali, sehingga capaiannya mencapai 100%.

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pembangunan desa menjadi salah satu hal penting dalam percepatan pembangunan, salah satunya adalah pengentasan desa tertinggal urusan ini berada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.

Pada tahun 2021, ada 8 desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.

2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021 tidak ada yang melakukan kerjasama antar desa.

3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.

Tahun 2021 terdapat 5 lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.

4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

Terdapat 184 desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Karena itulah penting bagi Negara untuk terus berupaya mengendalikan pertambahan penduduk. Melalui program-program Keluarga Berencana diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai. Indikator kinerja kunci urusan ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara tidak tersedia dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan.

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.

Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun adalah 22,79

3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19).

Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 sebesar 6,27%

4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE).

Dari 1.493.147 sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE, masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE sebanyak 482.141 orang atau 32,29 %

5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.

Di Kabupaten Jepara terdapat 18 stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK.

6. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP.

Dari 47 faskes yang ada, terdapat 39 Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP dengan capaian 83%.

7. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Dari 227.004 Pasangan Usia Subur yang ada di Jepara, 167.087 orang menjadi peserta KB aktif atau capaiannya sebesar 73,6%.

8. Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif.

Kelompok kerja KKBPK sebanyak 69 kelompok.

9. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan

Dari 19.425 orang yang menjadi sasaran peserta KB pasca persalinan, 6.911 atau 35,5 % menjadi peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern.

10. Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah.

Dari total desa 195 dengan kepesertaan KB terendah yaitu 1 desa memiliki kepesertaan KB paling rendah yaitu kurang dari 0,51%.

11. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dari total keluarga PBI yaitu 10.432, sebanyak 7.640 atau 73,2% adalah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI.

❖ **Perhubungan**

Urusan perhubungan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. Indikator Kinerja Kunci Output dalam urusan ini adalah :

1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.

Dari 170 fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan, ada 125 buah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia. Capaian kinerjanya sebesar 73,53%.

2. Terlaksananya pelayanan uji berkala.

Dari total kendaraan wajib uji yaitu 12.385 buah, Sedangkan kendaraan yang sudah menjalani uji kendaraan sebanyak 7.604 kendaraan atau sebesar 61,40%.

3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.

Lintas penyeberangan di Kabupaten Jepara sebanyak 5 lintas yaitu Jepara – Karimunjawa, dan Karimunjawa – Desa Nyamuk.

Keduanya telah ditetapkan tarifnya.

4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.

Dari 43.420 perlengkapan jalan kabupaten yang dibutuhkan, sudah terdapat 30.750,24 pemasangan perlengkapan jalannya. Capaian kinerjanya adalah 70,82%.

❖ **Komunikasi dan Informatika.**

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara. Keberhasilan urusan komunikasi dan informatika diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Selama tahun 2021 tidak menyelenggarakan event perangkat daerah Dan pelayanan publik

2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar.

Dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Jepara semua sudah memiliki portal dan situs web yang sesuai standar atau capaiannya adalah 100%

3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dari 51 perangkat daerah yang ada di Jepara semua sudah mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan capaian 100%.

4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.

Pada tahun 2021, dari 312 layanan, terdapat 312 yang menggunakan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik atau 100%.

5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik.

Dari 312 Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semuanya telah menggunakan layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik atau 100%.

6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari 312 sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seluruhnya terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 100%

7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah.

Pada tahun 2021 ada 249 layanan public dan layanan administrasi, semua sudah terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah sebanyak 249, sehingga capaiannya adalah 100%.

8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah.

Dari 27 perangkat daerah yang ada di Jepara, hanya 18 yang sudah menggunakan layanan pusat data pemerintah 66,66%.

9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah.

Pada IKK ini, perangkat daerah yang ada di Jepara yaitu berjumlah 27 (tidak termasuk kecamatan), ada 18 perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 66,66%.

10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo).

Perangkat daerah yang ada di Jepara yaitu berjumlah 27 (tidak termasuk kecamatan), ada 27 perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo 100%

11. Persentase data yang dapat berbagi pakai.

Dari 18 data yang dimiliki, seluruhnya dapat berbagi pakai atau capainnya 100%.

12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city.

Pada tahun 2021, untuk mendukung program smart city, dari 27 perangkat daerah baru 24 perangkat daerah yang ada di Jepara yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city 88,89%.

13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara tidak ada ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo.

14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government.

Kabupaten Jepara sudah memiliki Peraturan Bupati yang terkait implementasi e-government yaitu Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City.

15. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten.

Untuk menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten, Pemerintah Kabupaten Jepara telah bermitra dengan komunitas yang ada di masyarakat. Dari 138 komunitas yang ada di masyarakat hanya 123 yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 89,13%.

16. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM).

Pada tahun 2021, 52.543 konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan Pemkab, dan sebanyak 52.5441 adalah Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) 99,81%

17. Pada tahun 2021 Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan.

Dari 162 diseminasi dan layanan Informasi Publik, semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP dengan capaian 100%.

❖ **Koperasi dan UKM**

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Nakertrans.

Keberhasilan capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Sampai dengan tahun 2021, di Kabupaten Jepara terdapat 284 koperasi simpan pinjam yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam. Sedangkan penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan sebanyak 16 atau capaiannya sebesar 5,63%.

2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Pada tahun 2021, ada 2 permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam dan seluruhnya diterbitkan.

3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Dari 670 total koperasi yang ada, sebanyak 231 koperasi yang sudah diperiksa dan diawasi.

4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada sebanyak 284, dan ada 163 usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya atau 57,39%.

5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten.

Dari jumlah koperasi yang ada yaitu 670, yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 191 koperasi atau 28,51%.

6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab

Dari 92.157 orang anggota koperasi yang ada di Jepara, ada 254 orang yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab.

Dari total koperasi yang berjumlah 670, di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 baru ada 5 koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan.
9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab.

Dari 670 koperasi yang ada di Jepara, ada 119 Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya atau capainnya 17,76%.

10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab.

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jepara jumlah koperasi yang ada 670 dan yang diberikan dukungan fasilitasi sebanyak 7

11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab. Tahun 2021 kab jepara jumlah koperasi sebanyak 670 dan yang mendapatkan dukungan fasilitasi pemasaran sebanyak 3 capaianys 0,45% tidak memberikan dukungan fasilitasi pemasaran.

12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab.

Untuk dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi, ada 2 koperasi yang sudah di fasilitasi dari total koperasi 670. Capaiannya 0.30%

13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ke dalam 3 (tiga) jumlah koperasi yang ada sebanyak 670 dan yang mendapatkan dukungan fasilitasi kemitraan sebanyak 3 capaian sebesar 0,45%
14. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro.
Pada tahun 2021, jumlah wirausaha yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 76.740 serta 3.069 adalah pertumbuhan wirausaha baru. Capaian pertumbuhannya sebesar 4.00%.
15. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS).
Tahun 2021, Kabupaten Jepara tidak memiliki data berbasis online.
16. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra.
Jumlah usaha mikro di tahun 2021 sebanyak 76.740, dan yang bermitra sebanyak 168, atau 0,22%.
17. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha.
Di Kabupaten Jepara, usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk sebanyak 76.591, sedangkan usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi sebanyak 149.
18. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran.
Usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran di tahun 2021 sebanyak 76.540, sedangkan yang sudah terfasilitasi sebanyak 200.
19. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan.
Dari 76.740 usaha mikro yang ada. Sebanyak 2.320 usaha yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan.
20. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha.

Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memberikan pendampingan kelembagaan dan usaha kepada 484 usaha mikro, dari 76.740 usaha mikro yang ada.

❖ **Penanaman Modal**

Untuk mewujudkan kemajuan dan mendukung pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, salah satunya adalah dengan investasi atau penanaman modal. Untuk menarik para investor agar mau berinvestasi ke daerah dibutuhkan iklim usaha yang sehat, mudah serta kejelasan prosedur.

Di Kabupaten Jepara, urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dengan dukungan para PNS dengan berbagai kualifikasi pendidikan, DPMPTSP dapat mewujudkan kinerja yang cukup baik.

Keberhasilan kinerja urusan penanaman modal diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Perda mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Pada tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara telah memiliki Perda mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.

2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

DPMPTSP sudah memiliki 4 buah SOP pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yaitu SOP fasilitasi di Bidang Penanaman Modal. SOP Fasilitasi Kemudahan Perizinan di Kabupaten Jepara, dan SOP FGD Perkembangan Investasi PMA PMDN di Kabupaten Jepara.

3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara terdapat 6 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal, dengan capaian 3 laporan yaitu laporan FGD Perkembangan Investasi PMA PMDN, Laporan Fasilitasi Perizinan Penanaman Modal dan Laporan Webinar Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF).

4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting.

Kabupaten Jepara, melalui DPMPTSP telah mengikuti kegiatan webinar bisnis, forum one on meeting Central Java Investment Bussines Forum (CJIBF) pada tanggal 11-12 November 2021 oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2 kali.

5. Kegiatan pameran penanaman modal.

Sehubungan dengan adanya pandemic Covid-19, Kab. Jepara tidak melaksanakan pameran penanaman modal. Kegiatan pameran yang sudah direncanakan akhirnya dialihkan untuk pembuatan baliho Mall Pelayanan Publik yang berada di depan Kantor OPD Bersama serta pembuatan proposal Proyek Keris Jateng dengan capaian 0%

6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal.

Kabupaten Jepara telah menyelesaikan target bidang Penanaman Modal yaitu kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha, sosialisasi pelayanan perizinan, pemeliharaan aplikasi system penanaman modal dan promosi investasi 3 kali

7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Sepanjang tahun 2021, Kabupaten Jepara melalui DPMPTSP telah melaksanakan konsultasi perizinan dan non perizinan sebanyak 1

8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

Pada tahun 2021 ada 8.658 Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal.

9. Laporan realisasi penanaman modal.

Mengingat sudah menurunnya kasus covid -19 memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap investasi yang ada di Jepara. Pada tahun 2021 realisasi penanaman modal 7.304.118.903.839

10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, PNS yang telah mengikuti pelatihan Penanaman Modal sebanyak 14 orang

11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

Sepanjang tahun 2020, DPMPTSP telah melaksanakan pembinaan penanaman modal kepada 255 perusahaan yang ada di Jepara.

12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Pada tahun 2021 ada 1 (satu) instansi yang mengajukan layanan permintaan data.

❖ **Pemuda dan Olahraga**

Pemuda sebagai masa depan bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri akan membantu pemuda dalam melanjutkan estafet pembangunan. Urusan pemuda dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara. Disdikpora melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi pemuda. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu dengan mengadakan pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda. Kesuksesan capaian kinerja urusan pemuda dan olahraga diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.
Pada tahun 2021, di Kabupaten Jepara terdapat 92 orang pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan.
2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan kewirausahaan kepada 29 orang.
3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda.
Dari 277.167 penduduk yang berusia 16-30 tahun, ada 264 pemuda yang mendapat pelatihan.
4. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan.
Dari 277.167 penduduk yang berusia 16-30 tahun, ada 46 pengelola organisasi pada tahun 2021.
5. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan.
Dari 129 orang yang menjadi pelatih olahraga di Kabupaten Jepara, seluruhnya adalah pelatih yang memiliki kompetensi atau capaian kinerjanya adalah 100%.
6. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah.
Karena pada tahun 2021, Indonesia ikut terkena pandemic covid-19, maka event olahraga prestasi hanya sempat dilaksanakan sebanyak 10 kali.

❖ **Statistik**

Urusan statistik dilaksanakan oleh Diskominfo. Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Tersedianya buku profil daerah.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara melalui Diskominfo telah menerbitkan 3 buah buku profil daerah yaitu Jepara Dalam Angka, PDRB dan Statistik Sektorial Kabupaten Jepara

2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara telah melakukan 229 survei sektoral
3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan.
Di tahun 2021, kompilasi statistik sektoral yang dilakukan oleh Diskominfo sebanyak 17 kali.
4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.
Pada tahun 2021, Diskominfo tidak melaksanakan survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS.
5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS.
Sepanjang tahun 2021, Diskominfo tidak melaksanakan kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS.
6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistic.
Pada tahun 2021 jumlah kegiatan statistic sektoral sebanyak 17 dan yang memiliki metadata kegiatan statistik sektoral sebanyak 15 dengan capaian 88,24%.
7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistic.
Dari 22 metadata statistic sektoral baru 17 indikator statistik sektoral.

❖ **Persandian**

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara

1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan.
Pada tahun 2021, dari 10 kegiatan strategis yang dilaksanakan, ada 8 (lima) kegiatan strategis yang ada dan sudah diamankan.

2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah.

Dari 290 buah SE yang ada di Jepara, sebanyak 290 SE sudah menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian dengan capaian 100%

3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.

Dari 290 SE yang ada, semuanya telah diaudit dengan resiko kategori rendah dengan capaian 100%.

4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 dari 51 titik pada PHKS, semua titik sudah diamankan.

❖ **Kebudayaan**

Sebagai bangsa yang terdiri dari banyak suku dan ras, Indonesia memiliki ragam budaya dengan keunikan dan kekhasannya masing-masing. Setiap daerah memiliki potensi budaya dan cagar budaya yang berbeda-beda. Menjadi kewajiban setiap daerah untuk mengenali, menjaga dan melestarikan budaya yang ada di daerahnya masing-masing, karena cagar budaya adalah warisan leluhur dimana kita dapat belajar banyak dari hal tersebut. Dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan dan cagar budaya, khususnya kebudayaan local, akan membangun rasa nasionalisme sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga. Di Kabupaten Jepara, urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Capaian urusan kebudayaan diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi).
Di tahun 2021 di Kabupaten Jepara ada 40 obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi.
2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman).
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara ada 2 kali melaksanakan kegiatan obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.
3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat).
Obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2021 ada 40 Obyek.
4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara memiliki 16 orang SDM yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola.
5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan).
TAhun 2021, Kabupaten Jepara tidak melaksanakan register cagar budaya.
6. Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran).
Sampai dengan tahun 2021, Jepara memiliki 3 cagar budaya yang dilindungi.
7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kota dengan dukungan data.

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan Layanan perizinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kota dengan dukungan data.

8. Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi).

Sepanjang tahun 2021, Kabupaten Jepara tidak melaksanakan pengembangan cagar budaya.

9. Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata).

Kabupaten Jepara memiliki 1 buah cagar budaya yang dimanfaatkan untuk kepentingan dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum.

Museum Kartini yang dimiliki Kabupaten Jepara terletak di pusat kota yaitu di sebelah utara alun-alun I Jepara. Museum Kartini memiliki 512 koleksi yang bisa dinikmati oleh pengunjung.

11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum.

Dengan 224 koleksi yang dimiliki, Museum Kartini sepanjang tahun 2021 ada 1.152 pengunjung. Jumlah ini menurun drastis dibandingkan tahun 2020 karena adanya corona virus.

12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum ada 6

13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya.

Kabupaten Jepara telah membentuk 1 Tim pendaftaran cagar budaya.

14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten

Kabupaten Jepara telah membentuk 1 Tim ahli cagar budaya

15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya

Tahun 2021 Dinas Pariwisata dan kebudayaan tidak melaksanakan fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya.

16. Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman

SDM yang menangani Cagar budaya dan permuseuman sebanyak 10 orang.

17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman.

Sepanjang tahun 2021, Disparbud tidak melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman.

18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman.

Sarana dan prasarana untuk pendaftaran cagar budaya dan permuseuman ada 2 unit yang dimiliki.

19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat.

Pada tahun 2021, Disparbud telah mengadakan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak 6 event.

❖ **Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses belajar mengajar. Perpustakaan terorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Meskipun pada era digital seperti sekarang, segala macam informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah, namun peran buku dan perpustakaan masih belum bisa tergantikan. Di Kabupaten Jepara, urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara. Pada saat ini, perpustakaan Jepara bukanlah sekedar tempat membaca dan meminjam buku saja, namun perannya sudah semakin luas dalam memberikan berbagai fasilitasi kegiatan masyarakat. Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskarpus, diantaranya ada Akademi Menulis Jepara yaitu wadah

bagi masyarakat yang memiliki minat terhadap dunia tulis menulis, komunitas Bahasa Inggris dan berbagai kegiatan pelatihan ketrampilan lainnya.

Capaian kinerja urusan perpustakaan diukur melalui beberapa indikator kinerja kunci yaitu :

1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk
Dengan jumlah penduduk kabupaten Jepara sebanyak 1.213.170 jiwa, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara memiliki koleksi buku sebanyak 88.619 eksemplar.
2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat.
Sedangkan untuk jumlah pengunjung yang memanfaatkan keberadaan perpustakaan sepanjang tahun 2021 sebanyak 25.036 orang atau 2,1%.
3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk.
Untuk melayani masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan, Diskarpus memiliki 867 orang petugas untuk melayani 1.213.170 orang.
4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.
Kabupaten Jepara memiliki 18 buah perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan. Sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada sebanyak 426 perpustakaan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa.
5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.
Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya mendekatkan diri pada masyarakat dengan berbagai kegiatan. Pada tahun 2021 sebanyak 562 kali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara telah melakukan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat melalui kegiatan Perpustakaan keliling, Lomba dalam rangka minat baca dan lomba perpustakaan, sosialisasi gemar membaca.

6. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya.
Kabupaten Jepara tidak memiliki naskah kuno.
7. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa
Kabupaten Jepara tidak memiliki naskah kuno yang dialih aksara dan alih bahasakan.
8. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)
koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar sebanyak 239 eksemplar.

❖ **Kearsipan**

Arsip memiliki peran yang sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan. Selain berisi berbagai informasi, arsip juga berperan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah. Maka bisa dikatakan bahwa arsip memegang peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena itulah arsip akan memberikan manfaat yang optimal ketika dikelola dengan baik dan tertib. Namun sayangnya, masyarakat, organisasi/lembaga bahkan pemerintah masih banyak yang tidak sadar arsip sehingga banyak persoalan yang muncul karena pengelolaan arsip yang tidak baik.

Di Kabupaten Jepara, urusan kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja output urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.
Arsip yang ada di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 45.500 dan terdapat 12.000 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. Capain kinerjanya adalah 26%.
2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip.
Dari seluruh arsip inaktif yaitu 136.500, arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip sebanyak 49.500 atau 36%.

3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik.

Sedangkan jumlah arsip statis sudah 100% dibuatkan sarana bantu temu balik atau sebanyak 88.635.

4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN.

Dari 270.635 arsip dinamis yang ada, yang sudah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN sebanyak 100 atau 0,03695%.

5. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK

Tahun 2021 tidak ada Arsip yang dimusnahkan sesuai NSPK.

6. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK.

Sedangkan untuk perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK tidak ada.

7. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten.

Pada tahun 2021 ada 317 penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK.

8. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK.

Kabupaten Jepara telah melakukan Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK sebanyak 1.975.

9. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.

Pada tahun 2021 ada 4 arsip dalam status pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian.

10. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.

Kabupaten Jepara tidak mengeluarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.

URUSAN PILIHAN

❖ Kelautan dan Perikanan

Menjadi daerah yang memiliki wilayah perairan cukup luas, penduduk Kabupaten Jepara yang berprofesi sebagai nelayan cukup banyak. Dengan panjang pantai kurang lebih 72 kilometer memiliki potensi perikanan yang cukup luar biasa. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan. Dinas Perikanan telah melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Selain itu dengan 10 buah Tempat Pelelangan Ikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jepara, diharapkan bisa mendukung pemanfaatan potensi perikanan yang ada di Jepara. Keberhasilan urusan kelautan dan perikanan di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP).
Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) sebanyak 276 rumah tangga.
2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional
Sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Jepara telah memiliki 10 buah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memenuhi minimal standar operasional yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Jepara.
3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan.
Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menerbitkan 5 buah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan.

4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan).

Pada tahun 2021, Pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) sebanyak 177 orang/pembudidaya.

5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi.

Sepanjang tahun 2021, benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi baik melalui usaha rakyat maupun Balai Benih sebanyak 2.294.100.706 ekor.

❖ **Pariwisata**

Sektor pariwisata memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Demikian juga dengan Kabupaten Jepara. Jepara yang memiliki destinasi wisata yang lengkap, dari wisata alam (pantai dan gunung), wisata budaya dan wisata religi tentu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Jepara. Bahkan salah satu tempat wisata menjadi destinasi internasional, yaitu Karimunjawa. Eksotika Karimunjawa sudah diakui okeh dunia. Keindahan pantai serta keelokan bawah laut, mampu menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Karimunjawa.

Namun sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia, sektor pariwisata ini menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, akan tetapi dengan mulai melandainya kasus Covid-19 sektor pariwisata mulai ada peningkatan terutama Di Jepara, urusan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Bisa dikatakan sektor

pariwisata menjadi unggulan di Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan pariwisata diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi.

Pada tahun 2021, terdapat 24 entitas destinasi di Jepara.

2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

Untuk semakin menarik perhatian wisatawan, selain terus meningkatkan destinasi, Disparbud juga senantiasa memenuhi Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. Tahun 2021 ada 156 sarana prasarana yang dibangun.

3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten.

Sepanjang tahun 2021, tidak ada tanda daftar usaha pariwisata (TUDP) per sub jenis usaha

4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

Sebelum masa pandemi, ada 50 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepara.

5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.

Sepanjang tahun 2021, Disparbud telah melaksanakan 10 kali event dalam negeri.

6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten.

Untuk event luar negeri, pada tahun 2021 Kabupaten Jepara tidak mengikuti.

7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri.

Pada tahun 2021, ada 6 industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri.

8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.

Dari 1.195 tenaga kerja pariwisata, 58 orang sudah tersertifikasi. Capaian kinerjanya mencapai 4,8%

9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan.

Dari 510 orang yang menjadi sasaran pembekalan sector pariwisata semuanya sudah terlaksana sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%.

10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat.

Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat sebanyak 24 lokasi.

❖ **Pertanian**

Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 ha. Dari keseluruhan wilayah tersebut merupakan lahan sawah/wilayah tak terbangun yang meliputi tambak, lahan pertanian, kawasan perkebunan serta konservasi. Sedangkan yang termasuk bukan lahan/sawah kering/build up area terdiri dari pemukiman, perkantoran dan jasa, kawasan industri serta transportasi. Seiring dengan terjadinya pertambahan penduduk mengakibatkan pergeseran fungsi lahan. Selain itu, pergeseran struktur ekonomi dan kemajuan teknologi juga menjadi factor perubahan fungsi lahan. Di Kabupaten Jepara, urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Capaian kinerja urusan pertanian di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan 101 buah sarana dan prasarana pertanian.

2. Prasaran pertanian yang digunakan.

Pada tahun 2021, prasarana pertanian yang digunakan sebanyak 72 unit.

3. Penerbitan izin usaha pertanian.

Sepanjang tahun 2021, Pemkab Jepara telah memberikan fasilitasi penerbitan izin usah pertanian sebanyak 27 dokumen.

4. Persentase Prasarana pertanian yang digunakan.

Dari 101 prasarana pertanian yang ada, seluruhnya dipergunakan, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

5. Persentase jumlah izin usaha pertanian Kabupaten. Dari 28 usulan usaha pertanian yang memiliki telah memiliki izin sebanyak 27 dengan capaian 96,4%.
6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana
Dari 77,36 ha luas area yang terkena bencana, seluruhnya bisa ditanggulangi.

❖ **Kehutanan**

Urusan kehutanan sudah dilimpahkan ke Provinsi Jawa Tengah.

❖ **Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan ESDM.

❖ **Perdagangan**

1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Untuk izin Pusat Perbelanjaan di kabupaten Jepara tidak ada. Sedangkan untuk Toko swalayan sebanyak 8 izin.
2. Persentase penerbitan TDG.
Pada tahun 2021 dari 7 permohonan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang masuk, semuanya dapat diterbitkan kurang dari 5 hari, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%.
3. Persentase gudang yang tidak memiliki TDG
Penerbitan TDG sepanjang tahun 2021 sebanyak 7. Sedangkan gudang yang ada di Jepara sebanyak 42 gudang.
4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu.
Untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri dan penerima waralab lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan waralaba luar negeri, Kabupaten Jepara tidak ada.
5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten tidak melaksanakan pemeriksaan sedangkan sepanjang tahun 2021 tidak ada permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer.

6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu.

Pada tahun 2021, penerbitan SPKA sudah menjadi kewenangan pusat.

7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya adalah 50%.

8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu.

Dari 64 komoditi yang dimiliki Kabupaten Jepara, prosentase komoditinya adalah 31,11 atau 0,49%.

9. Di Kabupaten Jepara Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan pada tahun 2021 sebesar 0,0017%

10. Persentase alat-alat ukur timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dalam tahun berjalan pada tahun 2021 jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan sejumlah 3.137 dengan capaian 100%

11. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku. pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sejumlah tidak ada.

❖ **Perindustrian**

Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Capaian kinerja urusan perindustrian di ukur dari indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten.

Kabupaten Jepara tidak menerbitkan izin usaha kawasan industri (IUKI) Karena tidak ada kawasan industri.

2. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda.

Terkait dengan dokumen RPIK, sampai saat ini belum ditetapkan menjadi Perda. Sudah tersusun naskah dan draft ranperda atau capaiannya sebesar 50%.

3. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan.

Dari 1710 permohonan atau pengajuan izin yang masuk, seluruhnya telah diterbitkan izinnya atau capaiannya adalah 100%.

4. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan.

Untuk pengajuan izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil, pada tahun 2021 tidak ada izin yang diterbitkan

5. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten.

Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kabupaten jepara adalah 32, sedangkan jumlah perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kabupaten di SIINas sebanyak 193.

❖ **Transmigrasi**

Urusan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.

Capaian kinerja urusan ini di ukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya
2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya.

Akan tetapi dari ketiga indikator kinerja kunci diatas tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat, tahun 2021 tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Output

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	522 ---- x 100 970	53.81 %	Disdikpora
		2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	37.693 ---- x 100 37.693	100 %	Disdikpora
		3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa)	0 ---x 100 37.693	0 %	Disdikpora
		4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1.940	1.940	Disdikpora
		5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	4.272	4.272	Disdikpora
		6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan	2.576 ---- x 100	60,30 %	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	4.272		
		7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	704 ---- x 100 902	78,05%	Disdikpora
		8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	689 ---- x 100 697	98.85 %	Disdikpora
		9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	82.350 ---- x 100 82.350	100 %	Disdikpora
		10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	26.996 --- x 100 26.996	100 %	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	38.553 ---- x 100 82.350	46,79 %	Disdikpora
		12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.976 ---- x 100 26.996	7,32%	Disdikpora
		13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	5.478	5.478	Disdikpora
		14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	2.122	2.122	Disdikpora
		15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4.915	4.195	Disdikpora
		16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.765	1.765	Disdikpora
		17. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.322	2.322	Disdikpora
		18. Jumlah kebutuhan	495	495	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)			a
		19. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.287	1.287	Disdikpora
		20. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	555	555	Disdikpora
		21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat	2.077	2.077	Disdikpora
		22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.044	1.044	Disdikpora
		23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda	$\frac{413}{428} \times 100$	96,50%	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
		24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	$\frac{63}{93} \times 100$	67,74 %	Disdikpora
		25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	$\frac{674}{905} \times 100\%$	74,48%	Disdikpora
		26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Disdikpora SMA/ sederajat	$\frac{376}{564} \times 100\%$	66,67%	Disdikpora
		27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	$\frac{9}{17} \times 100$	52.94 %	Disdikpora
		28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima	$\frac{684}{684} \times 100$	100 %	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah			
		29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	544 --- x 100 684	79,53%	Disdikpora
		30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	139	139	Disdikpora
		31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	133	133	Disdikpora
		32. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	110	110	Disdikpora
		33. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	0	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		34. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	20	20	Disdikpora
2.	Kesehatan	1. Jumlah RS Rujukan kab yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6	6 unit	Dinkes
		2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	6 unit RS	Dinkes
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		22 Puskesmas, 24.100 buku KIA, ANC Kit, Tablet Fe, Imunisasi TT	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		324 dokter dan 723 bidan	Dinkes
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh foto)		14 Puskesmas PONEB, Bidan Kit, 24.100 Buku KIA, Tablet Vitamin ibu bersalin .	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk		Bidan PONEB : 259 orang, Dokter	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)		PONED : 72 Orang, Bidan di RS :161 Orang	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		KN Kit, 24.100 Buku KIA, Form MTBM	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		723 bidan	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		SDIDTK Kit, 1.133 Posyandu, Pemberian Vitamin A balita	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		324 dokter, 216 Bidan Desa, 71 Tenaga Gizi, 5752 Kader Posyandu	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		11 SHK	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan		788 Guru UKS SD/MI, 192 Guru UKS	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		SMP/MTs, 123 guru UKS SMA /SMK /MA	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		174 Posbindu Kit	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		22 Programmer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu	Dinkes
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		313 Posyandu Lansia, 74 Lansia Kit, 22 Puskesmas Santun Lansia	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		22 Dokter Puskesmas, 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan),	Dinkes
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik		174 Posbindu Kit	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesehatan yang tersedia			
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		22 Programmer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu	Dinkes
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		174 Posbindu Kit	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		22 Programmer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		16 Pedoman kesehatan jiwa	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		2 perawat terlatih, 1 dokter terlatih	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		FDC Kat I 313 paket Kombipak 10 paket FDC Anak 48 paket FDC Kat II 6 paket Pot sputum 13200 buah Kaca slide 775 buah Reagen Zn 720 paket Catridge TCM TBC 4640	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		23 Dokter TB terlatih 15 Perawat TB terlatih 21 petugas Laborat TB terlatih	Dinkes
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			
		1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		18.500 rapid HIV dan 18.500 rapid sipilis	Dinkes
		2. Jumlah SDM kesehatan		10 Dokter, 10 Perawat /	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Bidan, 10 Analisis kesehatan , 10 farmasi , 10 rekam medis , 6 PPIA , 3 Dokter PDP , 3 Dokter PPIA .RR 10 orang	
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
		1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha)	97	97	DPU-PR
		2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)	13.050 m	13.050 m	DPU-PR
		3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)	700 Ha	700 Ha	DPU-PR
		4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)	20.400	20.400 M	DPU-PR
		5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan	Ada	Kep BUpati No. 520/421 th 2020 tentang rencana pola	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		sumber daya air WS Kewenangan kab		tanam dan tata tanam kabupaten	
		6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab	Ada	Kep BUpati No. 520/421 th 2020 tentang rencana pola tanam dan tata tanam kabupaten	DPU-PR
		7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab	Ada	27 das	DPU-PR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	4.238 m /10.596 m x 100%	40%	DPU-PR
		2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	302.378,2 2 m / 1.249.933 m kali 100%	24.19%	DPU-PR
		3. Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	4143 --- x 100% 13.810	30%	DPU-PR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten			
		1. Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab	Ada	Ada	DPU-PR
		2. Tersusun dan ditetapkannya	Ada	Ada	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten			
		3. Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaraan SPAM	1	1 BUMD (PDAM)	DPU-PR
		4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	8	8 izin	DPU-PR
		5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	0	DPU-PR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
		1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	298.156	298.156	DPU-PR
		2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	300	300	DPU-PR
		3. Jumlah rumah dengan akses unit	298.456	298.456	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			
		4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	528	528	DPU-PR
		5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	528	528	DPU-PR
		6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	528	528	Disperkim
		7. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	528	528	Disperkim
		8. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	528	528	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		9. Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	298.156 ---- x 100% 402.129	74%	DPU-PR
		10. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	2.851 ---- x 100% 402.129	1%	DPU-PR
		11. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	2.851 ---- x 100% 402.129	1%	DPU-PR
		12. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	298.156 --- x 100% 402.129	74%	
		13. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	206 ---- x 100% 402.129	1%	DPU-PR
		14. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	= (9 m x 12 m x 3 m) / (528 rumah x 2 m3) x 100%= 78%	78%	DPU-PR
		15. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	2.650 KK ----x 100% 2.650 KK	100%	DPU-PR
		16. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	= 528 m3 /((266.414 unit + 2.650 unit) x 10 tahun) x 2 m3) x 100% = 1.52%	1.52 %	DPU-PR
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten			
		1. Rasio bangunan gedung (kecuali	3 --- x 100%	100%	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	3		
		2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting	180	180	DPMPTSP
		3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	ADA	Perda No. 26 th 2011	DPU-PR
		4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Keputusan bupati no 640/320 tentang tim profesi ahli Kabupaten Jepara tahun 2021-2023	DPU-PR
		5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	36	36	DPU-PR
		6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab	163	163	DPU-PR
		7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten	163	163	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		8. Jumlah bangunan gedung Negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/ dirawat	163	163	DPU-PR
		Rasio kemantapan jalan			
		1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten	872.142 Km	872.142 Km	DPU-PR
		2. Panjang jalan yang dibangun	14.842,49	14.842,49	DPU-PR
		3. Panjang jembatan yg dibangun	15,40 m	15,40 m	DPU-PR
		4. Panjang jalan yang ditingkatkan	25.449,53 Km	25.449,53 Km	DPU-PR
		5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	10 M	10 M	DPU-PR
		6. Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi	11.692,55 Km	11.692,55 Km	DPU-PR
		7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	123,5	123,5	DPU-PR
		8. Panjang jalan yang dipelihara	50.667,00 Km,	50.667,00 Km	DPU-PR
		9. Panjang jembatan yang dipelihara	9 m	9 m	DPU-PR
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli			
		1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli onstruksi di	0	0	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		wilayah kab			
		2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab	55	55	DPU-PR
		3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab	6	6	DPU-PR
		4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada	Tidak Ada	DPU-PR
		5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten	Ada	Potensi pasar jasa konstruksi/R up 2021	DPU-PR
		6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN	Ada	Potensi pasar jasa konstruksi/R UP 2021	DPU-PR
		7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	Potensi pasar jasa konstruksi/R UP 2021	DPU-PR
		8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan	Tidak Ada	Tidak Ada	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten	Ada	Kep Bupati No. 142 th 2011	DPU-PR
		10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Suket	Suket	DPU-PR
		11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan	Suket	Suket	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		operator dan teknisi/analisis			
		12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Suket	Suket	DPU-PR
		13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	DPU-PR
		14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Suket	Suket	DPU-PR
		15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha	Suket	Suket	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	Ada	DPU-PR
		17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Tidak Ada	DPU-PR
		18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten	570	570	DPU-PR
		19. Jumlah usaha perseorangan	0	0	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten			
		20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota	570	570	DPU-PR
		21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota	Suket	Suket	DPU-PR
		22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Suket	Suket	DPU-PR
		23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Suket	Suket	DPU-PR
		24. Jumlah	0	0	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	0	DPU-PR
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.				
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab			
		1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	36	36	Disperkim
		2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	36	36	Disperkim
		3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	36	36	Disperkim
		4. Jumlah unit rumah korban	36	36	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			
		5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	36	36	Disperkim
		6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	36	36	Disperkim
		7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban Bencana	0	0	Disperkim
		8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi	36	36	Disperkim
		9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0,9	0,9	Disperkim
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten			
		1. Jumlah RT penerima layanan yang telah mendapatkan	75	75	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		1. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	Disperkim
		2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	0	Disperkim
		3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	52	52	Disperkim
		4. Jumlah rumah tangga penerima	23	23	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		5. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0,9	0,9	Disperkim
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani			
		1. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh< 10 Ha	0	0 Ha	Disperkim
		2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	12.172	12.172	Disperkim
		3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	49,27	49,27	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)			
		1. Jumlah rumah di kab/kota	305.628	305.628	Disperkim
		2. Jumlah unit PK RTLH	9.680	9.680	Disperkim
		3. Jumlah rumah tidak layak huni	51.513	51.513	Disperkim
		4. Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun)	0	0	Disperkim
		5. Rasio rumah dan KK	406.073 --- x 100% 305.628	133%	Disperkim
		6. Jumlah rumah pembangunan	0	0	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		baru			
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			
		1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12	12	Disperkim
		2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1.178	1.178	Disperkim
		3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan	1.178	1.178	Disperkim
		4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	1.178	1.178	Disperkim
		5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	1.178	1.178	Disperkim
		6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	0	Disperkim
		7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	12	12	Disperkim
		8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	12	12	Disperkim
		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	12	12	Disperkim

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			
		1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani	35	35 kejadian	Satpol PP & Damkar
		2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1.970	1.970	Satpol PP & Damkar
		3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	8	Satpol PP & Damkar
		4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1	1	Satpol PP & Damkar
		5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada	Ada	Satpol PP & Damkar
		6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	Ada	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tidak Melaksanakan	0	BPBD
		2. Persentase jumlah penduduk	$\frac{1.250.608}{1.250.608} \times 100\%$	100%	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tidak melaksanakan	0	BPBD
		2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Tidak melaksanakan	0	BPBD
		3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	125 / 13.375 x 100%	0,93%	BPBD
		4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	185 / 13.375 x 100%	0,93%	BPBD
		5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	1.250.608 / 1.250.608 x 100%	100%	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{1.250.608}{1.250.608} \times 100\%$	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Tidak ada suatus KLB		BPBD
		2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	BPBD
		3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{869}{869} \times 100\%$	100%	BPBD
		4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	$\frac{1020}{1020} \times 100\%$	100%	BPBD
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
		1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi	322	322 layanan	Satpol PP & Damkar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten			
		2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	2	2 pos	Satpol PP & Damkar
		3. Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan	26	26 orang	Satpol PP & Damkar
		4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	0	Satpol PP & Damkar
		5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan	9	9 unit	Satpol PP & Damkar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan evakuasi			
		6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	28	28 orang	Satpol PP & Damkar
		7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	0	Satpol PP & Damkar
		8. Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	0	Satpol PP & Damkar
6	SOSIAL				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	2 jenis (offline & online)	Dinsos permasdes
		2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1.413	1.413 anak	Dinsos permasdes
		3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk	0	Belum Terbentuk	Dinsos permasdes
		4. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau	189	189	Dinsos permasdes
		5. Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	2 unit	Dinsos permasdes
		6. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	123	123 orang	Dinsos permasdes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		7. Jumlah rumah singgah/shelter/t empat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	1 buah shelter	Dinsos permasdes
		8. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang	123	123 orang	Dinsos permasdes
		9. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu	121	121 orang	Dinsos permasdes
		10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	9	9 paket	Dinsos permasdes
		11. jumlah paket perbekalan yang tersedia	0	0	Dinsos permasdes
		12. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	0	Dinsos permasdes
		13. Jumlah tenaga	0	0	Dinsos

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter			permasdes
		14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan	41	41 orang	Dinsos permasdes
		15. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat kesejahteraan sosial	118	118 orang	Dinsos permasdes
		16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	6	6 paket	Dinsos permasdes
		17. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,	0	0 orang	Dinsos permasdes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan			
		18. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehata dasar	0	0 orang	Dinsos permasdes
		19. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	15	15 orang	Dinsos permasdes
		20. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15	15 orang	Dinsos permasdes
		21. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang	5	5 orang	Dinsos permasdes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dirujuk			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten			
		1. Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan	318	318 orang	Dinsos permasdes
		2. Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang	0	0	Dinsos permasdes
		3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki	0	0	Dinsos permasdes
		4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan	0	0	Dinsos permasdes
		5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	0	Dinsos permasdes
		6. Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau	33	33 orang	Dinsos permasdes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		relawan sosial yang Tersedia			
7	Tenaga Kerja				
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja			
		1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kab	Tidak Ada	Tidak Ada	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		3. Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	75	75	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi			
		1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{3}{8} \times 100\%$	37,5%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{4}{5} \times 100\%$	80%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{5}{128} \times 100\%$	3,91%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{2}{42} \times 100\%$	4,76%	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Persentase LPK yang memiliki perizinan	7 ----- x 100% 42	16,67%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Jumlah penganggur yang dilatih	488	488 orang	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	128 ----- x 100% 126	102%	Diskop UKM Nakertrans
		8. Persentase penyerapan lulusan	66 ----- x 100% 128	52%	Diskop UKM Nakertrans
		9. Lulusan bersertifikat kompetensi	144 ----- x 100% 40	3,6	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	57 ----- x 100% 57	100%	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	57	57 orang	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
		1. Persentase perusahaan yang menerapkan	14 / 976 x 100%	1,43	Diskop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		program peningkatan produktivitas			Nakertrans
		2. Data tingkat produktivitas total	4,63%	4,63%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS			
		1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{62}{260} \times 100\%$	24%	Diskop UKM Nakertrans
		2. Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{3}{18} \times 100\%$	16,67%	Diskop UKM Nakertrans
		3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan	56	56	Diskop UKM
		4. Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	$\frac{65}{260} \times 100\%$	25%	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	1.764/976 x 100%	181%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	29/260 x 100%	11,15%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Jumlah mogok kerja	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		8. Jumlah penutupan perusahaan	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		9. Jumlah perselisihan kepentingan	5	5	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0	0	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah perselisihan PHK	41	41	Diskop UKM Nakertrans
		12. Jumlah Pekerja yang ter-PHK	79	79	Diskop UKM Nakertrans
		13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	10	10	Diskop UKM Nakertrans
		14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	0	0	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang diberdayakan			
		15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	17 / 46 x 100%	36,96%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten			
		1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kab	6.632	6.632	Diskop UKM Nakertrans
		2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	18.473	18.473	Diskop UKM Nakertrans
		3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	43	43	Diskop UKM Nakertrans
		4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Kab	-	-	Diskop UKM Nakertrans
		5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1	1	Diskop UKM Nakertrans
		6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	-	-	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			
		7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	4.503	4.503	Diskop UKM Nakertrans
		8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	6.566	6.566	Diskop UKM Nakertrans
		9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	40	40	Diskop UKM Nakertrans
		10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	57	57	Diskop UKM Nakertrans
		11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja	N/A	N/A%	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Indonesia (CTKI) yang terdata			
		12. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	57/57 x 100%	100%	Diskop UKM Nakertrans
		13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	20/20 x 100%	100%	Diskop UKM Nakertrans
		14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran	Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran	Diskop UKM Nakertrans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD.			
		1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG	33	33 Lembaga	DP3AP2KB
		2. Jumlah program/ kegiatan PUG pada	43/53	43 Program/ 53 kegiatan	DP3AP2KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten			
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab			
		1. Jumlah media massa (cetak, elektronIk) yang bekerja sama dengan pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	6	6 Media Massa	DP3AP2KB
		2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	12	12 lembaga	DP3AP2KB
		3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	34/34 x 100%	100%	DP3AP2KB
		4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan	40	40 lembaga	DP3AP2KB
		5. Jumlah lembaga layanan anak	2	2 lembaga	DP3AP2KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)			
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak			
		1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan	0	0 organisasi	DP3AP2KB
		2. Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih	0	0 orang	DP3AP2KB
		3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Tidak ada	0	DP3AP2KB
		4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan	Tidak Ada	0	DP3AP2KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten			
		5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	1 program	DP3AP2KB
		6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandarisasi	1	1	DP3AP2KB
		7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	20/20 x 100%	100%	DP3AP2KB
9	Pangan	1. Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Gudang Cadangan Kab. Jepara	DKPP
		2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan	Ada	Ada	DKPP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		lainnya			
		3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	Ada	DKPP
		4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada	Ada	DKPP
		5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	1 dokumen	DKPP
		6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada	5 daerah	DKPP
		7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	5 daerah	DKPP
		8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada	Ada	DKPP
10	Pertanahan	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	18	18	DPMPTSP
		2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek	0	0	Bag. Pem

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek			
		3. SK Bupati/Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah	0	0	Bag. Pem
		4. Dokumen Izin membuka tanah	0	0	Bag. Pem
		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten	0	0	Bag. Pem
11	Lingkungan Hidup	1. Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a. Indeks Kualitas Air, (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	IKA : 51,67 IKU : 77,73 IKTLH : 44,45	IKA : 51,67 IKU : 77,73 IKTLH : 44,45	DLH
		2. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di	47.443,8 / 146.028,4 x 100 %	32,49%	DLH

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		wilayah kab			
		3. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	15 / 15	100%	DLH
		4. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD)di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab	0 / 15	0	DLH
		5. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab	0	0	DLH
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan 6. ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	0	DLH
		7. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin	11/11	100%	DLH

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang ditangani			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan.	701 / 710	98,73%	Disdukcapil
		2. Penerbitan akta perceraian	182/192	94,79 %	Disdukcapil
		3. Penerbitan akta kematian	12.291 / 12.291	100%	Disdukcapil
		4. Penyajian data kependudukan	2/2	100%	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa.	8	8 desa	Dinsospermades
		2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	0	Dinsospermades
		3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga	5	5 lembaga	Dinsospermades

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	184	184	Dinsosper mades
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
		1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak ada	0	DP3AP2 KB
		2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	22,79	22,79	DP3AP2 KB
		3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	6,27%	6,27%	DP3AP2 KB
		4. Persentase masyarakat yang terpapar	482.141 ---- x 100% 1.493.147	32,29 %	DP3AP2 KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)			
		5. Jumlah stakeholders/pe mangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	18	18 Stakholder	DP3AP2 KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)			
		1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{39}{47} \times 100\%$	83%	DP3AP2 KB
		2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{167.087}{227.004} \times 100\%$	73,6%	DP3AP2 KB
		3. Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	69	69 kelompok	DP3AP2 KB
		4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{6.911}{19.425} \times 100\%$	35,5 %	DP3AP2 KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)			
		1. Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	1 / 195 x 100%	0,51%	DP3AP2 KB
		2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	7.640/ 10.435 x 100%	73,2%	DP3AP2 KB
15.	Perhubungan				
		Rasio konektivitas			
		1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	125 / 170 x 100%	73,53%	Dishub
		2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	15.208:2 =7.604 -- x 100% 12.385	61,40%	Dishub
		3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	5/ 5 x 100%	100%	Dishub
		4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	30,750,24 / 43.420 x 100%	70,82%	Dishub

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
16.	Komunikasi dan Informatika				
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi			
		1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yg dimanfaatkan secara daring dg memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	n/a	n/a	Diskominfo
		2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	51/51 X 100%	100%	Diskominfo
		3. Persentase perangkat daerah yang	51/51 X 100%	100%	Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan			
		4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	312 / 312 x 100%	100%	Diskominfo
		5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	312 / 312 x 100%	100%	Diskominfo
		6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-	312 / 312 x 100%	100%	Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		undangan			
		7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	249/249 x 100%	100%	Diskominfo
		8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	18 / 27 X 100%	66,66 %	Diskominfo
		9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	18 / 27 X 100%	66,66 %	Diskominfo
		10. Persentase perangkat daerah yg memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	27 / 27 x 100 %	Kecamatan tidak termasuk	Diskominfo
		11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	18 / 18 x 100%	100%	Diskominfo
		12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang	24 / 27 x 100%	88,89%	Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		mendukung smart city			
		13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	n/a	n/a	Diskominfo
		14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada	1. Perbup Tentang Masterplan Smart City 2. Perbup ttg tata kelola TIK 3. Perbup tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Diskominfo
		Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah			
		1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab	123 / 138 x 100%	89,13%	Diskominfo
		2. Persentase konten informasi terkait	52.441/ 52.543 x 100%	99,81%	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)			
		3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	1162/162 x 100%	100%	
17.	Koperasi dan UKM				
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas			
		1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	16 / 284 x 100%	5,63%	Diskop UKM Nakertr ans
		2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam	2 / 2 x 100%	100%	Diskop UKM Nakertr ans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab			
		3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	231 / 670 x 100%	34,48%	Diskop UKM Nakertr ans
		4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	163/284 x 100%	57,39%	Diskop UKM Nakertr ans
		5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	191/670 x 100%	28,51%	Diskop UKM Nakertr ans
		6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi	245 / 92.157 x 100%	0,27%	Diskop UKM Nakertr ans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab			
		7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	5 / 670 x 100%	0,46%.	Diskop UKM Nakertr ans
		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Tidak diisi	Diskop UKM Nakertr ans
		9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	119/670 x 100%	17,76%%	Diskop UKM Nakertr ans
		10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah	7 / 670 x 100%	1,04	Diskop UKM Nakertr ans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		keanggotaan daerah kab			
		11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	$\frac{3}{670} \times 100\%$	0,45	Diskop UKM Nakertrans
		12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	$\frac{2}{670} \times 100\%$	0,30%	Diskop UKM Nakertrans
		13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ka dalam 1 (satu) daerah kab	$\frac{3}{670} \times 100\%$	0,45%	Diskop UKM Nakertrans
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha			
		1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{3.069}{76.740} \times 100\%$	4.00%	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Tidak memiliki data berbasis online	0	Diskop UKM Nakertrans
		3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	168 / 76.740 x 100%	0,22%	Diskop UKM Nakertrans
		4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	149 / 76.591 x 100%	0,19%	Diskop UKM Nakertrans
		5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	200 / 76.540 x 100%.	0,26%	Diskop UKM Nakertrans
		6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	2.320 / 76.740 x 100%	3.02%	Diskop UKM Nakertrans
		7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	484/ 76.740 x 100%	0,63%	Diskop UKM Nakertrans
18	Penanaman Modal				

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten			
		1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten	Ada	1	DPMPTSP
		2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Ada	4	DPMPTSP
		3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	6	6 laporan	DPMPTSP
		4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2	2 kali	DPMPTSP
		5. Kegiatan pameran penanaman modal	Tidak Ada	Refocusing karena pandemi	DPMPTSP
		6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	3	3	DPMPTSP
		7. Konsultasi perizinan dan non perizinan	12	12	DPMPTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		penanaman modal			
		8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8.658	8.658	DPMPTSP
		9. Laporan realisasi penanaman modal	7.304.118.903.839	7.304.118.903.839	DPMPTSP
		10. Pembinaan paratur penanaman modal tingkat kab.	14	14 orang	DPMPTSP
		11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	255	255 perusahaan	DPMPTSP
		12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab	Ada	1	DPMPTSP
19	Pemuda dan Olahraga				
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri			
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	92	92	Disdikpora
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	29	29	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	264 / 277.167 x 100%	0.10%	Disdikpora
		2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	46 / 277.167 X 100%	0.02%	Disdikpora
		Peningkatan Prestasi Olahraga			
		1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	129/129 x 100%	100%	Disdikpora
		2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	10	10 kali	Disdikpora
20	Statistik				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
		1. Tersedianya buku profil daerah	Ada	1. Jepara Dalam Angka 2. PDRD 3. Statistik Sektoral Kab Jepara	Diskominfo
		2. Jumlah survey	0	Tidak	Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		statistik sektoral yang dilakukan		melaksanakan	nfo
		3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	229	229	Diskominfo
		4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Tidak ada	Diskominfo
		5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	0	Diskominfo
		6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	15/17 X 100	88.24%	Diskominfo
		7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	22/17 X 100	129,4%	Diskominfo
21	Persandian				
		Tingkat keamanan informasi pemerintah			
		1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	8/10 x100%	80%	Diskominfo
		2. Persentase sistem elektronik yang	290/290 X 100%	100%	Diskominfo

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah			
		3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	290/290 x100%	100%	Diskominfo
		4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan	51/51 X 100%	100%	Diskominfo
22	Kebudayaan				
		Terlestarikannya Cagar Budaya			
		1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	40	40 obyek	Disparbud
		2. Jumlah obyek	2	2	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaaan keberagaman)			ud
		3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	40	40 obyek	Disparbud
		4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata	16	16 Tim	Disparbud
		5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	Tidak ada	Disparbud
		6. Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi,	3	3 Tim	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pemeliharaan dan pemugaran)			
		7. Layanan perizinan membawa cagar budaya kotake luar kota dengan dukungan data	0	Tidak ada	Disparbud
		8. Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	0	Tidak ada	Disparbud
		9. Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	1	1 Cagar Budaya	Disparbud
		10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	512	512 buah	Disparbud
		11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	1.152	1.152 orang	Disparbud
		12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan	6	6	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		sarana dan prasarana museum.			
		13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	1 Tim	Disparbud
		14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupatwn	1	1 Tim	Disparbud
		15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Tidak ada	Disparbud
		16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	10	10 orang	Disparbud
		17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Tidak ada	Disparbud
		18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	2	2 unit	Disparbud
		19. Penyelenggaraa n kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	6	6 kali	Disparbud
23	Perpustakaan				
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			
		1. Rasio ketercukupan koleksi	88.619 / 1.213.170 x 100%	7,3%	Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		perpustakaan dengan penduduk			
		2. Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	25,036 / 1.213.170 x 100%	2,1 %	Diskarpus
		3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	867 / 1.213.170 x 100%	0,0715%	Diskarpus
		4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	18 / 426 x 100%	4,2 %	Diskarpus
		5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	562	Perpustakaan Keliling, Lomba dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan, Sosialisasi Gemar Membaca	Diskarpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
		1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada	0	Diskarpus
		2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada	0	Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	329	329 eksemplar	Diskarpus
24	Kearsipan				
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	12.00 / 45.500 x 100%	26%	Diskarpus
		2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkandaftar arsip	49.500 / 136.500 x 100%	36%	Diskarpus
		3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	88.635 / 88.635 x 100%	100%	Diskarpus
		4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100 / 270.635,5 x 100%	0,03695 %	Diskarpus
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
		1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	0	Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	0	Diskarpus
		3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten	317	317	Diskarpus
		4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK	1975	1975	Diskarpus
		5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian	4	4	Diskarpus
		6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah	0	0	Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		kab yang sesuai NSPK			
URUSAN PILIHAN					
25	Kelautan dan Perikanan				
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)			
		1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	276	276 RT	Dinas Perikanan
		2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	10 / 10 x 100%	100%	Dinas Perikanan
		3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan	5 izin	5 izin	Dinas Perikanan
		4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan	177 orang	177 orang	Dinas Perikanan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		penguatan kelembagaan)			
		5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2.294.100 .706 ekor	2.294.100.706 ekor	Dinas Perikanan
26	Pariwisata				
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			
		1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	24	24	Disparbud
		2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	156	156	Disparbud
		3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	0	0	Disparbud
		4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50	50 orang	Disparbud
		5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	10	10 kali	Disparbud
		6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten	0	Tidak Ada	Disparbud
		7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi	6	6 industri	Disparbud

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pada event promosi pariwisata di dalam negeri			
		8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	58 / 1.195 X 100%	4,8%	Disparbud
		9. Persentase SDM peserta pembekalan sectorkepariwisataan	510/510 X 100%	100%	Disparbud
		10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat	24	24 lokasi	
27	Pertanian				
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun			
		1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	101	101 unit	DKPP
		2. Prasarana pertanian yang digunakan	72	72 unit	DKPP
		3. Penerbitan izin usaha pertanian	27	27 dokumen	DKPP
		4. Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	101/101 x 100%	100%	DKPP
		5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertaniankabupaten	27/28 x 100%	96,4%	DKPP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		6. Persentase fasilitasi penanggulangan encana	77,36 ha Dibagi 77,36 ha x 100%	100 %	DKPP
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)				
		1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			
		2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			
		3. Pemulihan ekosistem pada Tahura			
		4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)				
		1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panasbumi dalam daerah kab			Tidak ada
30	Perdagangan				
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			
		1. Persentase perizinan yang diterbitkan	8 izin	8 izin Toko swalayan	Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan			
		2. Persentase penerbitan TDG	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100%	Disperindag
		3. persentase gudang yang tidak memiliki TDG	$\frac{7}{42} \times 100\%$	16%	Disperindag
		4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Tidak ada penerbitan STPW	Surat Keterangan Disperindag	Disperindag
		5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi,	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab			
		6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu		SPKA sudah menjadi kewenangan pusat	Disperindag
		7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = \frac{(a+b)}{a} \times 100$ $= \frac{(0,5+0)}{1} \times 100$ $= 50\%$	50%	Disperindag
		8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$\frac{31,11}{64} \times 100\%$	0,49%	Disperindag
31	Perindustrian				
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab			
		1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab		Tidak menerbitkan IUKI	DPMPTSP
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
		1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya	$= \frac{a+b}{a} \times 100$ $= \frac{30+20}{30} \times 100$ $= 50\%$	50%	Disperindag

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		menjadi perda			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	1710/1710 x 100%	100% izin (DPMPTSP)	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		1. Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	0/0 x 100%	0 izin	DPMPTSP
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			
		1. Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	32/193 X 100%	1,6%	Disperindag
31	Transmigrasi				
		1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi		Kebijakan Pemerintah Pusat, tahun	Diskop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		penetapannya		2021 tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena adanya pandemic Covid-19	Nakertrans
		2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		3. Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			
		4.			

B. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

❖ **Urusan Pendidikan**

Urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara, tingkat keberhasilan atau capaian kinerjanya diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.
 Dari 38.939 anak yang berusia 5-6 tahun, ada 29.458 anak yang sudah tamat maupun sedang belajar di satuan PAUD selama tahun 2021 atau capaiannya sebesar 75,65%.
2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
 Pada Tahun 2021, anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar mencapai 118.850 orang dari 119.490 total anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten Jepara atau 99,46% sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar.

3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Jepara terdapat dari total anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten Jepara yaitu 56.668 anak usia 13-15, terdapat 48.743 anak yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama atau sebesar 86,02%.

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Dari total 235.677 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten Jepara, 1.623 belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan.

❖ **Urusan Kesehatan**

Indikator kinerja kunci untuk urusan kesehatan adalah :

1. Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara terbilang cukup besar. Sampai dengan tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.212.357 jiwa. Sedangkan daya tampung rumah sakit rujukan yang ada adalah 957 atau capaiannya baru sebesar 0,079%.

2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi.

Untuk melayani kesehatan masyarakat, di Jepara sudah ada 6 buah rumah dan jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi sebanyak 5

3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

Pada tahun 2021 jumlah ibu hamil yang ada di Jepara mencapai 21.465 orang, dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 100%

4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.
Dari 19.425 ibu bersalin yang ada di Jepara 100% sudah mendapatkan pelayanan persalinan.
5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
Bayi yang lahir pada tahun 2021 sebanyak 19.437 dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak dengan capaian 100%.
6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.
Pada tahun 2021, balita di kabupaten Jepara sebanyak 96.464 anak dan yang sudah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 91.464 anak atau 94,33%.
7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Pada tahun 2021, dari anak usia pendidikan dasar yang berjumlah 40.216 anak, yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 32.696 anak atau capainnya 81.30%.
8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Penduduk usia 15-59 tahun yang ada di Kabupaten Jepara sebanyak 787.287 orang, dan yang sudah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebanyak 712.779 orang atau 90,54%.
9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
Jumlah orang warga negara usia 60 tahun keatas di kabupaten Jepara sebanyak 127.316, sedangkan mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sejumlah 121.027orang.
10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
Penderita hipertensi yang ada di Jepara sebanyak 360.858 orang. Sedangkan penderita hipertensi yang mendapatkan

pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 292.630 orang dengan capaian 81,09%

11. Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian 86,07%

Penderita Diabetes Mellitus yang ada di Jepara sebanyak 30.525 orang. Sedangkan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 26.274 orang

12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

Penderita ODGJ yang ada di Jepara sebanyak 2.161 orang. Sedangkan penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 2.105 orang dengan capaian 97,41%

13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.

Penderita TBC yang ada di Jepara sebanyak 3.787 orang. Sedangkan penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 3.741 orang atau 98,79%..

14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang ada di Jepara sebanyak 25.479 orang dan yang sudah seluruhnya mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar dengan capaian 100%

❖ **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, di kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu untuk data IMB-nya. Capaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator kinerja kunci sebagai berikut :

1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab.

Di Kabupaten Jepara, Wilayah sungai menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten.

Di Kabupaten Jepara, Wilayah sungai menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi.

Luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 28.247, dan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha) di tahun 2021 sepanjang 9.845 atau 34.8%

4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten.

Dari total rumah tangga di Kabupaten Jepara adalah 402.129 rumah, sebanyak 384.405 mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic.

Dari seluruh kab jepara jumlah rumah yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu 402.129 terdapat 298.456 yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD

6. Rasio kepatuhan IMB kabupaten.

Dari 180 IMB yang berlaku di Jepara, semua sudah sesuai dengan peruntukannya.

7. Tingkat Kemantapan jalan.

Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten Jepara adalah 872.142 km, dan yang kondisi mantap sepanjang 768.008 km atau capaiannya sebesar 88,06%.

8. Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi/ pelatihan ahli.

Dari 650 kebutuhan tenaga ahli di Jepara, ada 55 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli

9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.

Dari total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya, tidak terjadi kecelakaan konstruksi.

❖ **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana.

Total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021 sebanyak 36 dari 25 unit yang direncanakan.

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten.

Dari jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan yaitu 52, sedangkan Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 75, capaiannya sebesar 69,33%.

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani.

Luas kawasan kumuh dibawah 10 hektar yang ada di Kabupaten Jepara adalah 49,27 hektar, 4,27 hektar sudah ditangani sehingga target 100%

4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Dari jumlah total seluruh unit rumah di Kabupaten Jepara yatu 305.628 unit, ada 49.021 unit rumah yang tidak layak huni.

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Dari total rumah yang ada di Jepara yaitu 305.628 unit, Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 1.178 unit.

❖ **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

Dari 35 pengaduan pelanggaran yang masuk pada tahun 2021 semuanya bisa diselesaian.

2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.

Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi sebanyak 7 Perda dan seluruhnya memuat sanksi yang ditegakkan.

3. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

Dari seluruh penduduk Kabupaten Jepara, yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana yaitu sebanyak 1.250.608 orang.

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Penduduk Jepara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 125 orang.

5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Penduduk Jepara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 1.020 orang.

6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari 115 kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2021, yang dapat dijangkau dan ditangani sampai padam sebanyak 93 kejadian sehingga capainnya sebesar 80,86%.

7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

Response time penanganan kebakaran adalah 11,11 menit.

❖ **Urusan Sosial**

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 tercatat sebanyak 1.413 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebanyak 214 orang atau capaiannya sebesar 15,14%

2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten.

Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 318, dan seluruh korban bencana alam dan sosial sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya sehingga capaian kinerjanya 100%.

❖ **Tenaga Kerja**

1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.

Tidak ada kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten Jepara yang mengacu ke RTKD.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 95.051 orang, dan yang memiliki sertifikat kompetensi sebanyak 875 orang atau 0,29%.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 95.051 orang. Sedangkan PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) 21.944.232,37 sehingga capaiannya adalah 23,086%.

4. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar).

Pada tahun 2021, perusahaan yang ada di Jepara berjumlah 957. Perusahaan sudah menerapkan tata kelola kerja yang baik sebanyak 65 perusahaan atau 6,79%.

5. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah.

Dari 18.473 pencari kerja yang terdaftar, ada 6.566 pencari kerja yang ditempatkan atau 35.54%.

❖ **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

Belanja langsung APBD Kab. Jepara pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 868.992.472.822 sedangkan Jumlah ARG pada belanja langsung APBD sebesar Rp. 174.726.733.410 atau 20,11%.

2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Jepara terdapat 362.092 anak (berusia kurang dari 18 tahun) dan 34 anak mengalami kekerasan atau 0,0093 %.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).
2,695 % atau 20 orang dari 742.239 orang perempuan yang ada di Kabupaten Jepara mengalami kekerasan.

❖ Pangan

1. Persentase cadangan pangan.

Pada tahun 2021, jumlah cadangan pangan 59,6 ton.

❖ Pertanian.

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara dari 246.209 m² tanah yang diberikan ijin lokasinya seluruhnya sudah sesuai dengan peruntukan ijin lokasinya.

2. Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pngadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ada.

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.

Pada tahun 2021 di Kabupaten Jepara dari luas tanah 246.209 m² tanah yang diterbitkan izinnya, seluruhnya sudah sesuai dengan peruntukannya.

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Pada tahun 2021 tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat.
Tidak tersedia tanah untuk rakyat.
6. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.
Kabupaten Jepara tidak menangani sengketa tanah garapan.

❖ **Lingkungan Hidup.**

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten.
 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 60,64
 - Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) : 51,67
 - Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) : 77,73
 - Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%) : 44,45
2. Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten.
 Pada saat ini, persoalan sampah menjadi masalah di semua wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Jepara dari 146.028,4 timbunan sampah, baru 32,49% atau 47.443,8 timbunan sampah yang dapat tertangani.
3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 Pada tahun 2021, ada 15 Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan dan 15 penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten Jepara.

❖ **Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**

1. Perekaman KTP Elektronik
 Pada tahun 2021, dari jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el yaitu 889,679 orang, terdapat 888.984 orang yang sudah melakukan perekaman atau capaiannya 99,92%.

2. Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA.

Dari 331.578 anak di tahun 2021 yang ada di Jepara, sebanyak 104.450 atau 31.50% anak sudah memiliki KIA.

3. Kepemilikan Akta Kelahiran.

Dari jumlah penduduk 0-18 tahun, dari 351.488 jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 334.982 orang atau 95,30%.

4. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Dari 20 Perangkat Daerah (kecamatan tidak termasuk), yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebanyak 10 PD dengan capaian 50%

❖ **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. Persentase pengentasan desa tertinggal.

Pada tahun 2021, masih ada 1 (satu) desa yang masuk kategori desa tertinggal, yaitu Desa Parang Kecamatan Karimunjawa. Dan Desa Parang ini belum memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun persentase peningkatan status desa mandiri.

2. Persentase peningkatan status desa mandiri.

Pada tahun 2021, terdapat 121 desa yang berstatus sebagai desa berkembang dan belum ada yang termasuk kategori desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun.

❖ **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

Angka kelahiran total di kabupaten Jepara adalah 2,05

2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2021 sebanyak 227.004 PUS dan yang menjadi peserta KB aktif Modern sebanyak 73,6% atau sebanyak 167.078 PUS.

3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need).

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2021 sebanyak 227.004 PUS, dan yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani sebanyak 23.755 PUS atau 10,46%.

❖ **Perhubungan**

1. Rasio konektivitas kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$ yaitu $(0.77 \times 1) + (0.8 \times 1) = 1,57$ trayek /lintas.

2. Kinerja lalu lintas kabupaten.

V/C ratio di jalan kabupaten Jepara adalah 0,21%.

❖ **Komunikasi dan Informatika**

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Dari 27 Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Jepara, PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebanyak 11 PD atau 40,74%.

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial.

Dari 25 Layanan Publik yang ada baru 9 yang sudah diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan capaian 36%.

3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang berusia di atas 17 tahun sebanyak 926.363 jiwa, yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebanyak 799.407 jiwa.

❖ **Koperasi dan UKM**

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas.
Di Tahun 2021, total koperasi yang ada di Jepara sebanyak 670 koperasi, dan yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset sebanyak 229 buah.
2. Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.
Dari 76.740 usaha kecil yang ada di Jepara, ada 3.069 usaha kecil yang menjadi wirausaha atau 4.00%.

❖ **Penanaman Modal.**

1. Persentase peningkatan investasi di kabupaten
Realisasi investasi tahun 2021 adalah -24,64%

❖ **Kepemudaan dan Olahraga**

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
Pada tahun 2021, di kabupaten Jepara terdapat 277.167 pemuda (umur 16-30 tahun) dan sejumlah 46 orang berwirausaha.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
Dari total 277.167 pemuda (umur 16-30 tahun) di tahun 2021, terdapat 247 orang yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi.
3. Peningkatan prestasi olahraga
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2021 sebanyak 42 medali dari berbagai cabang olahraga.

❖ **Statistik**

1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
Dari 30 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Jepara, semuanya telah menggunakan data statistik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan capaian 100%.
2. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
Dari 30 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Jepara, semuanya telah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah dengan capaian 100%.

❖ **Persandian.**

1. Tingkat keamanan informasi pemerintah.
Pada tahun 2021, tingkat keamanan informasi di Kabupaten Jepara sebanyak 514.

❖ **Kebudayaan**

1. Terlestarikannya Cagar Budaya.
Kabupaten Jepara memiliki 40 cagar budaya sampai tahun 2021. Sejumlah 37 cagar budaya dilestarikan.

❖ **Perpustakaan**

1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Kabupaten Jepara belum melakukan survey kajian kegemaran membaca.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
Kabupaten Jepara belum melakukan survey Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM).

❖ **Kearsipan**

1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahanakuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43.

Capaian indikaor kinerja kunci ini diukur melalui $T = (a + i + s + j)/4$ Capaiannya 41%.

2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Capaian indikaor kinerja kunci ini diukur melalui rumus $T = (m + b + g + a + c + i)/6$. Capainnya 67%.

URUSAN PILIHAN

❖ **Kelautan Perikanan**

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP).

Jumlah total produksi perikanan tangkap + Jumlah produksi Perikanan budidaya $11.295,20 + 46.397,25 = \mathbf{57.692,45}$ ton

❖ **Pariwisata**

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan.

Sektor pariwisata adalah yang paling terdampak dengan adanya pandemic covid-19. Jika dibandingkan tahun 2020 akan tetapi sudah ada peningkatan dengan melandainya kassus Covid-19 dimana jumlah wisatawan mancanegara yang datang sebanyak 3.004 orang, jumlah yang datang pada tahun 2021 sebanyak - 2.954, persentasenya menurun drastis yaitu -98%.

2. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara per kebangsaan.

Tahun 2020 wisatawan yang berkunjung ke Jepara sebanyak 349.325 orang, sedangkan di tahun 2021 sebanyak 59.916 orang, persentasenya -17%.

3. Tingkat hunian akomodasi.

Dari 329.230 jumlah kamar yang tersedia, pada tahun 2021 terdata ada 42.799 kamar yang terjual atau 13%.

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.

Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah) 32.045.698 jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah) 1.264.127 atau 3,94

5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

Realisasi PAD tahun 2020 sebesar 408.645.312.793, sedangkan realisasi PAD dari sektor pariwisata tahun 2021 sebesar 629.360.000

❖ **Pertanian**

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun.

Produktivitas pertanian di tahun 2021 adalah 5.76 ton/hektar.

2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

Kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 27.228. sedangkan di tahun 2021 sebanyak 26.411 capaiannya sebesar -3,0%.

❖ **Kehutanan**

Kabupaten Jepara tidak melaksanakan urusan kehutanan.

❖ **ESDM**

Kabupaten Jepara tidak ada perusahaan panas bumi.

❖ **Perdagangan**

1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Pada tahun 2021, terdapat 91 pelaku usaha perdagangan, dan seluruhnya sudah memiliki izin sesuai ketentuan sebanyak 51 dengan capaian 56%

2. Persentase kinerja realisasi pupuk.

RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) sebanyak 23,031,06, sedangkan realisasinya sebesar 30.830,77 atau 48,7%.

3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Jepara adalah 3.137, seluruhnya merupakan UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun 2021.

❖ **Perindustrian**

1. Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.

Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 sebanyak 8.316, sedangkan tahun 2021 sebanyak 9.898. capaian kinerja untuk urusan perindustrian adalah 19%.

2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).

Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten sebanyak 3 (RIPIN Kemenkerin), sedangkan Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan ada 3. Capaiannya sebesar 100%.

3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

- Dari 32 izin yang dikeluarkan seluruhnya dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan pada tahun 2021 tidak ada.
 5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
Pada tahun 2021, Kabupaten Jepara tidak menerbitkan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten.
 6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.
Sampai dengan tahun 2021, informasi industri secara lengkap terkini ada 3 yaitu : Informasi produksi dan kapasitas produksi, Informasi bahan baku dan bahan penolong, Informasi bahan bakar/energy

❖ Transmigrasi

Kebijakan Pemerintah Pusat, tahun 2021 tidak melaksanakan pemberangkatan transmigrasi karena masih dalam situasi pandemic Covid-19.

Matriks Capaian Kinerja Indikator Kinerja Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	29.458/ 38.939 x 100.	75,65%	Disdikpora

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	118.850/ 119.490 x 100	99,46 %	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	48.743 / 56.668 x 100	86.02 %	Disdikpora
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.623 / 235.677 X 100%	0,67%	Disdikpora
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	957 ----- x 100 1.212.357	0,079 %	Dinkes
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	5 ----- x 100 6	83,3333 %	Dinkes
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	21.465/ 21.465 x 100%	100%	Dinkes
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	19.425/ 19.425 x 100%	100 %	Dinkes
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	19.437/ 19.437x 100	100 %	Dinkes
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91.464/ 96.961 X 100	94,33 %	Dinkes
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32.696/ 40.216 x 100	81,30 %	Dinkes
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai	712.779/ 787.287 x 100	90,54 %	Dinkes

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		standar			
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	121.027/ 127.316 x 100	95,06 %	Dinkes
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	292.630/ 360.858 x 100	81,09 %	Dinkes
		Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26.274/ 30.525 x 100	86,07 %	Dinkes
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.105/ 2.161 x 100%	97.41 %	Dinkes
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	3.741/ 3.787 x 100%	98.79 %	Dinkes
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	25.479/ 25.479 x 100%	100%	Dinkes
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab	Surat Keterangan	0	DPU-PR
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS	Surat Keterangan	0	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Kewenangan kabupaten			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{9.845}{28.247} \times 100\%$	34.8%	DPU-PR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	$\frac{384.405 \text{ SR}}{402.129 \text{ KK}} \times 100\%$	96%	DPU-PR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{298.456}{402.129} \times 100\%$	74%	DPU-PR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{180}{180} \times 100\%$	100%	Dpu-pr
		Tingkat Kemantapan jalan	$\frac{768.008}{872.142} \times 100\%$	88,06 %	DPU-PR
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi/ pelatihan ahli	$\frac{55}{650} \times 100\%$	8.4%	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{0}{704} \times 100\%$	0%	DPU-PR

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
4.	Perumahan Rakyat	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	36/25	144%	Disperkim
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	52/ 75	62%	Disperkim
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	49,27/ 49,27 x 100%	1,00	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	47/ 75 - x 100%	62%	Disperkim
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	49.021 / 305628x 100%	16,03%	Disperkim
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	35/35 x 100%	100%	Satpol PP & Damkar
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	7/7 x 100%	100%	Satpol PP & Damkar
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.250.608	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	125	100%	BPBD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	1020	100%	BPBD

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93 ----- 115	80,86%	Satpol PP & Damkar
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,11 Menit	11,11 Menit	Satpol PP & Damkar
6.	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	214 / 1.413 x 100%	15,14%	Dinsos Permasdes
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	318/318	100%	Dinsos Permasdes
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	0	0%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	875/95.051 X 100%	0,92%	Diskop UKM Nakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	21.944.23 2,37/ 95.051	23086,80%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	155/260 100%	59,62%	Diskop UKM Nakertrans
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan(dalam	6.566/ 18.473	35,54%	Diskop UKM

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	X 100%		Nakertrans
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	174.726.73 3.410 / 868.992.47 2.822 x 100%	20,11%	DP3AP2KB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	34/ 362.092	0,0093 %	DP3AP2KB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	20/ 742.239 X 100%	0,0027 %	DP3AP2KB
9.	Pangan	Persentase cadangan pangan	59,6 ton dibagi 100 ton kali 100	59,6 %	DKPP
10.	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	246.209 m2 /246.209 m2 x 100%	100%	
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum)	0	0	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	246.209 m2 /246.209 m2 x 100%	%	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	
		Tersedianya tanah untuk		0	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		masyarakat	0		
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	0	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	60,64 51,67 77,73 44,45	IKLH : 60,64 IKPA : 51,67 IKPU : 77,73 ITHL : 44,45	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	47.443.8 dibagi 146.028, 4 x 100	32,49%	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	15 /15 x 100	100%	DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	888.984/ 889.679 x 100	99,92%	Disdukcapil
		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	104.450/ 331.578 x 100	31.50%	Disdukcapil
		Kepemilikan Akta Kelahiran	334.982/ 351.488x 100	95,30%	Disdukcapil
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	10/20 x 100	50% Kecamatan tidak termasuk)	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	1/1 x 100	100%	Dinsos Permasdes
		Persentase peningkatan status desa mandiri	0/121 x 100%	0%	Dinsos Permasdes
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,05	2,05	DP3AP2KB

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Berencana				
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	167.087/27.004 x 100	73,6%	DP3AP2KB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	23.755/227004 x 100	10,46	DP3AP2KB
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten	(0.77x1)+(0.8x1)	1,57 trayek/lintas	Dishub
		Kinerja lalu lintas kabupaten	0,21	0,21	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	11/27 x 100	40,74%	Diskominfo
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial	9/25 X 100%	36%	Diskominfo
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	799.047 / 926.363x 100	86,26%	Diskominfo
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	229/ 670 x 100	34,18%	Diskop UKM Nakertrans
		Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha	3069/ 76.740	4.00%	Diskop UKM Nakertrans
18	Penanaman	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	7.304.118	-24,64%	DPMPSTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
	Modal		.903.839 - 9.692.176 .368.109 /-9 9.692.176 .368.109 x 100		
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	46/ 277.165 x 100	0,02%	Disdikpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	247 / 277.165 x 100	0,09 %	Disdikpora
		Peningkatan prestasi olahraga.	42	42	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	30/30 X 100%	100%	Diskominfo
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	30/30 X 100%	100%	Diskominfo
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	514	514	Diskominfo
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	37/40 x 100	93%	Disparbud
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	Belum dilakukan survey.	0	Diskarpus
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Belum dilakukan survey	0	Diskarpus
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59	T (a + l + s + j)/4 a = 26% l = 36% S = 100% J =	(26%+40%+ 100%+0,14 78%) / 4 = 41%	41% Diskarpus

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		UU No 43	0,145%		
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$(m + b + g + a + c + i) / 6$ $m = 100\%$ $b = 0\%$ $g = 100\%$ $a = 100\%$ $c = 100\%$ $i = 0\%$	$(100\% + 0 + 100\% + 100\% + 100\% + 0) = 67\%$	67% Diskarpus
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)		57.692,45 ton	Dinas Perikanan
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	--2.954 / 3.004	-98%	Disparbud
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-59.916 / 349.325 x 100	-17%	Disparbud
		Tingkat hunian akomodasi	42.799 / 329.230	13%	Disparbud
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.264.127 / 32.045.698	3,94%	BPS
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	629.360.000 / 408.645.312.793 x 100	15%	Disparbud
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,76 ton/ha	5,76 ton/ha	DKPP
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	26.411 / 27.228 x 100	-3,0%	DKPP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		penyakit hewan menular			
28	Kehutanan			Tidak melaksanakan	
29	ESDM			Tidak melaksanakan	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	51/91 X 100	100%	Disperindag
		Persentase kinerja realisasi pupuk	23,031,06 / 47,234.,3 x 100	48,7%	DKPP
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku)	3.137 /3.137 x 100	100%	Disperindag
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten.	9898- 8316 / 8316 x 100	19%	Disperindag
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten).	3/ 3x 100	100%	Disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	32	32 izin	DPMPTSP

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0 izin	DPMPTSP
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	0%	Disperindag
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Informasi produksi dan kapasitas produksi 2. Informasi bahan baku dan bahan penolong 3. Informasi bahan bakar/energi Informasi tenaga	50%+25%)+(10+0%+0%) Informasi produksi dan kapasitas produksi : 10%	Disperindag
32	Transmigrasi.			Kebijakan Pemerintah Pusat TA 2021 tidak ada pemberangkatan transmigran karena adanya	Diskop UKM Nakertrans

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
				pandemi covid-19 (Refocussing , Realokasi Belanja TA 2021)	

C. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

❖ **Perencanaan Dan Keuangan**

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.
Jumlah realisasi APBD 2021 sebesar Rp. 2.590.169.356.220, sedangkan realisasi jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan adalah 17,29%
2. Rasio PAD.
Jumlah PAD Kabupaten Jepara di tahun 2021 sebesar 408.645.312.793, sedangkan jumlah PDRB Non Migas sebesar 20.187.576,68 Rasio PAD-nya sebesar 20242,42%.
3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara adalah level 2,8.
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP, Kabupaten Jepara level 3.
5. Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures).
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 2.309.123.965.349 Sedangkan belanja urusan pemerintahan sebesar Rp. 1.788.114.515.267 dan realisasi transfer Expenditures sebesar Rp. 1.898.208.874.213. Persentase

Belanja Urusan Pemerintahan Umum sebesar 82,20%.

6. Opini Laporan Keuangan.

Kabupaten Jepara, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 Opini Laporan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk tahun 2021 belum keluar.

❖ **Pengadaan**

1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.

Kontrak konstruksi keseluruhan di tahun 2021 adalah 152 sedangkan kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021 tidak ada.

2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.

Pada tahun 2021, di Kabupaten Jepara, pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif sejumlah 4.009 paket. Sedangkan pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif sebanyak 170 paket, capaian kinerjanya sebesar 4,24%.

3. Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

Pada tahun 2021, Total Belanja Langsung Kabupaten Jepara sebesar Rp. 690.857.987.673,00 sedangkan nilai belanja langsung yang melalui Pengadaan sebesar Rp. 377.577.943.807,58 , sehingga capaiannya sebesar 49,24%.

❖ **Kepegawaian**

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada tahun 2021 sebanyak 1.007 orang. Sedangkan pegawai menurut

Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 1.343 orang. Rasionya adalah 133%.

2. Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Jumlah seluruh PNS (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebanyak 2.030 orang. Sedangkan jumlah PNS Fungsional sebanyak 129 orang.

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

Pegawai Fungsional yang ada di Jepara pada tahun 2021 sebanyak 262 orang dan yang sudah bersertifikat kompetensi sebanyak 129.

❖ **Manajemen Keuangan**

1. Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD.

Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) : 2.505.236.384.000 Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi : 2.309.123.956.349 Budget execution sebesar 92,17%.

2. Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan) adalah 408.911.029.000 Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi adalah 408.645.312.793 Revenue mobilization : 99,94%.

3. Assets management.

- Daftar asset tetap : Ada
- Manual untuk menyusun daftar asset tetap : Ada
- Proses inventarisasi asset tahunan : Ada
- Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran : Ya

4. Cash Management: Rasio

Total Belanja Anggaran tahun 2021 sebesar 2.153.110.336.831 Realisasi SILPA : 269.469.390.871 Rasionya : 12,52%.

❖ **Transparansi Dan Partisipasi Publik**

- Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).
 Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda sebanyak 1.015.722.316.094.
 Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda 1.153.963.832.366
- Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information).
 Total jumlah dokumen yang telah dirinci sebanyak 7 dokumen. Sedangkan yang sudah dipublikasikan di website Pemda sebanyak 7 dokumen.

Matriks Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang
Urusan Pemerintahan

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Perencanaan Dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan.	447.736.053.056 / 2.590.169.356.220 x 100	17,29%	BPKAD
		Rasio PAD.	408.645.312.793 / 20.187.576.68 x 100	20242,42 %	BPKAD
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level 2,8	level 2,8	Inspektorat

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3 DC dengan catatan)	3 DC (dengan catatan)	Inpektorat
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	1.898.208.874.213 / 2.309.123.965.349 x 100	82,20%	BPKAD
		Opini Laporan Keuangan	11 kali	Bukti piagam WTP (tahun 2010 – 2020)	BPKAD
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	0/152 X 100%	0	BAG. PENGADAAN BRG & JASA
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	170/4.009	4,24%	BAG. PENGADAAN BRG & JASA
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	377.577.943.807,58 / 690.857.987.673,00 X 100%	49,24%	BAG. PENGADAAN BRG & JASA
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.343/1.007 X 100%	133%	BKD.
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	129/2030X 100%	6%	BKD

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	129 / 262 X 100%	49%	BKD
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.309.12 3.965.34 9 / 2.505.23 6.384.00 0 X 100%	92,17%	BPKAD
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	408.645. 312.793/ 408.911. 029.000 x 100%	99,94%	BPKAD
		Assets management	Asset tetap, manual untuk menyusun asset tetap Proses inventarisasi asset tahunan, nilai asset yang tercantum dalam laporan	Ya	BPKAD
		Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	269.469.3 90.871 / 2.153.110 .336.831 X 100%	12,52%	DPKAD
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik).	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	1.153.963. 832.366/ 1.015.722. 316.094		BPKAD
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	7 ----- x 100%	100%	BPKAD

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Elemen Data	Capaian Kinerja	Sumber Data
		(Public access to fiscal information)	7		

III. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara dinilai berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui perbandingan Rencana Kinerja dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Jepara.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.1

Pengukuran Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI
1.	100 % lebih	BAIK SEKALI (A)
2.	> 75 % s/d100 %	Baik (B)
3.	>55 % s/d75 %	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55 %	Kurang (D)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2017 – 2022, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 3 Tujuan, 4 Sasaran Strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama;
- Misi II terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran Strategis dan 3 Indikator Kinerja Utama;
- Misi III terdapat 1 Tujuan, 6 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama;
- Misi IV terdapat 1 Tujuan, 4 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama;
- Misi V terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Utama;

(16 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama)

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 16 (enam belas) Sasaran Strategis dan 29 (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa sebanyak 14 indikator sasaran atau 48,27% bermakna Baik Sekali, 9 indikator sasaran atau 31,03 % bermakna Baik, dan 4 indikator sasaran atau 13,80 % bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 121,89 %, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 90,20 %. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2021 bermakna Baik Sekali dan naik sebesar 31,69 % jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan terjadinya pandemic Covid 19 sehingga diambil kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19.

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Bupati Jepara Tahun 2021 merupakan target kinerja tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam tahun 2021:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bupati Jepara Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	7,40
		Harapan lama sekolah	12,33
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,70
		Kasus Kematian Ibu	14
		Angka kematian bayi	5,2
		Persentase Balita Gizi Buruk	2,0
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	23,29
4.	Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	16,90
5.	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	56,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021
		Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,00
		Indeks Tutupan Hutan/Lahan	68,00
6.	Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat pengangguran Terbuka	3
7.	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	87,86
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,40
8.	Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	11.600.133
		Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	5.250.763
		Nilai realisasi Investasi	1.061
9.	Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	3.733.491
10.	Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	286.589
11.	Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan Wisman	
		Wisnus	33.000
			2.000.00

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021
			0
12.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	79,04
13.	Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100
		Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	100
14.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	59,31
15.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	22,66
16.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP
		Nilai LKJIP	B
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,8
		Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	7,40	7,77
		Harapan lama sekolah	12,33	12,77
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,70	75,70
		Kasus Kematian Ibu	14	19
		Angka kematian bayi	5,2	4,32
		Persentase Balita Gizi Buruk	2,0	1,38
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	23,29	Data belum release BPS
4.	Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	16,90	52,55
5.	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	56,00	51,67
		Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,00	77,73

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
		Indeks Tutupan Hutan/Lahan	68,00	44,45
6.	Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	3	4,23
7.	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	87,86	72,18
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,40	1,42
8.	Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	11.600.133	Data belum release BPS
		Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	5.250.763	Data belum release BPS
		Nilai realisasi Investasi	1.061	3.398
9.	Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	3.733.491	Data belum release BPS
10.	Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	286.589	Data belum release BPS

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
11.	Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan		
		Wisman	33.000	50
		Wisnus	2.000.000	289.409
12.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	79,04	83,96
13.	Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100	72,86
		Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	100	96,64
14.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	70,78	88,06
15.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	22,66	23,63
16.	Meningkatnya dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	Proses Audit
		Nilai LKJIP	B	Proses Evaluasi

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021	CAPAIAN KINERJA 2021
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,7	80,81
		Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Proses Audit

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal	Rata-rata Lama Sekolah	7,68	7,77
		Harapan lama sekolah	12,75	12,77
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,84	75,91
		Kasus Kematian Ibu	15	19
		Angka kematian bayi	4,34	4,32
		Persentase Balita Gizi Buruk	1,97	1,38
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	23,74	23,74

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021
		dalam keluarga		
4.	Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	9,30	52,55
5.	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	52	51,67
		Indeks Kualitas Pencemaran Udara	83,15	77,73
		Indeks Tutupan Hutan/Lahan	65,87	44,45
6.	Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,97	4,23
7.	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	78,95	72,18
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,35	1,42
8.	Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	10.471.691	Data belum release BPS
		Kontribusi sektor Perdagangan	5.066.090	Data belum release

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021
		n dalam PDRB (ADHB)		BPS
		Nilai realisasi Investasi	3.020	3.398
9.	Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	3.949.099	Data belum release BPS
10.	Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	Kontribusi sektor Perikanan dalam PDRB	281,63	Data belum release BPS
11.	Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan		
		Wisman	3.004	50
		Wisnus	349.325	289.409
12.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	83,15	83,96
13.	Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	86,82	72,86
		Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	93,91	96,64
14.	Meningkatnya	persentase	76,46	88,06

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2020	CAPAIAN KINERJA 2021
	kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	jalan kabupaten dalam kondisi baik		
15.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	96,89	23,63
16.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	WTP	Proses Audit
		Nilai LKJiP	B	Proses Evaluasi
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,89	78,89
		Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2,93	Proses Audit

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

NO	SASARAN.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2021	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJM
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh	Rata-rata Lama Sekolah	7,77	103,87

NO	SASARAN.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2021	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJM
	masyarakat, baik formal maupun non formal			
		Harapan lama sekolah	12,77	103,48
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Data belum release BPS	
		Kasus Kematian Ibu	19	73,68
		Angka kematian bayi	4,32	118,66
		Persentase Balita Gizi Buruk	1,38	101,52
3.	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam keluarga	Data belum release BPS	
4.	Meningkatnya partisipasi kelompok seni/budaya lokal dalam even/gelaran seni budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang aktif	52,55	248,69
5.	Meningkatnya kualitas hidup yang lestari	Indeks Kualitas Pencemaran Air	51,67	92,26
		Indeks Kualitas Pencemaran Udara	77,73	89,34

NO	SASARAN.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2021	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJM
		Indeks Tutupan Hutan/Lahan	44,45	65,36
6.	Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,23	70,92
7.	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM	Persentase Koperasi sehat	72,18	82,80
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,42	97,93
8.	Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (ADHB)	Data belum release BPS	
		Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB (ADHB)	Data belum release BPS	
		Nilai realisasi Investasi	3.398	1.092
9.	Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	Data belum release BPS	
10.	Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan	Kontribusi sektor Perikanan	Data belum release	

NO	SASARAN.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2021	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJM
	tangkap maupun budidaya yang berkelanjutan	dalam PDRB	BPS	
11.	Meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata	Kunjungan wisatawan		
		Wisman	50	0,001
		Wisnus	289.409	12,58
12.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh	Persentase rumah layak huni	83,96	103,33
13.	Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat	Persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	72,86	72,86
		Persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih	96,64	96,64
14.	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan melalui pembangunan serta rehabilitasi jalan dan jembatan	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	88,06	115,09
15.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	23,63	99,28

NO	SASARAN.	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA 2021	% CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RPJM
16.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Opini BPK	Proses Penilaian	
		Nilai LKjIP	Proses Audit	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,81	106,32
		Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Proses Penilaian	

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi didasarkan pada capaian kinerja dan besaran sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Sisa anggaran pada masing-masing sasaran dianggap sebagai efisiensi apabila sasaran dapat dicapai, dilihat dari realisasi indikator kinerja yang telah sesuai dengan target yang direncanakan. Dari enam belas sasaran, terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang capaian kerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu :

- 1) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal, kinerja mencapai 104,28 % dengan efisiensi anggaran sebesar 5,82%.
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, kinerja mencapai 112,99 % dengan efisiensi anggaran sebesar 6,45%.

- 3) Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak, dengan efisiensi anggaran sebesar 2,63 %.
- 4) Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah, kinerja mencapai 320,26 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2,16 %.
- 5) Meningkatnya produksi pertanian yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi petani, dengan efisiensi anggaran sebesar 3,55 %.
- 6) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh, kinerja mencapai 104,28 % dengan efisiensi anggaran sebesar 3,23 %.
- 7) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, kinerja mencapai 100,93 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2,06 %.
- 8) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, kinerja mencapai 106,6 % dengan efisiensi anggaran sebesar 8,37 %.

Efisiensi anggaran diperoleh antara lain dari: sisa lelang, perjalanan dinas dan realisasi menyesuaikan harga riil di lapangan. Disamping hal-hal tersebut, efisiensi anggaran juga didorong oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengalokasikan anggaran dengan standar belanja berbasis program.

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal maupun Non Formal

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal maupun Nonformal** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 104,28 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh

Masyarakat, Baik Formal Maupun Nonformal disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat, Baik Formal Maupun Non Formal

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Thn 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Cap (%)	Target	Realisasi	Cap (%)	
1.	Rata – Rata Lama Sekolah	7,43	7,68	103,36	7,40	7,77	105	103,87
2.	Harapan Lama Sekolah	12,33	12,75	103,40	12,33	12,77	103,56	103,48
Rata-Rata Capaian		103,38			104,28			

Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara, 2021

1.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara mencapai 7,43 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara tahun 2021 sudah mencapai 7,77 tahun. Hal ini diperkuat dengan tingginya persentase penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Jepara yang hanya menamatkan pendidikan tertingginya sampai dengan jenjang SD/MI.

Pembangunan pendidikan sebagai salah satu kunci dari pembangunan manusia telah memberi hasil yang memuaskan. Secara makro dari ukuran rata-rata lama sekolah penduduk tersebut

menunjukkan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Jepara juga mengalami perubahan pada tahun 2017 dan 2018 yakni sebesar 0,10 tahun sehingga mencapai 7,43 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah Jawa Tengah hanya mencapai 7,27 tahun 2017 dan 7,35 tahun pada tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 7,45 dan tahun 2020 sebesar 7,68. Bila dibandingkan dengan target kinerja di akhir periode RPJMD atau pada tahun 2022 yang sebesar 7,48, capaian kinerja pada tahun 2021 ini sudah mencapai 103,87%.

Konsistensi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara ini tidak lepas dari beberapa kebijakan yang mendukung tercapainya kinerja tersebut, antara lain:

1. Meningkatkan akses dan pemerataan mutu serta kualitas pendidikan pada jenjang PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs;
2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas input, proses dan output pendidikan;
3. Meningkatkan kemasyarakatan dan prestasi kegiatan pemuda, olahraga dan seni;
4. Meningkatkan kemandirian pengelolaan pendidikan non formal (PNF) Peningkatan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

Namun demikian, jumlah sumber daya pendidik dari unsur PNS perlu mendapat perhatian serius mengingat jumlahnya yang semakin tidak proporsional dengan jumlah siswa/kelas yang ada saat ini. Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Kabupaten Jepara telah berhasil meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah dan berdampak pada meningkatnya kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan salah satu sub komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan rata-rata jenjang pendidikan tertinggi di Kabupaten Jepara. Pada indikator ini terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jepara periode tahun 2020-2021 mengalami

perubahan cukup baik yakni bertambah 0,11 tahun, sementara peningkatan rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 0,08 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Jepara memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang semakin meningkat.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 terealisasi 12,77 dari target sebesar 12,33 sehingga capaiannya adalah sebesar 103,56%. Realisasi kinerja ini naik jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 12,75. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Jepara diharapkan minimal lulus Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Capaian kinerja Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 ini sudah mencapai 103,48 % bila dibandingkan dengan target di akhir periode RPJMD yang sebesar 12,34.

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat** dengan 4 (empat) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 112,99 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Capaian (%)	Tahun 2021		Capaian (%)	CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Angka harapan hidup	75,71	75,84	100,15	75,70	75,91	75,91	75,91
2.	Kasus Kematian Ibu	15	15	100,00	14	19	73,68	76,68
3.	Angka kematian bayi	5,25	4,48	114,67	5,2	4,32	120,37	119,21
4.	Persentase Balita Gizi Buruk	2,1	1,97	106,59	2,0	1,38	144,92	144,92
	Rata-Rata Capaian		105,35			112,99		

Sumber :1. BPS Kabupaten Jepara, 2021
2.Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, 2021

2.1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan hidup (AHH) di Kabupaten Jepara secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Terhitung sejak tahun 2012, angka harapan hidup di Kabupaten Jepara mencapai 75,61 kemudian berturut-turut naik menjadi 75,63 pada tahun 2013, 75,64 pada tahun 2014, 75,65 pada tahun 2015, 75,67 pada tahun 2016, tahun 2017 angkanya mencapai 75,68, tahun 2018 mencapai 75,69, tahun 2019 mencapai 75,73 dan tahun 2020 mencapai 75,84 angka tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Secara lebih rinci, dapat diketahui bahwa angka harapan hidup Perempuan di Kabupaten Jepara mempunyai angka harapan hidup yang lebih secara konsisten lebih lama dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2017 AHH perempuan mencapai 105,2% dari AHH laki-laki, yaitu 77,67 tahun berbanding 73,83 tahun. Sementara itu pada tahun 2018 AHH perempuan mencapai 105,19% dari AHH laki-laki, yaitu 77,70 tahun berbanding 73,86 tahun. Pada

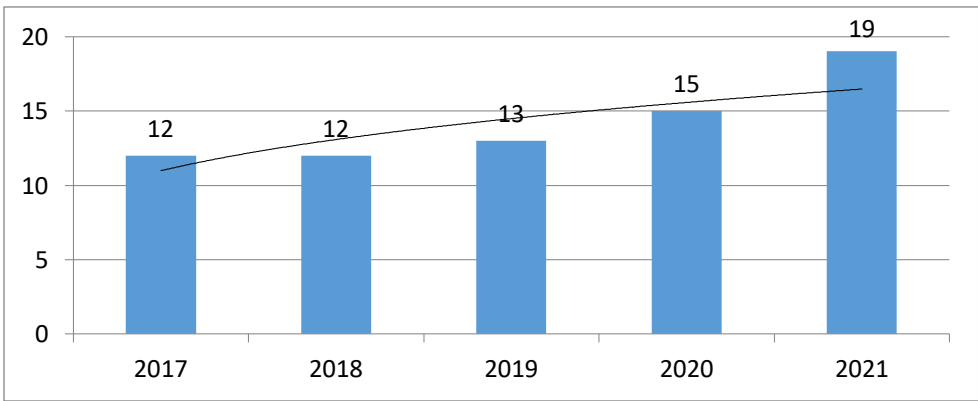
tahun 2019 AHH Laki-laki mencapai 73,89 tahun dan perempuan 77,71 tahun. Jika ditilik dari dimensi kesehatan, maka AHH ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa kondisi kesehatan perempuan masih lebih baik daripada laki-laki. Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

2.2. Kasus Kematian Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, diantaranya dapat dilihat dari indikator jumlah kasus kematian ibu. Indikator ini mencerminkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jepara menunjukkan trend meningkat, jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2021 ada 19 kasus. Angka ini naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, *new emerging disease* COVID-19 membawa dampak yang terhadap ibu hamil dengan adanya kasus kematian ibu akibat COVID-19 sejumlah 6 kasus. Jumlah kasus kematian ibu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.5

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Jepara Tahun 2018 – 2021



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Berdasarkan penyebab, kematian ibu terbagi menjadi penyebab kematian langsung dan tidak langsung. Pada tahun 2021 penyebab kematian langsung pada ibu adalah hipertensi dalam kehamilan (3 kasus), gangguan system peredaran darah (1 kasus), perdarahan (1 kasus) sedangkan sisanya diakibatkan oleh yaitu akibat infeksi COVID-19 (14 kasus).

Permasalahan kematian ibu dari penyebab langsung dapat dipandang dari dua sisi. Pertama dari sisi pelayanan atau petugas antara lain disebabkan oleh menurunnya kegiatan pengawasan dan pendampingan ibu hamil risti ditambah dengan adanya situasi pandemi menjadikan intensitas kegiatan baik monitoring maupun pembinaan Tim Kabupaten berkurang sehingga kepatuhan SOP program menurun dan kurangnya evaluasi terhadap AMP manajemen kasus. Kedua dari sisi masyarakat, sejalan dengan hasil Riskesdas Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa adanya peningkatan kasus hipertensi yang disebabkan oleh perilaku, juga menjadi salah satu penyebab tidak langsung kematian ibu. Pada tahun 2020 penyebab tak langsung kematian juga perlu mendapat perhatian dari semua unsur, baik pemerintah, petugas kesehatan dan masyarakat terutama agar meningkatkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

2.3. Angka Kematian Bayi

Perkembangan AKB di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan kondisi yang membaik karena mengalami penurunan yaitu dari 5,21 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 menjadi 4,32 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Penyebab terbesar kasus kematian bayi masih berkisar pada kasus BBLR dan asfiksia. Hal ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB,

dan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi, berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

Penurunan angka kematian bayi ini didukung dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan yaitu:

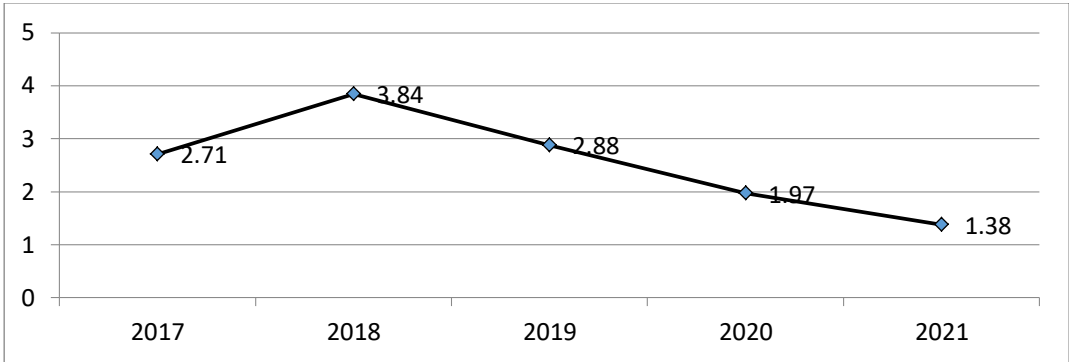
1. Penyuluhan tentang pentingnya asupan gizi seimbang terutama asupan protein hewani bagi remaja putri dan ibu hamil;
2. Suplementasi gizi mikro bagi ibu hamil (hemafort) dan remaja putri (tablet Fe);
3. Pemberian PMT bagi bayi bermasalah sebagai stimulan upaya peningkatan kondisi bayi BBLR atau penyakit lain serta peningkatan kondisi kesehatan ibu bayi;
4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam penanganan kasus BBLR dan asfiksia, manajemen terpadu bayi muda melalui pendekatan KN;
5. Sosialisasi pada masyarakat dalam penanganan bayi BBLR terutama pada saat di rumah.

2.4. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi buruk di Kabupaten Jepara menunjukkan trend menurun dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, menyebutkan bahwa penentuan kategori balita gizi buruk (*severe wasted*) adalah dengan indikator BB/TB (BB/PB). Berdasarkan kegiatan operasi timbang yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 yang selanjutnya dimasukkan dalam pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi e-PPGBM, angka gizi buruk di Kabupaten Jepara tahun 2021 sebesar 1,38%. Permasalahan gizi buruk di Kabupaten Jepara menunjukkan tren menurun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 3.4

Persentase Balita Gizi buruk Kabupaten Jepara Tahun 2017-2021



Sumber : Laporan Seksi Kesga dan Gizi Dinas Kesehatan Kab. Jepara Tahun 2021.

Gizi buruk dapat dicegah apabila ibu balita, kader posyandu serta tenaga kesehatan paham dan peduli terhadap pemantauan pertumbuhan balita. Ibu balita harus waspada apabila tidak terjadi kenaikan berat badan selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Fungsi kader memberikan informasi dan edukasi serta tenaga kesehatan (bidan desa) memberikan konseling dan edukasi yang tepat serta dirujuk ke puskesmas apabila diperlukan. Kegiatan penambahan pengetahuan tentang tumbuh kembang melalui kegiatan revitalisasi posyandu maupun kegiatan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang balita maupun kelas ibu balita akan lebih ditingkatkan cakupan dan kualitasnya

Banyaknya pekerja wanita yang menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik mengakibatkan pekerja tersebut menitipkan anak balita kepada keluarganya dengan pola asuh yang tidak sesuai dan didukung oleh adanya budaya yang menyebabkan praktek pemberian makanan tidak tepat. Mulai bulan Maret tahun 2021 Indonesia mengumumkan mulai masuknya penyakit baru yaitu COVID-19 sehingga banyak kegiatan yang tidak bisa berjalan, dan setelah adanya “adaptasi kebiasaan baru” dengan menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan) kegiatan posyandu setelah vakum sekitar 5 bulan dapat berjalan lagi pada bulan Agustus sekaligus melakukan penimbangan dan pengukuran tinggi

badan balita serta pemberian Vitamin A. Pada masa pandemi ini partisipasi masyarakat dalam deteksi dini terhadap kasus gizi buruk melalui penimbangan balita di posyandu mengalami penurunan, dapat dilihat pada angka D/S posyandu tahun 2021 rata-rata sebesar 77,75 % berarti ada sekitar 22,43 % balita yang tidak terpantau tumbuh kembangnya.

Penyebab gizi buruk terdiri atas penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk adalah konsumsi makanan yang tidak memenuhi prinsip gizi seimbang dan adanya penyakit infeksi yang terkait dengan tingginya kejadian penyakit menular dan buruknya kesehatan lingkungan. Sedangkan untuk penyebab tidak langsung antara lain pola asuh, sanitasi lingkungan, akses pangan keluarga, pelayanan kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan, dan akses informasi terutama tentang gizi dan kesehatan.

Penurunan persentase gizi buruk ini tidak terlepas dari beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara beserta instansi yang terkait. Ada beberapa hal yang mendukung pencapaian target penurunan persentase gizi buruk yaitu:

1. Terbitnya Peraturan Bupati Jepara Nomor 63 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Jepara Tahun 2019 – 2022.
2. Adanya alokasi dari Dana Desa untuk penanggulangan gizi buruk.
3. Kegiatan penambahan pengetahuan tentang tumbuh kembang anak melalui revitalisasi posyandu.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program-program yang mendukung penurunan persentase balita gizi buruk terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam deteksi dini terhadap kasus gizi buruk melalui penimbangan balita di posyandu belum optimal.
2. Pola konsumsi makanan yang kurang seimbang.
3. Pola asuh yang kurang tepat, sanitasi lingkungan yang buruk, akses pangan keluarga yang terbatas, tingkat pendapatan yang masih rendah, tingkat pendidikan, akses informasi tentang gizi dan kesehatan yang kurang.

3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak

Hasil capaian Kinerja sasaran **Strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja tahun 2021 belum rilis dari BPS . Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	23,26	23,74	102,06	23,29	Data belum release BPS	23,26	
	Rata-Rata Capaian		102,06					

Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga

Data capaian kinerja sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga tahun 2021 belum bisa di release oleh BPS.

4. Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal Dalam Even/Gelaran Seni Budaya

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal dalam Even/Gelaran Seni Budaya dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 266,48 % pada tahun 2021 dengan predikat **"Baik sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal dalam Even/Gelaran Seni Budaya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Partisipasi Kelompok Seni/Budaya Lokal dalam Even/Gelaran Seni Budaya

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Targe t	Realis asi	Capa ian (%)	Targ et	Realisa si	Capa ian (%)	
1.	Persentase kelompok seni dan Budaya yang aktif	19,72	9,30	47,16	19,72	52,55	266,48	248,7
Rata-Rata Capaian		47,16			266,48			

Sumber : Bappeda Kab. Jepara, 2021

4.1. Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Aktif

Kegiatan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Jepara sangat erat kaitannya sebagai pendorong daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Terdapat beberapa festival kebudayaan yang menjadi andalan dan telah rutin diadakan, yaitu Obor-Obor Tegalsambi (Perang Obor), Pesta Lomban Jepara dan Festival Baratan Jepara. Hal ini menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Jepara. Di kabupaten Jepara terdapat berbagai jenis kesenian, yaitu: Tari Kridhajati, Tari Tenun Troso, Tari Tayub, Tari Emprak, Samroh, Gambus, Angguk, Dagelan, Kentrung, Ludruk, Ketropak dan Keroncong Prasah. Jenis kesenian tradisional Samroh, Gambus, dan Angguk, semuanya bernafaskan Islam. Melalui beberapa kesenian tradisional ini, pemerintah menggunakannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai pesan-pesan pembangunan..

Dari sejumlah kesenian di atas diwadahi oleh sejumlah kelompok seni dan budaya. Jumlah grup kesenian yang ada di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 525 kelompok aktif. Jumlah gedung kesenian yang tersedia di Kabupaten Jepara berjumlah 1 unit, akan tetapi terdapat beberapa sanggar tari milik masyarakat yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyebarluasan kebudayaan tersebut

5. Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari** dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 82,32 % pada tahun 2021 dengan predikat **“Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari** disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Hidup yang Lestari

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks Kualitas Pencemaran Air	55,00	52,0	94,54	56,00	51,67	92,26	92,26
2.	Indeks Kualitas Pencemaran Udara	87,00	83,15	94,78	87,00	77,73	89,34	89,34
3.	Indeks Tutupan Hutan/Lahan	66,00	65,87	99,80	68,00	44,45	65,36	65,36
Rata-Rata Capaian		96,37			82,32			

Sumber : DLH Kab. Jepara, 2021

1. Indeks Kualitas Pencemaran Air

Target tersebut tidak tercapai karena air sungai rata-rata dalam kondisi tercemar sedang, diantaranya disebabkan adanya pencemaran di daerah hulu dan hilir. Untuk daerah hulu disebabkan dari aktifitas domestik, sektor pertanian dengan pemakaian pupuk dan pestisida kimia, penambangan galian C secara liar dan besar-besaran hampir di seluruh wilayah Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk daerah hilir sumber pencemar berasal dari aktivitas industri, Industri Kecil Menengah serta

aktivitas domestik permukiman dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang masih membuang limbah rumah tangga di sungai.

Pengelolaan DAS harus melibatkan banyak pemangku kepentingan diantaranya instansi yang membidangi sektor pertanian, permukiman, pertambangan tidak bisa hanya diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

2. **Indeks Kualitas Pencemaran Udara**

Industrialisasi di Kabupaten Jepara juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara, oleh karena itu pada tahun 2021 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penurunan kualitas udara tersebut terutama jika kegiatan industri menggunakan bahan bakar karbon atau biomasa (kayu, arang dll). Ini banyak digunakan oleh industri mebel untuk kegiatan oven, serta penggunaan genset yang berbahan bakar solar pada semua kegiatan industri. Industrialiasi juga berimplikasi pada peningkatan jumlah transportasi yang ada di Jepara, sehingga pelepasan karbon dan zat pencemaran lain juga semakin tinggi.

3. **Indeks Tutupan Lahan/Hutan**

Indeks Tutupan Hutan/Lahan masih pada indeks 44,45 dengan capaian kinerja 65,36%. Capaian indeks ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu yang berada pada angka indeks 63,81. Capaian Indeks tutupan lahan tahun 2019 masih belum maksimal, bahkan banyak terjadi konversi lahan untuk dijadikan kawasan budidaya (perumahan dan industri) dan kegiatan pertambangan. Hal tersebut didukung dengan adanya reduksi kewenangan pemerintah daerah terkait sektor kehutanan dan penambangan menyulitkan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup lestari di Kabupaten Jepara antara lain:

- a. Meskipun keberadaan sungai di Kabupaten Jepara tergolong tercemar sedang tetapi pencemaran air sungai di Kabupaten Jepara perlu diwaspadai, dan harus dilakukan pemantauan pada semua perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL ataupun AMDAL dimana pada setiap 6 bulan sekali wajib memberikan laporan beserta hasil analisa pengujian dari laboratorium yang terakreditasi untuk kualitas air dan udara.

- b. Penambahan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Jepara yang berfungsi sebagai fasilitas utama penyeimbang pembangunan daerah dalam menanggulangi terjadinya banjir (daerah resapan air), menyerap polutan udara, dan menyuplai oksigen.

6. Meningkatnya Kualitas SDM Dan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, Dan Berdaya Saing

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas SDM dan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 70,92% pada tahun 2021 dengan predikat **“Cukup”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas SDM dan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusiadan Angkatan Kerja yang Kreatif, Inovatif, dan Berdaya Saing

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Cpaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3	5,2	57,69	3	4,23	70,92	70,92
	Rata-Rata Capaian		57,69			70,92		

Sumber : Jepara Dalam Angka, 2021

6.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapatkan pekerjaan padahal sudah berusaha dengan maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2014-2021 berfluktuatif dan terus menurun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2014 TPT Kabupaten Jepara sebesar 5,09% terus menurun menjadi 2,67% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 angka tersebut menjadi 2,23 %.

Jumlah pengangguran di Jepara pada tahun 2020 adalah 66.115 orang naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 19.239 orang. Peningkatan jumlah pengangguran ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Angkatan kerja masih banyak yang belum terserap lapangan kerja;
2. Banyak perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dampak dari pandemi Covid 19;
3. Tahun 2021 Indonesia mengalami Bonus Demografi, yaitu suatu kondisi dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah usia 15 tahun dan di atas 64 tahun);
4. Jumlah angkatan kerja Kabupaten Jepara tahun 2021 sebanyak 687.284 orang, mengalami peningkatan sebanyak 7.377 orang dibandingkan tahun 2020 dimana jumlah angkatan kerja pada tahun tersebut sebanyak 679.907 orang

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperluas jejaring kerja sama informasi bursa kerja dengan pihak-pihak yang berkontribusi tinggi terhadap penyediaan peluang kerja (dunia industry, asosiasi profesi, satuan pendidikan menengah dan perguruan tinggi) secara online sehingga info peluang kerja di setor formal semakin terbuka, banyak dan mudah diakses oleh pencari kerja;
2. Penyelenggaraan job fair makin diintensifkan;
3. Revitalisasi UPT Pelatihan Kerja (BLK) melalui upgrading Instruktur, penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan, dan modernisasi peralatan pelatihan guna mendukung program-program pelatihan kerja;

4. Mengoptimalkan penempatan tenaga kerja di sector formal melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), AKAN (Antar Kerja Antar Negara) serta perluasan kerja di sektor informal, termasuk penciptaan wirausaha baru
7. **Meningkatnya Kualitas, Kuantitas Dan Daya Saing Koperasi Serta UMKM**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Koperasi serta UMKM** dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 93,49 % dengan predikat **“Baik”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Koperasi serta UMKM** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kualitas, Kuantitas dan Daya Saing Koperasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Koperasi sehat	87,65	78,95	90,07	87,86	75,19	85,58	89,91
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	1,30	1,35	103,802,5	1,40	1,42	101,4	93,10
Rata-Rata Capaian				96,93	93,49			

Sumber : Diskopukmnakertrans, 2021

7.1 Persentase Koperasi Sehat

Realisasi kinerja Persentase Koperasi Sehat selama lima tahun terakhir berfluktuatif dan mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2018 hingga mencapai 92,94 %. Turun pada tahun 2019 menjadi 82,41% dan menurun lagi di tahun 2020 menjadi 78.94. Pada tahun 2021 ini menjadi 72,18%. Penurunan pada tahun ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu:

1. Pelayanan kepada anggota berkurang karena pandemi Covid 19;
2. Kurang pahamnya pengurus dan pengawas koperasi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban serta menyusun laporan keuangan koperasi;
3. Adanya penurunan jumlah koperasi yang menyelenggarakan RAT sebesar 75 koperasi, dari 275 koperasi menjadi 270 koperasi. Dari total jumlah koperasi 652 unit.

7.2 Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil

Realisasi kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil pada tahun 2021 mencapai 1,42. Dibandingkan dengan target yang sebesar 1,40, maka capaian kinerjanya adalah 101,4%. Kenaikan ini diukung oleh beberapa hal yaitu:

1. Banyak pelaku UMKM yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan sehingga dapat menambah pengetahuan / SDM karena adanya tambahan anggaran refocusing Covid 19.
2. Pelaku UMKM sudah banyak yang mengakses izin usaha melalui OSS.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kabupaten Jepara adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang terjangkau untuk diberi pembinaan oleh pemerintah. Jumlah kelompok UMKM yang dibina setiap tahun bervariasi jumlahnya. Dalam lima tahun terakhir, jumlah UMKM yang paling banyak dibina adalah pada tahun 2016, dimana kelompok yang dibina mencapai 535 unit. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan karena hanya 345 UMKM yang dibina dan mengalami peningkatan menjadi 355 UMKM pada tahun 2018 dan turun lagi menjadi 325 UMKM di tahun 2019.

8. Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan Dan Investasi Daerah

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah** dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 320,26% pada tahun 2021 dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran

strategis **Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah** disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatnya Kinerja Perindustrian, Perdagangan dan Investasi Daerah**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi	10.92	10.471.6	95,83	11.600.133	Data belum release		
	Sektor	7.193	91,30*					
	Industri							
	dalam PDRB (ADHB)							
2.	Kontribusi	4.999.	5.066.09	101,33	5.250.763	Data belum release		
	Sektor	273	0,21*					
	Perdagangan							
	dalam PDRB (ADHB)							
3.	Nilai Realisasi Investasi	1.019	3.020	296,36	1.061	3.398	320,26	1.092
	Rata-Rata Capaian			164,50			320,26	

Sumber: Disperindag Kab. Jepara dan BPS Kabupaten Jepara

8.1 Kontribusi Sektor Industri Dalam PDRB (ADHB)

Sektor industri masih memberikan kontribusi paling besar terhadap struktur produk domestik regional bruto (ADHB) di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dengan capaian kinerja sebesar 95,83%. Pencapaian ini didominasi kenaikan realisasi di 3 (tiga) sub sektor dalam sektor industri antara lain Industri Makanan dan Minuman, Industri Furniture dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Sementara itu, industri yang mengalami penurunan adalah Pengolahan Tembakau dan Industri Karet dan Barang dari Karet dan Plastik. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya, capaian kinerja tahun 2020 turun sebesar 0,01%, namun tetap melampaui target kinerja yang ditetapkan.

8.2 Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB (ADHB)

Pada tahun 2021 kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB (ADHB) mengalami peningkatan sebesar 1,02%. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan dua sub sektor pendukung sektor perdagangan yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor:

8.3 Nilai Realisasi Investasi

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan usaha yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah satu elemen pokok pembangunan daerah Kabupaten Jepara, baik Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing (PMDN/PMA) Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jepara, peningkatan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Adapun faktor pendukung tercapainya target realisasi Investasi di Kabupaten Jepara antara lain :

- a. Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi investasi.

- b. Kenaikan Penanaman Modal Dalam Negeri, salah satunya dikarenakan adanya efek penetapan aturan tax amnesty. Tax Amnesty akan menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri dan dengan penambahan dana yang ada maka tingkat investasi akan naik.
- c. Kemudahan perizinan dan dengan dibukanya MPP (Mall Pelayanan Publik):

Selain itu ada juga faktor kendala tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan, yaitu antara lain :

- a. Kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).
- b. Belum adanya aturan tentang penanaman modal yang terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya investasi. Hal ini dikarenakan faktor masyarakat Indonesia yang cenderung ingin mendapat keuntungan besar dalam waktu singkat tapi risiko yang diterima relatif kecil. Dukungan terhadap faktor ini berasal dari gaya hidup masyarakat kita yang cenderung konsumtif, lebih nyaman dengan keadaan saat ini meskipun tahu bahwaproduk yang dikonsumsi merupakan barang impor.

Langkah tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Jepara menghadapi beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Segera membentuk satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha di Jepara. Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, padatahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jepara telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Jepara dengan Keputusan Bupati Jepara No. 500/38 Tahun 2018 sebagai implementasi PP Nomor 91/2017 yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya.
- b. Mengadakan sosialisasi tentang investasi.

9. Meningkatnya Produksi Pertanian Yang Berkelanjutan Dengan Melibatkan Partisipasi Petani

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berkelanjutan dengan Melibatkan Partisipasi Petani** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama. Data capaian kinerja tahun 2021 belum release dari BPS sehingga belum dapat mengkategorikan predikat capaian kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Produksi Pertanian yang Berkelanjutan dengan Melibatkan Partisipasi Petani** disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
Meningkatnya Produksi Pertanian Yang Berkelanjutan Dengan Melibatkan Partisipasi Petani

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)	3.912,68	3.949,099	100,9	3.733.491	Data belum release		
	Rata-Rata Capaian		100,9					

Sumber: BPS Kab. Jepara *angka sementara

9.1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (ADHB)

Sektor pertanian merupakan sub kategori dari kategori sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sub kategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual.

Hambatan yang sering dihadapi dibidang pertanian yaitu :

- a. Adanya serangan OPT dalam skala besar misalnya serangan wereng dan tikus pada tanaman padi;
- b. Terjadinya cuaca ekstrim atau musim yang tidak bisa diprediksi;
- c. Ketersediaan sumber air yang kurang terutama di musim kemarau. Langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah:
- d. Pembuatan bendung/embung agar ketersediaan air mencukupi dan berkesinambungan terutama di musim kemarau, melalui kegiatan Pengelolaan Sumber Air mendukung Tanaman Pangan (DAK) dan sebagainya;
- e. Adanya tambahan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun dari Pemerintah Pusat dalam mendukung program/kegiatan dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, seperti Upsus Pajale (Upaya Khusus Peningkatan produksi Padi Jagung Kedele), Mekanisasi Pertanian yang merupakan kegiatan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Upaya mewujudkan sasaran meningkatnya produksi pertanian dilaksanakan pula dengan cara meningkatkan kemampuan penerapan teknologi kelompok tani, sehingga petani dapat mengadopsi teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Penerapan teknologi ini didukung oleh kegiatan-kegiatan Sekolah lapang pengolahan hasil komoditas perkebunan (kopi), Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman, Sekolah lapang Iklim, Pembinaan kelompok UPJA, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, Sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT) tanaman perkebunan dan pengembangan APH, Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan, pemantauan dan pengamatan OPT perkebunan, Pelatihan pengolahan hasil peternakan, Pendampingan percepatan peningkatan populasi sapi dengan sinkronisasi birahi dan embrio transfer, dan kegiatan Sekolah lapang budidaya peternakan.

10. Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya Yang Berkelanjutan

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya yang Berkelanjutan** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 98,23% pada tahun 2020 dengan predikat **“Baik”**. Sedangkan untuk data capaian tahun 2021 belum release dari BPS. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya yang Berkelanjutan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya Produksi Perikanan, Baik Perikanan Tangkap Maupun Budidaya yang Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kontribusi Sektor Perikanan dalam PDRB	304.8	281,63	98,23	286.589	Data belum release		
	Rata-Rata Capaian		98,23					

Sumber : BPS Kab. Jepara *angka sementara

10.1. Kontribusi Sektor Perikanan dalam PDRB

Sektor perikanan merupakan subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam PDRB. Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segalajenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, airpayau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenisikan, crustacea, mollusca, rumputlaut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (dilaut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam

kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Persentase capaian target kontribusi sektor perikanan dalam PDRB ADHB pada tahun 2020 adalah sebesar 98,23 %. Meskipun capaian kinerja menurun dari periode sebelumnya yang mencapai 98,85 namun secara kuantitas mengalami kenaikan sebesar 16,38 Milyar dari tahun 2018. Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB dalam kurun waktu tahun 2014-2020 terus mengalami peningkatan sebanding dengan peningkatan PDRB Kab. Jepara. Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB ADHB di Kabupaten Jepara masih sangat kecil dibandingkan dengan sektor lainnya yaitu hanya 0,94%.

11. Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Investasi Pariwisata

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Investasi Pariwisata** dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 12,91 % pada tahun 2021 dengan predikat **"Kurang"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Destinasi dan Investasi Pariwisata** disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Kualitas Destinasi Dan Investasi Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Kunjungan Wisatawan	2.033.000	352.329	16,48	2.241.000	289.459	12,91	64,7
	Wisman	37.000	3.004	8,11	41.000	50	0,12	0,11
	Wisnus	2.100.000	349.325	16,63	2.200.000	289.409	13,15	12,58
	Rata-Rata Capaian			12,37			12,91	

Sumber : Disparbud Kab. Jepara,2021

11.1. Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Lokal)

Jumlah kunjungan wisatawan ke Jepara pada tahun 2021 tercatat 50 wisatawan mancanegara dan 289.409 wisatawan nusantara (wisnus), total antara wisman dan wisnus sebesar 289.459 orang atau (12,91%) dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan 3.004 orang (wisman) dan 349.325 orang (wisnus), total antara wisman dan wisnus berjumlah 352.329 orang.

Pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah Kabupaten Jepara, terdapat beragam potensi kepariwisataan, baik wisata alam, wisata bahari, wisata sejarah/budaya dan wisata buatan lainnya. Dalam pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2025, maka Kabupaten Jepara termasuk pengembangan pariwisata Kawasan Semarang–Karimunjawa, dengan obyek utama Kepulauan Karimunjawa/Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya

Gambar 3.1

Taman Nasional Karimunjawa dengan Potensi Wisata Baharinya



Obyek wisata lainnya di Kabupaten Jepara adalah : wisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi : (a) Benteng Portugis di Kecamatan Donorojo; (b) Makam dan Masjid Mantingan di Kecamatan Tahunan; (c) Museum Kartini di

Kecamatan Jepara; (d) Benteng VOC di Kecamatan Jepara; (e) Pendopo Kabupaten di Kecamatan Jepara; (f) Klenteng Hian Thian Siang Tee di Kecamatan Welahan; dan (g) Monumen Ari-Ari Kartini di Kecamatan Mayong. Warisan budaya Kabupaten Jepara yang telah dikenal adalah kerajinan meubel, seni ukir dan tenun menjadi warisan budaya tak benda yang dikenal secara nasional terdapat di Kecamatan Tahunan, Kecamatan Pecangaan, Kecamatan Kalinyamanatan dan Kecamatan Jepara dan sekitarnya. Terdapat pula hutan wisata dan wisata alam di Kecamatan Keling dan Kecamatan Donorojo, serta kawasan cagar alam Kembang (di Kecamatan Kembang), cagar alam Gunung Clering (Kecamatan Donorojo) dan cagar alam Keling (Kecamatan Keling).

Obyek wisata unggulan di Jepara meliputi obyek wisata pantai Kartini, pantai Bandengan, pantai Pungkruk, Benteng Portugis dan Museum Kartini. Sementara 24 desa wisata yang dikembangkan di Jepara sesuai Keputusan Bupati Nomor 556/329 Tahun 2020 berada di desa Tempur, desa Plajan, desa Bandengan, desa Mulyoharjo, desa Teluk awur, desa Petekeyan, desa Troso, desa Kemojan dan desa Karimunjawa. Adapun destinasi wisata paling diminati di Kabupaten Jepara masih pada Taman Nasional Karimunjawa yang menyumbang sebesar 5,30% jumlah wisatawan dari total wisatawan yang berkunjung di Jepara dan 0,34% dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah meningkatnya kualitas destinasi dan investasi pariwisata daerah sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan industri pariwisata dan perdagangan adalah :

1. Menyelenggarakan festival seni dan budaya baik di daerah maupun melalui event-event nasional untuk promosi wisata.
2. Menyelenggarakan pemeran seni dan pembangunan guna mempromosikan produk-produk unggulan asli daerah

12. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Dan Pengurangan Kawasan Kumuh

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat dan Pengurangan Kawasan Kumuh dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 104,28 %

pada tahun 2021 dengan predikat “**Baik Sekali**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat dan Pengurangan Kawasan Kumuh disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3.15

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Dan Pengurangan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Rumah Layak Huni	79,77	83,15	104,23	80,51	83,96	104,28	103,33
Rata-Rata Capaian		104,23			104,28			

Sumber : DISPERKIM Kab.Jepara, 2021

12.1. Persentase Rumah Layak Huni

Realisasi kinerja persentase rumah layak huni di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 mencapai 104,28 % melampaui sebesar 0,05% dari target 2020 sebesar 104,23%. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 104,28% telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang sebesar 103,33 %. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 104,23%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD yang sebesar 81,25, maka realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 ini sudah mencapai 103,33%.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani sebanyak 2.152 unit atau sebesar 3,68% dari target yang ditetapkan sebanyak 2.000 unit/tahun. Sedangkan dibandingkan Secara kumulatif penyediaan rumah layak huni sampai dengan tahun 2019 sebanyak 231.584 unit dari target sebanyak 289.546 unit atau sebesar 79,98%. Berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara yang mendukung pemenuhan rumah layak huni tahun 2021:

- 1) Penunjang Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan

- ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan Bansos RTLH yang bersumber dari dana APBN. Realisasi Bansos RLTH dari kegiatan BSPS sebanyak 400 unit.
- 2) Penunjang Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan penunjang Bansos RTLH yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten. Tahun 2021 kegiatan ini dapat merealisasikan Penanganan RTLH sebanyak 983 unit.
 - 3) Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan penunjang Bansos RTLH yang bersumber dari Dana APBD Provinsi. Realisasi jumlah RTLH yang ditangani melalui APBD Provinsi tahun 2021 sebanyak 552 unit.
 - 4) Pembuatan SimRTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Kabupaten Jepara.
Kegiatan ini menghasilkan aplikasi berupa SimRTLH yang berfungsi sebagai database perumahan, yang digunakan untuk penanganan dan monitoring serta pengendalian Bansos RTLH yang telah dilakukan.
 - 5) Penunjang Pengelolaan Rusun dan Rusus. Merupakan kegiatan rutin untuk menunjang pengelolaan rusunawa, kegiatan rehab Rusunawa Jobokuto, dan penataan lingkungan rumah nelayan Kedungmalang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi *backlog*, rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Kabupaten Jepara.

13. Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 84,75 % pada tahun 2021 dengan predikat **"Baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.16
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Kualitas Kondisi Sanitasi dan Pemenuhan Air
Minum Layak Bagi Seluruh Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak	100	86,82	86,82	100	72,86	72,86	72,86
2.	Persentase Masyarakat yang dapat Mengakses Air Bersih	100	93,91	93,91	100	96,64	96,64	96,64
Rata-Rata Capaian				90,36			84,75	

Sumber : DISPERKIM Kab.Jepara, 2021

13.1. Persentase Rumah Tinggal yang Memiliki Sanitasi Layak

Capaian realisasi kinerja Persentase Rumah Tinggal yang memiliki sanitasi layak pada tahun 2021 mencapai 72,86% atau sekitar 1.107.124 jiwa dari jumlah penduduk yang memiliki sanitasi layak sebanyak 1.275.182 jiwa. Capaian kinerja tahun 2021 belum sesuai target yang telah ditentukan, yaitu sebesar 100,00%. Realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 86,82% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Capaian di tahun 2020 naik sebesar 14,27% dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,55%. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2021 ini masih kurang 27,14%.

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target Rumah Tinggal yang memiliki sanitasi layak adalah:

1. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan sarana prasarana sanitasi yang terbangun;
2. Kesulitan Penyediaan lahan/lokasi yang dihibahkan untuk pembangunan sarana prasarana sanitasi;
3. Sistem Pengelolaan yang tidak bagus sehingga ada beberapa sarana prasarana sanitasi yang tidak berfungsi;
4. Lokasi/lahan yang ditunjuk tidak representatif sehingga asas manfaat tidak maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak, antara lain:

1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Jepara sumber dana dari DAK Penugasan, dengan realisasi terbangun MCK ++ sebanyak 5 paket dan tanki septic skala individual sebanyak 3 paket;
2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Jepara sumber dana dari DAK Reguler, yang dilaksanakan pada 12 paket, dengan penerima manfaat sebanyak 600 unit rumah tinggal;
3. Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat tersebar di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara, terbangun sebanyak 5 lokasi dari tagert sebanyak 3 lokasi, terealisasi sebanyak 4 unit MCK komunal, 1 unit IPAL dan 1 unit sumur bor.

13.2. Persentase Masyarakat yang Dapat Mengakses Air Bersih

Capaian realisasi kinerja Persentase Masyarakat yang dapat Mengakses Air Bersih pada tahun 2021 mencapai 96,64% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya menjadi 96,64 %. Sedangkan pada tahun 2020 realisasi mencapai 93,91 % dari target 100 %. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 100%, realisasi capaian tahun 2021 ini masih kurang 3,36 %. Hal yang menyebabkan tidak tercapainya target ini adalah :

1. Pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak sebanding dengan sarana prasarana air minum yang terbangun.
2. Letak Topografi daerah yang kesulitan untuk membangun sarana dan prasarana air minum.

3. Beberapa daerah yang kesulitan menemukan sumber air baku.

Langkah tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam meningkatkan persentase rumah tinggal yang dapat mengakses air bersih, antara lain :

1. Perencanaan dan pengawasan kegiatan program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
2. Sosialisasi penyediaan air minum lingkungan permukiman di Kabupaten Jepara.
3. Pengadaan sarana airbersih.
4. Pendampingan kegiatan hibah air minum pedesaan.
5. Peningkatan infrastruktur air minum dan airbersih.
6. Penunjang Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat).

14. **Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 124,41 % pada tahun 2021 dengan predikat **"Sangat Baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan dan Jembatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Kualitas Jalan Dan Jembatan Melalui Pembangunan Serta Rehabilitasi Jalan Dan Jembatan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	71,8	76,46	106,49	70,78	88,06	124,41	115,09
Rata-Rata Capaian		106,49			124,41			

Sumber: DPUPR Kabupaten Jepara, 2021

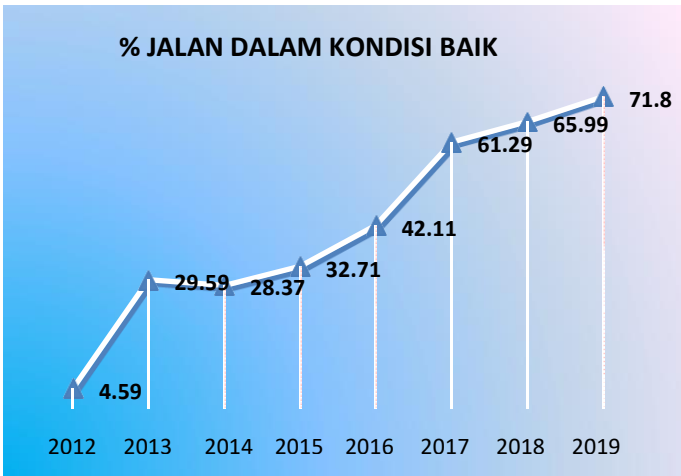
14.1. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 mencapai 88,06 %, bila dibandingkan dengan target yang 70,78 %, maka capaian kinerjanya sebesar 124,41%. Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang sebesar 76,51%, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 ini telah mencapai 115,09 %.

Pemerintah Kabupaten Jepara berusaha untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan terus meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Pada tahun 2012 panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 4,59 % dan tahun 2016 mengalami peningkatan mencapai 42,11% dari total panjang jalan kabupaten jalan kabupaten 872,142 km. Hal ini berarti masih ada 57,89 % jaringan jalan kabupaten dalam kondisi rusak (kondisi sedang, rusak, dan rusak berat) dari total keseluruhan panjang jalan. Berikut gambaran pertumbuhan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Jepara sejak 2012 hingga 2021.

Grafik 3.17

Persentase Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara



Sumber : DPUPR Kab.Jepara 2021

15. **Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Jaringan Irigasi**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi dengan 1 (satu) indikator kinerja utama mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 100,93 % pada tahun 2021 dengan predikat **“Baik Sekali”**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Persentase Jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	23,00	96,89	100,26	23,41	23,63	100,93	99,28
Rata-Rata Capaian		100,26			100,93			

Sumber : DPUPR Kabupaten Jepara, 2021

15.1. Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal. Ditandai dengan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 9,82 m/ha. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 21,9 % pada tahun 2018. Capaian realisasi kinerja Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 mencapai 23,63 %. Capaian ini telah melampaui target yang sebesar 23,41 %, sehingga capaian kinerjanya menjadi 100,93 %. Bila dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode RPJMD di tahun 2022 yang sebesar 23,8 %, realisasi capaian tahun 2021 ini telah mencapai 99,28 %.

16. **Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

Hasil capaian Kinerja sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, tetapi baru 1 indikator yang bisa dinilai dengan mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 106,6 % dengan predikat **"Baik Sekali"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			CAPAIAN KINERJA THD TARGET AKHIR RPJMD (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	Proses Audit	-	100
2.	Nilai LKjIP	B	B	100	BB	Proses Evaluasi	-	
3.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	75,70	78,22	103,32	75,80	80,81	106,6	106,32
4.	Tingkat Maturiti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	2,9	98,75	4	Proses Evaluasi	-	-
Rata-Rata Capaian				101,03			106,6	

16.1. **Opini BPK**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor 167/S/XVIII.SMG/05/2021 Tanggal 20 Mei 2021 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020, Kabupaten Jepara mendapatkan Penghargaan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Prestasi ini merupakan yang ke sembilan kali berturut-turut didapatkan Kabupaten Jepara. Sedangkan opini untuk tahun anggaran 2021 hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih belum bisa diketahui karena pada saat laporan ini disusun masih dalam proses audit. Namun melihat rekam jejak prestasi yang diraih selama ini besar harapannya untuk tahun 2021 juga akan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mempertahankan status tersebut yaitu :

- a. Penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi akibat adanya beberapa perubahan regulasi yang dilakukan pemerintah;
- b. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah daerah.

16.2. **Nilai LKjIP**

Secara umum nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jepara sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami tren peningkatan yang positif. Dari tahun 2012 nilai AKIP Kabupaten Jepara yang hanya 39,84 atau kategori C dan turun 0,27 poin menjadi 39,57 pada tahun 2013, secara bertahap naik hingga pada LKjIP tahun 2016 nilainya menjadi 55,61 atau kategori CC, dan pada tahun 2017 nilai LKjIP Kabupaten Jepara telah mencapai 60,31 atau kategori B. Terakhir, hasil

penilaian SAKIP Kabupaten Jepara Tahun 2018 memperoleh nilai 63,17 dengan kategori B

Pelaksanaan Reformasi birokrasi mengacu pada Perpres RI No 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 yang kemudian dituangkan dalam Permenpanrb Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, memberikan pelayanan prima pada publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang nilai-nilai dasar dan kode etik ASN. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yaitu organisasi, tata laksana, Peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan pola pikir (mindset), serta budaya kerja aparatur

Area akuntabilitas sebagai salah satu pengungkit reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat strategis. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai sarana untuk mempercepat reformasi birokrasi karena di dalam sistem akuntabilitas, definisi kinerja harus jelas termasuk di dalamnya ukuran kinerja. Kinerja yang jelas dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan proses bisnis yang kemudian dapat disusun struktur organisasi dan manajemen SDM. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang diharapkan

adalah akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat ditandai dengan : (1) Perencanaan pembangunan semakin responsif sesuai kebutuhan masyarakat, transparan, partisipatif, tepat waktu dan akuntabel; (2) Penggunaan anggaran semakin akuntabel dan transparan; (3) Belanja aparatur yang semakin proporsional; (4) Belanja Publik yang semakin dominan; serta (5) Perumusan kebijakan publik semakin responsif sesuai kebutuhan, transparan dan partisipatif

Dalam rangka meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kabupaten Jepara secara serius melakukan perbaikan – perbaikan yang diperlukan. Dengan belajar dari periode RPJMD sebelumnya, pada periode RPJMD 2017-2022 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara meneliti dengan seksama dokumen – dokumen perencanaan lainnya sehingga bisa selaras dengan RPJMD serta

penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang "*SMART*". Selain itu, saat ini juga telah dibangun suatu sistem aplikasi *E-SAKIP* Kabupaten Jepara guna pencapaian akuntabilitas kinerja yang lebih baik

16.3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Nilai Survey kepuasan masyarakat pada tahun 2021 menunjukkan nilai sebesar 80,81, sehingga capaiannya sebesar 106,6 %. Pada Tahun 2018 Kabupaten Jepara telah menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat pada semua organisasi perangkat daerah (42) dan 11 kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyusun nilai kepuasan masyarakat sebagai salah satu parameter penyelenggaraan pemerintahan khusus pada aspek kualitas pelayanan publik

Pemerintah Kabupaten Jepara terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima dengan mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Jepara.
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pola Perijinan Terpadu Penanaman Modal.
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
7. Keputusan Bupati Jepara Nomor 502/4 tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Perijinan Kabupaten Jepara.
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/92 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pegaduan Permasalahan Perijinan Penanaman Modal Kabupaten Jepara Tahun 2015.

9. Mulai tahun 2012 telah diterapkan Sistem Standar Mutu *ISO 9001: 2008* hingga akhir tahun 2015 di Jepara.
10. Penyelenggaraan lomba pelayanan publik yang dilaksanakan tiap tahun.

16.4. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Mulai tahun 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing. Hal ini dipicu oleh target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2014-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa “tingkat kematangan implementasi SPIP” ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai instansi pembina SPIP telah menetapkan pedoman melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk Kabupaten Jepara sendiri nilai yang diperoleh mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada level 2, kemudian pada kurun waktu tahun 2018/2019 berdasarkan Surat dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQA-88/PW11/3.1/2018 Tanggal 18 Maret 2019 perihal Laporan Pelaksanaan Reviu atas Hasil *Self Assessment* Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Jepara, nilai Maturitas SPIP Kabupaten Jepara bisa mencapai level 3 dengan nilai 3,1489, namun karena ada penurunan sub unsur kepemimpinan yang kondusif dari level 5 ke level 2, dengan pertimbangan bahwa implementasi terkait kepemimpinan yang kondusif belum memadai yang ditunjukkan dengan adanya permasalahan hukum kepala daerah yang ditangani KPK terkait penetapan Bupati Jepara sebagai tersangka dalam kasus suap kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang maka level maturiti SPIP Kabupaten Jepara kembali turun ke level 2, yaitu dengan nilai 2,9625.

Meski demikian, Kabupaten Jepara secara konsisten akan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sehingga nilai SPIP menjadi skala 3 pada akhir periode RPJMD akan tercapai.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

I. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A. Urusan Pertanian dan Urusan Pangan (DKPP Kabupaten Jepara)

• **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
- b. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

• **Dasar Pelaksanaan Tugas**

- a. Nomor DIPA: SP DIPA- 018.04.4.039152/2021, Tanggal DIPA : 23 November 2020
- b. SK KPA Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No. 978.5/062/I/2021, Tanggal : 4 Januari 2021
- c. SK KPA Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No. 978.5/061/I/2021, Tanggal : 4 Januari 2021
- d. DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-018.08-0/2021, Tanggal : 23 November 2020

• **Program dan Kegiatan**

A. Program :

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Output : Kawasan Kelengkeng, Kawasan Durian, Kawasan Durian (PEN).

Rincian Kegiatan :

- Kawasan Kelengkeng

- ❖ Lokasi : Ds. Jerukwangi Kec. Bangsri, Ds. Damarwulan - Kec. Keling, Ds. Bringin - Kec. Batealit
- ❖ Anggaran : Rp290,500,000
- ❖ Realisasi : Rp266,435,604
- ❖ Capaian Kegiatan : bantuan bibit 6.000 btg, NPK, SP 36 dan Organik

- Kawasan Durian
 - ❖ Lokasi : Ds. Ngetuk, Ds. Somosari - Kec. Batealit, Ds. Kepuk - Kec. Bangsri
 - ❖ Anggaran : Rp172,000,000
 - ❖ Realisasi : Rp163,641,792
 - ❖ Capaian Kegiatan : bantuan bibit 3.000 btg, NPK dan Organik

- Kawasan Durian (PEN)
 - ❖ Lokasi : Ds. Rengging - Kec. Pecangaan, Ds. Ngasem - Kec. Batealit, Ds. Bantrung - Kec. Batealit
 - ❖ Anggaran : Rp330,000,000
 - ❖ Realisasi : Rp285,885,752
 - ❖ Capaian Kegiatan : bantuan bibit 3.000 btg, NPK, Dolomit, Tricoderma dan Organik

B. Program :

Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan :

Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Output : Fasilitasi Dan Pembinaan Masyarakat

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
- ❖ Anggaran : Rp180,480,000
- ❖ Realisasi : Rp163,200,000
- ❖ Capaian Kegiatan : Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian/ Penyuluh Pertanian PNS/Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP)

C. Program :

Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi

Kegiatan :

Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Output : Fasilitasi Dan Pembinaan Masyarakat

Rincian Kegiatan :

- ❖ Lokasi : SeKabupaten Jepara

- ❖ Anggaran : Rp119,040,000
- ❖ Realisasi : Rp119,040,000
- ❖ Capaian Kegiatan : Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian/THL-TB Penyuluh Pertanian/Fasilitasi Honor Dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL-TBPP

D. Program :

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kegiatan :

Output : Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan

Rincian Kegiatan :

- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
 - ❖ Lokasi : Muryolobo Nalumsari, Dorang Nalumsari, Tritis Nalumsari, Ngetuk Nalumsari, Mayong Kidul Mayong, Pelang Mayong, Guwosobokerto Welahan, Welahan Welahan, Bandungrejo Kalinyamatan, Batukali Kalinyamatan, Kaliombo Pecangaan, Krasak Pecangaan, Gerdu Pecangaan, Kedungleper Bangsri, Balong Kembang, Somosari Batealit, Ujungwatu Donorojo, Bendanpete Nalumsari, Sumanding Kembang
 - ❖ Anggaran : Rp 1,626,000,000
 - ❖ Realisasi : Rp 1,625,680,000
 - ❖ Capaian Kegiatan : RJIT : 15 Unit; Perpompaan Besar : 3 Unit; Embung Pertanian : 1 Unit
- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
 - ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
 - ❖ Anggaran : Rp 339,565,000
 - ❖ Realisasi : Rp 339,525,000
 - ❖ Capaian Kegiatan : Urea : 10.943 Ton, SP-36 : 419 Ton, ZA : 1063 Ton, NPK : 8542 Ton, Organik : 504 Ton
- Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
 - ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara

- ❖ Anggaran : Rp 16,048,000
 - ❖ Realisasi : Rp 16,048,000
 - ❖ Capaian Kegiatan : 1286.09 ha
- Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian
 - ❖ Lokasi : Banyumanis Donorojo, Tulakan Donorojo, Cepogo Kembang, Kelet Keling, Batukali Kalinyamatan, Pecangaan Wetan Pecangaan, Bringin Batealit, Kancilan Kembang, Bumiharjo Keling, Clering Donorojo, Karangaji Kedung, Sumosari Batealit, Tengguli Bangsri, Tengguli Bangsri, Kalipucang Wetan Welahan
 - ❖ Anggaran : Rp 80,400,000
 - ❖ Realisasi : Rp 79,730,000
 - ❖ Capaian Kegiatan : Optimasi Lahan Kering 500 Ha
 - Dukungan Manajemen
 - ❖ Lokasi : Kabupaten Jepara
 - ❖ Anggaran : Rp 91,000,000
 - ❖ Realisasi : Rp 90,960,100
 - ❖ Capaian Kegiatan : Pelaksanaan kegiatan Irigasi PSP

B. Urusan Pedagangan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara)

- **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Kementerian Perdagangan

- **Dasar Pelaksanaan Tugas**

Permendag No. 98 tahun 2020

- **Program dan Kegiatan**

- a. **Program** : Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

- Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan

Output : Terbangunnya sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan

Rincian Kegiatan :

- Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat

- ❖ Lokasi : Pasar Rakyat Kalinyamatan
- ❖ Anggaran : Rp. 4.000.000.000,-
- ❖ Realisasi : Rp. 3.223.048.671,-
- ❖ Capaian Kegiatan : Telah terbangunnya atau direvitalisasinya sebuah sarana perdagangan yaitu Pasar Rakyat Kalinyamatan.

C. Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Perikanan Kab. Jepara)

- **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- **Dasar Pelaksanaan Tugas**

- **UU No. 17 Tahun 2003**
- **UU No. 1 Tahun 2004**
- **UU No. 9 Tahun 2020**

- **Program dan Kegiatan**

Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Kegiatan :

- Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

Output :

- Sarana Pengembangan Kawasan

Rincian Kegiatan :

- Lahan garam yang difasilitasi

- ❖ Lokasi : Kecamatan Kedung
- ❖ Alokasi Anggaran : Rp. 213.055.000,-
- ❖ Realisasi : Rp. 212.995.450,-
- ❖ Realisasi Capaian Kegiatan :
 - Sosialisasi Operasional
 - Perencanaan Kegiatan

D. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasades Kabupaten Jepara)

- Bantuan Keuangan Khusus Desa

- **Dasar Pelaksanaan Tugas.**

Perbup Nomor 61 Tahun 2018

- Program :
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan :
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sub Kegiatan :
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- Sumber Dana : APBD Kabupaten
- Jumlah Anggaran : Rp. 47.392.000.000,-
- Realisasi : Rp. 4.192.000.000,-
- Permasalahan & Solusi : -

E. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Warga (Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Jepara)

- **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR)
- **Dasar Pelaksanaan Tugas**
 - **Perpres No.123 Tahun 2020**
 - **PMK No. 3/PK/2020**
 - **Permen PUPR No. 5 Tahun 2021**
- **Program dan Kegiatan.**
Program : Penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan :
 - Pembangunan rumah layak huni.
Output :
 - Berkurangnya rumah tidak layak huni dikawasan kumuh.**Rincian Kegiatan :**
 - Bantuan Peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh.
 - ❖ Lokasi : - Mulyoharjo 15 Unit
 - Ujung batu 20 Unit
 - Lebuawu 15 Unit
 - Potroyudan 15 Unit
 - Jobokuto 17 Unit
 - Saripan 15 Unit
 - Bulu 15 Unit.

- Pengkol 17 Unit
- Bapangan 15 Unit
- Panggang 15 Unit
- ❖ Alokasi Anggaran : Rp. 3.341.381.009,-
- ❖ Realisasi : Rp. 3.341.381.009,-
- ❖ Realisasi Capaian Kegiatan :
 - 159 Unit.

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH
DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021
(DKPP, Disperindag, Diskan, Dinsospermades, Disperkim)**

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.	a. Nomor DIPA: SP DIPA-018.04.4.03 9152/2021, Tanggal DIPA : 23 November 2020 b. DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor : DIPA-018.08-0/2021, Tanggal : 23 November 2020	A. Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Output : Kawasan Kelengkeng, Kawasan Durian, Kawasan Durian (PEN). Rincian Kegiatan : - Kawasan Kelengkeng - Kawasan Durian - Kawasan Durian (PEN)	Lokasi : Ds. Jerukwangi Kec. Bangsri, Ds. Damarwulan - Kec. Keling, Ds. Bringin - Kec. Batealit Lokasi : Ds. Ngetuk, Ds. Somosari - Kec. Batealit, Ds. Kepuk - Kec. Bangsri Lokasi : Ds. Rengging - Kec. Pecangaan, Ds. Ngasem - Kec. Batealit, Ds. Bantrung - Kec. Batealit	290,500,000 172,000,000 330,000,000	266,435,604 163,641,792 285,885,752		Bantuan Bibit 6.000 btg, NPK, SP 36 dan Organik Bantuan Bibit 3.000 btg, NPK dan Organik Bantuan Bibit 3.000 btg, NPK, Dolomit, Tricoderma dan Organik		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			B. Program : Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Kegiatan : Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Output : Fasilitasi Dan Pembinaan Masyarakat Rincian Kegiatan	Lokasi: Kabupaten Jepara	180,480,000	163,200,000		Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian/Penyuluh Pertanian PNS/Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP)		
			C. Program : Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Kegiatan : Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Output : Fasilitasi Dan Pembinaan Masyarakat Rincian Kegiatan	Lokasi : SeKabupaten Jepara	119,040,000	119,040,000		Insentif Kinerja Penyuluh Pertanian/THL-TB Penyuluh Pertanian/Fasilitasi Honor Dan Biaya		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			D. Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan : Output : Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan Rincian Kegiatan : - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Lokasi: Muryolobo Nalumsari, Dorang Nalumsari, Tritis Nalumsari, Ngetuk Nalumsari, Mayong Kidul Mayong, Pelang Mayong, Guwosobokerto Welahan, Welahan Welahan, Bandungrejo Kalinyamatan, Batukali	1,626,000,000	1,625,680,000		Operasional Penyuluh (BOP) THL- TBPP RJIT : 15 Unit; Perpompaa n Besar : 3 Unit; Embung Pertanian : 1 Unit		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Kalinyamatan, Kaliombo Pecangaan, Krasak Pecangaan, Gerdu Pecangaan, Kedungleper Bangsri, Balong Kembang, Somosari Batealit, Ujungwatu Donorojo, Bendanpete Nalumsari, Sumanding Kembang. Kabupaten Jepara	339,565,000	393,565,000		Urea : 10.943 Ton, SP-36 : 419 Ton, ZA : 1063 Ton, NPK : 8542		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Fasilitas Pembiayaan Pertanian - Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Lokasi: Kabupaten Jepara Lokasi: Banyumanis Donorojo, Tulakan Donorojo, Cepogo Kembang, Kelet Keling, Batukali Kalinyamatan, Pecangaan Wetan Pecangaan, Bringin Batealit, Kancilan Kembang, Bumiharjo Keling, Clering Donorojo,	16,048,000	16,048,000		Ton, Organik : 504 Ton 1286.09 ha		
					80,400,000	79,730,000		Optimasi Lahan Kering 500 Ha		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Dukungan Manajemen	Karangaji Kedung, Sumosari Batealit, Tengguli Bangsri, Tengguli Bangsri, Kalipucang Wetan Welahan Kabupaten Jepara	91,000,000	90,960,100		Pelaksanaa n kegiatan Irigasi PSP		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	DISPERINDA G (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kementerian Perdagangan	Permendag No. 98 tahun 2020	Program: Perdagangan Dalam Negeri; Kegiatan: Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Dan Kapasitas Logistik Perdagangan; Output: Terbangunnya sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan; Rincian Kegiatan : Pembangunan/revitalisas i pasar rakyat.	Pasar Rakyat Kalinyamatan	4.000.000.000	3.223.048.671		1 pasar		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	DISKAN (Dinas Perikanan) Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIPA Nomor : SP DIPA No. SP DIPA- 032.07.4.0395 07/2021	Program : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Kegiatan : Output : Rincian Kegiatan :	Lokasi : Kabupaten Jepara	213.055.000	212.995.460	80,58			
4.	DISPERKIM (Dinas Perumahan dan Permukiman) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Perpres No.123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK TA.2021 2. PMK No. 3/PK/2020 Tentang Panduan Rivew Laporan Realisasi DAK 2021 3. Permen PUPR No.5 Tahun 2021 Tentang Juknis Pelaksanaan	Program: DAK Fisik Penugasan Perumahan dan Permukiman Perumahan dan Permukiman (Penanggulangan Kemiskinan) Kegiatan : Pembangunan Rumah Layak Huni Output : berkurangnya rumah tidak layak huni di kawasan kumuh Rincian Kegiatan : Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh	Lokasi : 1. Mulyoharjo 15 unit 2. Ujungbatu 20 unit 3. Lebawu 15 unit 4. Potroyudan 15 unit 5. Jobokuto 17 unit 6. Saripan 15 unit 7. Bulu 15 unit 8. Pengkol 17 unit 9. Bapangan 15 unit	3.341.381.009	3.341.381.009		159 unit		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa tengah	DAK Infrastruktur PUPR Tahun 2021 SK KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No. 978.5/062/I/20 21, Tanggal : 4 Januari 2021 SK KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah No. 978.5/061/I/20 21, Tanggal : 4 Januari 2021	A. Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan : Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Output : Kawasan Kelengkeng, Kawasan Durian, Kawasan Durian (PEN). Rincian Kegiatan : - Kawasan Kelengkeng - Kawasan Durian - Kawasan Durian (PEN)	10. Panggang 15 unit Total 159 unit Lokasi : Ds. Jerukwangi Kec. Bangsri, Ds. Damarwulan - Kec. Keling, Ds. Bringin - Kec. Batealit Lokasi : Ds. Ngetuk, Ds. Somosari - Kec. Batealit, Ds. Kepuk - Kec. Bangsri Lokasi : Ds. Rengging - Kec. Pecangaan, Ds. Ngasem - Kec. Batealit, Ds. Bantrung - Kec. Batealit	290,500,000 172,000,000 330,000,000	266,435,604 163,641,792 285,885,752	100	Bantuan Bibit 6.000 btg, NPK, SP 36 dan Organik Bantuan Bibit 3.000 btg, NPK dan Organik Bantuan Bibit 3.000 btg, NPK, Dolomit, Tricoderma dan Organik	100	Permasalahan: Terjadi keterlambatan pekerjaan Solusi : Penambahan waktu pekerjaan

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			D. Program : Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan : Output : Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan Rincian Kegiatan : - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Lokasi: Muryolobo Nalumsari, Dorang Nalumsari, Tritis Nalumsari, Ngetuk Nalumsari, Mayong Kidul Mayong, Pelang Mayong, Guwosobokerto Welahan, Welahan Welahan, Bandungrejo Kalinyamatan, Batukali Kalinyamatan, Kaliombo Pecangaan, Krasak Pecangaan,	1,626,000,000	1,625,680,000		TBPP RJIT : 15 Unit; Perpompaa n Besar : 3 Unit; Embung Pertanian : 1 Unit		

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.	Gerdu Pecangaan, Kedungleper Bangsri, Balong Kembang, Somosari Batealit, Ujungwatu Donorojo, Bendanpete Nalumsari, Sumanding Kembang. Lokasi: Kabupaten Jepara	339,565,000	393,565,000		Urea : 10.943 Ton, SP-36 : 419 Ton, ZA : 1063 Ton, NPK : 8542 Ton, Organik : 504 Ton 1286.09 ha		-

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. - Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Lokasi: Kabupaten Jepara Lokasi: Banyumanis Donorojo, Tulakan Donorojo, Cepogo Kembang, Kelet Keling, Batukali Kalinyamatan, Pecangaan Wetan Pecangaan, Bringin Batealit, Kancilan Kembang, Bumiharjo Keling, Clering Donorojo, Karangaji Kedung, Sumosari	16,048,000	16,048,000		Optimasi Lahan Kering 500 Ha		
					80,400,000	79,730,000				

No	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan dan solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- Dukungan Manajemen	Batealit, Tengguli Bangsri, Tengguli Bangsri, Kalipucang Wetan Welahan Lokasi: Kabupaten Jepara	91,000,000	90,960,100		Pelaksanaa n kegiatan Irigasi PSP		

TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN (PENUGASAN)
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes Kabupaten Jepara)

No	URUSAN	Dasar Pelaksanaan Penugasan	Program, Kegiatan, Output, Rincian kegiatan	lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Permasalahan & solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	DINSOSPERMADES (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat) Kabupaten Jepara	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018.	Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.	Lokasi : Kabupaten Jepara	47.392.000.000	47.392.000.000				

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berikut adalah capaian dari OPD Pengampu Kegiatan SPM di Kabupaten Jepara Tahun 2022 sesuai Renstra 2017-2022 di masing-masing OPD, yang dihimpun oleh bagian Pemerintahan Setda Jepara selaku sekretaris dalam susunan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Jepara.

1. Bidang Urusan Pendidikan

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten terdiri atas:

- 1. pendidikan anak usia dini;
- 2. pendidikan dasar; dan
- 3. pendidikan kesetaraan.

B. TARGET CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Berikut adalah target capaian SPM di Kabupaten Jepara pada tahun 2021 :

**Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	JUMLAH APBD TAHUN 2021
1.	Pendidikan Anak Usia Dini.	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	38.939	38.939	100%	33.540.862.000
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	176.158	176.158	100%	115.574.610.487

		dasar				
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	235.677	2.554	100%	53.859.404.000

Tabel 2.2 Rencana Capaian dan Indikator Penerima Layanan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1. 1 Perlengkapan dasar peserta didik, meliputi: BUKU GAMBAR & ALAT MEWARNAI 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 2. Didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan: a. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan b. kewajiban pemenuhan beban mengajar, c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum 3. Didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.	38.939	33.540.862.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		4. a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 5. a. sertifikat pendidik; dan b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang		
2.	Pendidikan Dasar	1. Perlengkapan dasar peserta didik, meliputi: BUKU GAMBAR & ALAT MEWARNAI 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 2. Berdasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, b. kewajiban pemenuhan beban mengajar, dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum 3. Berdasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.	176.158	115.574.610.487

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		4. a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 5. a. sertifikat pendidik; dan b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang		
3.	Pendidikan Kesetaraan	1. Perlengkapan Dasar Peserta Didik, meliputi : MODUL BELAJAR & PERLENGKAPAN BELAJAR 1 (satu) paket Modul Belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 2. Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan 3. Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan: a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program 4. a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan ; dan	2.554	53.859.404.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan 5. Kualitas pendidik : paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) 6. Kualitas tenaga kependidikan: a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat		

C. REALISASI CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	CAPAIAN (6): (4)X 100%
1	2	3	4	5	6	7	8

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	CAPAIAN (6): (4)X 100%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	38.939	33.540.862.000	29.458	19.429.775.167	75,65 %
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	176.158	115.574.610.487	167.593	111.434.704.564	95,14 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.554	53.859.404.000	1.623	49.010.695.250	63,55 %

Tabel 2.4 Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1.1 Perlengkapan dasar peserta didik, meliputi: BUKU GAMBAR & ALAT MEWARNAI	38.939	29.458	75,65 %	19.429.775.167

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 2. Didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan: a. Jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan b. kewajiban pemenuhan beban mengajar, c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum 3. Didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		4. a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 5. a. sertifikat pendidik; dan b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang				
2.	Pendidikan Dasar	1. Perlengkapan dasar peserta didik, meliputi: BUKU GAMBAR & ALAT MEWARNAI 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per	176.158	167.593	95,14 %	111.434.704.564

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI I	(%)	ANGGARAN
		semester 2. Didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan: a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan, b. kewajiban pemenuhan beban mengajar, dan c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum 3. Didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan: a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan. 4. a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		5. a. sertifikat pendidik; dan b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang				
3.	Pendidikan Kesetaraan	1. Perlengkapan Dasar Peserta Didik, meliputi : MODUL BELAJAR & PERLENGKAPAN BELAJAR 1 (satu) paket Modul Belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester 2. Jenis pendidik merupakan tutor pendidikan kesetaraan 3. Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan:	2.554	1.623	63,55 %	49.010.695.250

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan; b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program 4. a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan ; dan b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan 5. Kualitas pendidik : paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) 6. Kualitas tenaga kependidikan: a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat				

D. Dukungan Personil

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	29.458	Bidang Paud : 9 Penilik : 52 Guru Paud/Tk : 4.272
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	167.593	Bidang SD,SMP : 16 Guru SDM, SMP : 6.680 Pengawas : 44
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1.623	Bidang PNF/ Seksi Kesetaraan = 7 Pendidik = 133

E. Alokasi Anggaran

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKALTUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	33.540.862.000
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	115.574.610.487

3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	53.859.404.000

F. Dampak

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	Meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan anak usia dini dibarengi dengan upaya terus menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas sampai ke desa-desa
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh jenjang pendidikan dasar yang ada Kabupaten Jepara, Perwujudan aksesibilitas pendidikan tidak hanya ditempuh dengan membangun sarana dan prasarana pendidikan tetapi juga menyiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk mengakses pendidikan dan mendorong agar memiliki semangat/ motivasi yang kuat dalam menempuh pendidikan di setiap jenjang pendidikan
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7– 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Mewujudkan aksesibilitas dan relevansi pendidikan formal dengan kebutuhan pendidikan keagamaan dan non formal lainnya, Hak masyarakat untuk memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan yang sama harus diberikan meskipun tidak melalui jalur pendidikan formal sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang berkarakter yang siap ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan sumber daya manusia

			dari daerah lain

G. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	38.939 Murid	38.939 Murid	38.939 Murid	38.939 Murid	75,65 %	Belum Tercapai
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	176.158 Murid	176.158 Murid	176.158 Murid	176.158 Murid	95,14 %	Belum Tercapai
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18	2.554 Murid	2.554 Murid	2.554 Murid	2.554 Murid	63,55 %	Belum Tercapai

		tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						

H. Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan paud	Tenaga pendidikan yang berinovasi untuk model pembelajaran masih terbatas;	Mendorong Tenaga pendidikan untuk berinovasi tentang model pembelajaran dan menambah event-event lomba yang berkaitan inovasi pendidikan (inobel);
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang berkualitas belum maksimal	Meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai kualifikasi akademik dan kompetensi
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Penyelenggaraan pendidikan non formal belum maksimal	Mensinergikan kurikulum pendidikan formal dengan kurikulum pendidikan non formal keagamaan dan non formal life skill yang mampu membetengi dan menghasilkan para siswa yang handal untuk dapat hidup dilingkungan sosial yang berdaya saing tinggi di tengah arus teknologi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				informasi tanpa batas.

2. Bidang Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh pemerintah. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil.
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
4. Pelayanan kesehatan balita.
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
11. Pelayanan kesehatan orang terduga TB.
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Berikut merupakan tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan tahun 2021. Berdasarkan tabel dibawah ini, target (jumlah orang yang akan terlayani) juga mendapatkan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasarnya sesuai dengan rencana target target (jumlah orang yang akan terlayani).

**Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	JUMLAH APBD TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.465	21.465	21.465	28.633.947.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	19.425	19.425	19.425	41.222.522.500
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.437	19.437	19.437	18.571.136.000
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	96.961	96.961	96.961	21.079.591.000
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	40.216	40.216	40.216	16.512.068.000
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan	787.287	787.287	787.287	28.034.230.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	JUMLAH APBD TAHUN 2021
		kesehatan				
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	127.316	127.316	127.316	7.518.530.000
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	360.858	360.858	360.858	5.511.609.000
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	30.525	30.525	30.525	8.504.500.000
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.161	2.161	2.161	4.519.489.000
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3.787	3.787	3.787	9.035.758.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	JUMLAH APBD TAHUN 2021
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	25.479	25.479	25.479	12.094.297.940

Tabel 2.2 Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td)	21.465	28.633.947.000
		2 . Tablet Tambah Darah		
		3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin		
		4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu		
		5 . Buku KIA		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 . Formulir Fotograf	19.425	41.222.522.500
		2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)		
		3 . Buku KIA		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 . Vaksin Hepatitis BO	19.437	18.571.136.000
		2 . Vitamin K1 Injeksi		
		3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik		
		4 . Formulir Bayi Baru Lahir		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		5 . Formulir MTBM		
		6 . Buku KIA		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	96.961	21.079.591.000
		2 . Formulir DDTK		
		3 . Buku KIA		
		4 . Vitamin A Biru		
		5 . Vitamin A Merah		
		6 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT - HB -Hib * Campak Rubell		
		7 . Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella		
		8 . Jarum Suntik dan BHP		
		9 . Peralatan Anafilaktik		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 . Buku Raport Kesehatanku	40.216	16.512.068.000
		2 . Buku Pemantauan Kesehatan		
		3 . Kuesioner Skrining Kesehatan		
		4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah		
		5 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	787.287	28.034.230.000
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia	127.316	7.518.530.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2 . Tensimeter 3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	360.858	5.511.609.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	30.525	8.504.500.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM		
		3 . Pedoman dan Media KIE		
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2.161	4.519.489.000
		2 . Kit berisi 2 alat fiksasi		
		3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan		
		4 . Media KIE		
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 . Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	3.787	9.035.758.000
		2 . Reagen Zn TB		
		3 . Masker jenis rumah tangga dan masker N95		
		4 . Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering		
		5 . Catridge tes cepat molekuler		
		6 . Formulir pencatatan dan pelaporan		
		7 .Pedoman/Standar Operasional Prosedur		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
12	Pelayanan Kesehatan pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV	1 . Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama 3 . Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK)	25.479	12.094.297.940

C. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi yang telah berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu	Jumlah ibu hamil yang mendapat	21.465	28.633.947.000	21.465	25.998.916.200	100,00

NO	JENIS PELAYANA	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAI
	Hamil	atikan layanan kesehatan					
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	19.425	41.222.522.500	19.425	36.770.713.100	100,00
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.437	18.571.136.000	19.437	14.195.705.600	100,00
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	96.961	21.079.591.000	91.464	15.610.297.000	94,33
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	40.216	16.512.068.000	32.969	13.548.146.000	81,30
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan	787.287	28.034.230.000	712.779	20.566.595.000	90,54

NO	JENIS PELAYA	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAI
		kesehatan					
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	127.316	7.518.530.000	121.027	6.309.026.000	95,06
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	360.858	5.511.609.000	292.630	4.047.236.300	81,09
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	30.525	8.504.500.000	26.274	6.340.288.100	86,07
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.161	4.519.489.000	2.105	3.346.770.400	97,41

NO	JENIS PELAYA	INDIKATO R CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAI
		an					
11.	Pelaya nan Keseha tan orang terdug a tuberku losis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkul osis yang mendap atkan layanan kesehat an	3.787	9.035.75 8.000	3.741	8.026.0 96.250	98,79
12.	Pelaya nan Keseha tan orang dengan resiko terinfeks i virus yang melema hkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeks i virus yang melema hkan daya tahan manusia (HIV)	25.479	12.094.2 97.940	25.479	10.620. 626.180	100,00

**Tabel 2.4 Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYA NAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLA H ORANG YANG AKAN DILAYA NI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLA H ORANG YANG TERLA YANI	(%)	A ANGGAR AN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayan an	1. Vaksin Tetanus Difetri (Td)	21.465	21.465	100	25.998.91 6.200

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
	kesehatan pada ibu hamil	2 . Tablet Tambah Darah				
		3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin				
		4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu				
		5 . Buku KIA				
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	1 . Formulir Fotograf	19.425	19.425	100	36.770.713.100
		2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)				
		3 . Buku KIA				
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1 . Vaksin Hepatitis BO	19.437	19.437	100	14.195.705.600
		2 . Vitamin K1 Injeksi				
		3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik				
		4 . Formulir Bayi Baru Lahir				
		5 . Formulir MTBM				
		6 . Buku KIA				
4.	Pelayanan kesehatan balita	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	96.961	91.464	94,33	15.610.297.000
		2 . Formulir DDTK				
		3 . Buku KIA				
		4 . Vitamin A Biru				
		5 . Vitamin A Merah				
		6 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG *				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell				
		7 . Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella				
		8 . Jarum Suntik dan BHP				
		9 . Peralatan Anafilaktik				
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1 . Buku Raport Kesehatanku	40.216	32.696	81,30	13.548.146.000
		2 . Buku Pemantauan Kesehatan				
		3 . Kuesioner Skrining Kesehatan				
		4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah				
		5 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	787.287	712.779	90,54	20.566.595.000
		2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	127.316	121.027	95,06	6.309.026.000
		2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)				
		3 . Buku Kesehatan Lansia				
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	360.858	292.630	81,09	4.047.236.300
		2 . Tensimeter				
		3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM				
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	30.525	26.274	86,07	6.340.288.100
		2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM				
		3 . Pedoman dan Media KIE				
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2.161	2.105	97,41	3.346.770.400
		2 . Kit berisi 2 alat fiksasi				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan				
		4 . Media KIE				
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	1 . Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	3.787	3.741	98,79	8.026.096.250
		2 . Reagen Zn TB				
		3 . Masker jenis rumah tangga dan masker N95				
		4 . Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering				
		5 . Catridge tes cepat molekuler				
		6 . Formulir pencatatan dan pelaporan				
		7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur				
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	1 . Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	25.479	25.479	100	10.620.626.180
		2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama				
		3 . Bahan medis habis pakai (handschoen, alkohol swab, plester, lancet/jarum steril, jarum spuit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai, alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		pelaksana, nomor KTP/NIK)				

Realisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tahun 2021 dari 12 (dua belas) indikator, yang mencapai target 100% atau lebih ada 4 (empat) indikator, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Adapun indikator yang mempunyai capaian >50% - <100% ada 8 (delapan) indikator yaitu pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus , pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, dan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis. Pencapaian terendah ada pada indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 81,09% akan tetapi sudah mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 41,46%. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga dilaksanakan sesuai mutu pelayanan dasar dari setiap indikatornya sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terdiri dari pegawai yang ada di Dinas Kesehatan dan UPTDnya yang meliputi RSUD, Puskesmas Instalasi Farmasi Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan. Kondisi per 31 Desember 2021 sebanyak 2.605 orang, yang terdiri dari 982 orang laki-laki dan 1.623 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	21.465	Tenaga kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit dengan rincian sebagai berikut : Dokter Spesialis : 43 Dokter Umum : 123 Dokter Gigi : 23 Apoteker : 36 Teknis Kefarmasian : 58 Bidan: 434 Perawat: 674 Nutrisisionis : 51 Kesehatan Masyarakat : 64 A T L M : 73 Sanitarian : 39 Teknik Biomedik: 23 Keterapian Fisik: 14 Keteknisian Medik: 113
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	19.425	
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	19.437	
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	91.464	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	32.696	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	712.779	
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	121.027	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	292.630	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	26.274	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.105	
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	3.741	
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	25.479	

- Berdasarkan kualifikasi pendidikan

NO	JABATAN	Jumlah	
		L	P
I	Tenaga Kesehatan		
	Dokter Spesialis	22	21
	Dokter Umum	48	75
	Dokter Gigi	3	20
	Apoteker	7	29
	Teknis Kefarmasian	10	48
	Bidan		434
	Perawat	254	420
	Nutrisionis	11	40
	Kesehatan Masyarakat	19	45
	A T L M	14	59
	Sanitarian	12	27
	Teknik Biomedik	16	7
	Keterampilan Fisik	5	9
	Keteknisian Medik	34	79

	Administrator Kesehatan	1	7
II	Tenaga Non Kesehatan		
	(JFU/ Pengadministrasi / Pengelola / Pengolah/ Kebersihan / Pengemudi)	493	270
III	Pejabat Struktural		
	Eselon II	0	1
	Eselon III.a	2	1
	Eselon III.b	6	3
	Eselon IV.a	14	15
	Eselon IV.b	11	13
	J U M L A H	982	1.623

- Berdasarkan golongan

NO	JABATAN	JUMLAH					
		2020			2021		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Pembina Utama (IV/e)	0	1	1	0	1	1
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	1	3	2	1	3
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	4	5	9	4	6	10
4.	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	14	21	20	34	54
5.	Pembina (IV/a)	38	52	90	32	51	83
6.	Penata Tingkat I (III/d)	92	21 5	307	81	21 9	300
7.	Penata (III/c)	57	12 5	182	64	18 4	248
8.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	80	24 3	323	68	21 1	279
9.	Penata Muda (III/a)	37	12 9	166	22	15 3	175
10.	Pengatur Tingkat I (II/d)	41	15 1	192	41	93	134
11.	Pengatur (II/c)	46	20 1	247	42	17 2	214
12.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	8	4	12	4	3	7
13.	Pengatur Muda (II/a)	0	2	2	0	1	1
14.	Juru (I/c)	1	0	1	1	0	1
15.	Pegawai Harian Lepas / Non PNS	49 6	40 9	905	60 1	49 4	1.095
	J U M L A H	90 9	1. 55 2	2.461	98 2	1. 62 3	2.605

E. Alokasi Anggaran

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKLATUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	28.633.947.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKLATUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
		kesehatan	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.222.522.500
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.571.136.000
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan	21.079.591.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKLATUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
			Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.512.068.000
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.034.230.000
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	7.518.530.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKLATUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
			Kabupaten/Kota	
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.511.609.000
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.504.500.000
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.519.489.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKLATUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.035.758.000
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yg melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.094.297.940

F. Dampak

Dampak/manfaat penerapan SPM adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Diketahuinya status kesehatan ibu pada saat kehamilan untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Diketahuinya status kesehatan ibu pada saat dan setelah persalinan untuk dapat dilakukan tindakan lebih lanjut

3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Meningkatnya bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan neonatal sesuai dengan standar
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Diketuainya pertumbuhan dan perkembangan balita melalui pemantauan, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Diketuainya status kesehatan anak usia pendidikan dasar melalui skrining kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Menurunnya faktor risiko dan deteksi dini penyakit menular serta penyakit tidak menular
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Meningkatnya kelompok usia lanjut yang sehat, aktif, mandiri, dan produktif
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Terpantaunya kondisi kesehatan pasien hipertensi dan meminimalisasi komplikasi penyakit degeneratif
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Terpantaunya kondisi kesehatan pasien DM dan meminimalisasi komplikasi penyakit degeneratif
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Ditemukannya penderita gangguan jiwa berat dan dilakukan tindak lanjut pengobatan sesuai tata laksana
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Terpantaunya kondisi orang terduga dan Menurunnya kasus baru dan penderita tuberkulosis

12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Terpantaunya kondisi orang dengan risiko terinfeksi dan Menurunnya kasus baru HIV/AIDS

G. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	94,33 %	Hampir Tercapai
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	81,30 %	Hampir Tercapai
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan	100%	100%	100%	100%	90,54 %	Hampir Tercapai

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
	Produktif	n layanan kesehatan						
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	95,06 %	Hampir Tercapai
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	81,09 %	Hampir Tercapai
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	86,07 %	Hampir Tercapai
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%	97,41 %	Hampir Tercapai
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	98,79 %	Hampir Tercapai

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

H. Permasalahan Dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Capaian sudah 100% dan semua kegiatan pelayanan terhadap ibu hamil di fasyankes di masa pandemi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan	Dengan adanya penggunaan <i>telemeditation</i> untuk pemeriksaan ibu hamil menjadikan pelayanan Kesehatan untuk ibu hamil tetap berjalan optimal di masa pandemi
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Capaian sudah 100% dan semua kegiatan pelayanan ibu bersalin di masa pandemi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan	Masih diperlukan upaya advokasi tempat khusus untuk persalinan bagi ibu hamil dengan COVID-19
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Capaian sudah 100% dan semua kegiatan pelayanan bayi baru lahir di masa pandemi dilaksanakan	Mempertahankan pelayanan yang sudah terlaksana dengan baik

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			dengan memperhatikan protokol kesehatan	
4.	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Capaian kegiatan belum bisa memenuhi target karena kunjungan balita ke posyandu tidak maksimal karena adanya pandemi COVID-19	Pelaksanaan posyandu dan kelas balita menerapkan protokol kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	KBM terbatas di sekolah selama masa pandemi	Skrining kesehatan dilakukan pada saat KBM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan Posbindu tidak dapat berjalan selama pandemi dan layanan di fasilitas kesehatan terbatas untuk pelayanan kegawatdaruratan saja	Kolaborasi dengan program vaksinasi COVID-19 sehingga semua sasaran usia produktif bisa dilakukan skrining kesehatan
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Pelayanan Posyandu lansia tidak dapat berjalan selama pandemi dan layanan di fasilitas kesehatan terbatas untuk pelayanan kegawatdaruratan saja	Kolaborasi dengan program vaksinasi COVID-19 melalui kunjungan rumah untuk vaksinasi kelompok usia lanjut
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Pengumpulan data pelayanan hipertensi pada fasyankes diluar puskesmas belum optimal	Meningkatkan kerjasama dengan fasyankes selain puskesmas untuk mendapatkan data layanan pasien hipertensi
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes	Pengumpulan data pelayanan Diabetes Mellitus di luar puskesmas belum optimal	Meningkatkan kerjasama dengan fasyankes selain puskesmas untuk mendapatkan data

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan		layanan pasien Diabetes Mellitus
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara penderita gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Terbatasnya kunjungan rumah dalam rangka pencarian kasus, hanya menunggu laporan dari kader saja	Optimalisasi peran kader kesehatan jiwa untuk penemuan kasus baru ODGJ dan tindak lanjut pengobatannya
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Terbatasnya kunjungan ke fasyankes dan kunjungan kader karena resiko penularan COVID-19 melalui droplet	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Capaian sudah memenuhi target yang ditetapkan	Mempertahankan kerjasama lintas program dan lintas sektoral yang sudah terlaksana dengan baik

Selama masa pandemi COVID-19, pelaksanaan program kesehatan dihadapkan pada persoalan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan esensial. Keseimbangan ini wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah pandemi COVID-19 usai. Pelayanan kesehatan esensial yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Pelayanan ini dilakukan untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Pada tahun 2021 capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jepara menunjukkan capaian yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 12 (dua belas) indikator SPM, terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target 100%, yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil, pelayanan kesehatan pada ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Sedangkan indikator lainnya mempunyai capaian >80% - <100%. Indikator tersebut antara lain pelayanan kesehatan pada balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebesar 93,72%.

Setelah dilaksanakan evaluasi terhadap implementasi SPM bidang kesehatan pada tahun 2021 ditemukan bahwa beberapa indikator belum maksimal. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya pelayanan kesehatan saat pandemi COVID-19 karena harus dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Meskipun begitu puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung, sehingga diperlukan penguatan dan inovasi dalam implementasi SPM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan minimal bagi masyarakat.

Sebagai langkah untuk meningkatkan capaian SPM di tahun berikutnya adalah penguatan peran puskesmas dalam upaya promotif-preventif, deteksi dan respon sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Selain itu diperlukan juga sinkronisasi kebijakan agar kualitas pelayanan yang lebih baik dengan sistem rujukan lebih tertata, sehingga Rumah Sakit selaku pemberi layanan kesehatan tingkat lanjutan dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

A. Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

B. Target Pencapaian SPM

Berdasarkan peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Dibawah ini merupakan tabel yang menyajikan target per jenis pelayanan dan mutu layanan dasar dengan anggaran Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021.

**Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH KK YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH KK YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2021
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (JP & BJP)	402.129	402.129	100%	19.978.642.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	402.129	402.129	100%	13.131.167.000

**Tabel 2.2 Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar
Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH KK YANG AKAN DILAYANI)	ANGGARAN 2021
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	305.330	-
		Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	96.799	Rp. 19.978.642.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	394.304	Rp. 12.381.167.000
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	7825	Rp. 750.000.000
		Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima :	300	Rp. 2.100.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH KK YANG AKAN DILAYANI)	ANGGARAN 2021
		masayarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T		

C. Realisasi

Realisasi merupakan target yang telah tercapai dalam perencanaan, berikut dibawah ini merupakan realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	402.129	Rp. 19.978.642.000	384.405	Rp. 19.978.642.000	95,59%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah	402.129 KK	Rp. 13.131.167.000	295.305 KK	Rp. 13.131.167.000	73,43%

NO	JENIS PELAYANA	INDIKATOR	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN
		domestik					

Tabel 2.4 Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH KK YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH KK YANG TERLAYAN I	%	ANGGARAN 2021
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	305.330	305.330	100	-
		Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	96.799	79.075	81,68	Rp. 19.978.642.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	394.304	290.260	73,61	Rp. 12.381.167.000
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas	7825	5345	68,30	Rp. 750.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH KK YANG AKAN DILAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH KK YANG TERLAYANI I	%	ANGGARAN 2021
		pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan				
		Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	300	300	100	2.100.000.000

D. Dukungan Personil

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH KK YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL

1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	384.405	36
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	295.305	45

Personil merupakan individu yang ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan. Jumlah personil untuk jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik diambil berdasarkan jumlah staf bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Jepara selaku pelaksana teknis kegiatan air minum ditambahkan dengan tenaga fasilitator bidang air minum dan sanitasi.

E. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Pekerjaan umum tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKALTUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.03.03.2.01	Rp. 18.978.642.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.03.05.2.01	Rp. 13.131.167.000

F. Dampak

Dampak atau manfaat penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum adalah sabagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM

1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Terpenuhinya kebutuhan air minum layak untuk masyarakat
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Terpenuhinya kebutuhan sanitasi aman untuk masyarakat

G. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	95,59%	Hampir Tercapai
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	100%	73,43%	Belum Tercapai

H. Permasalahan dan Solusi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Penyediaan	Jumlah	Dibeberapa wilayah	Dilakukan pengujian

	Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	sulit ditemukan mata air (daerah rawan air)	geolistrik dengan pengkajian serius
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga SPALD-T yang sudah ada	Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu mengelola dengan baik fasilitas SPALD-T

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan SPM dan solusi yang dihadirkan merupakan solusi yang dinilai cukup efektif untuk menangani permasalahan yang ada pada bidang pekerjaan umum. Tentunya permasalahan yang ada tidak akan dapat diselesaikan tanpa upaya bersama dari para stakeholder pelaksana SPM bidang Pekerjaan Umum.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam peraturan terbaru yakni Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, terdiri dari :

A. Jenis Pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

B. Target Pencapaian SPM

Target capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara adalah 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.1 Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2021

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPAT PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2021 (RP.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	36 Org	36 orang	100 %	855.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	75	75	100 %	2.625.000

Tabel 2.2 Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN (RP.000)

1	Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	36 Unit (36 Org)	855.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Penyediaan Rumah Layak Huni	75 orang	2.625.000

C. Realisasi

Realisasi capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.3 Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	
1	Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	36 Unit (36 Org)	855.000	36 Unit (36 Org)	855.000	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah	Jumlah Warga Negara	75	2.625.000	75	1.820.000	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	APBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021	
	yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					

Tabel 2.4 Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN (RP.000)
1	Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	36 Unit (36 Org)	36 Unit (36 Org)	100	855.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi	Penyediaan Rumah Layak Huni	75 orang	75 unit (75 orang)	100	1.820.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
				JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN (RP.000)
	masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten					

Pelaksanaan Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten sebanyak 36 unit (100%) yang pelaksanaannya ditahun 2021 (tahun berjalan) melalui Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang berada di BPKAD Kab. Jepara.

Sedangkan untuk pelaksanaan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 75 unit/orang dengan rincian tahapan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	IDENTIFIKASI PELAKSANAAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 2021			
		URAIAN		PELAKSANAAN (SUDAH/BELUM)	BENTUK PELAKSANAAN
1	FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1	Pengumpulan Data	SUDAH (100%)	Verifikasi Calon Penerima Bantuan Oleh Disperakim Prov. Jateng
		2	Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	identifikasi kerusakan dan besaran bantuan oleh Disperakim Prov. Jateng
		3	Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	penyusunan SK Gubernur Tentang Penerima Bantuan
		4	Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar	SUDAH (100%)	pencairan bantuan dari Pemprov. Jateng T ke Penerima Bantuan dan pembangunan Rumah

Terkait dengan uraian nomor 4 tentang pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang semula targetnya 75 penerima bantuan hanya dapat direalisasikan sebanyak 52 unit/orang sedangkan sisanya sebanyak 23 unit/orang

tidak dapat direalisasikan karena terkendala calon penerima bantuan tersebut tidak masuk data kemiskinan Kemensos (DTKS).

D. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara terdiri dari PNS dan PHL per 31 Desember 2021 sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	36 Unit (36 Org)	36 Unit (36 Org)	terdiri dari PNS dan PHL per 31 Desember 2021 sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 5 orang perempuan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Penyediaan Rumah Layak Huni	75 unit (75 orang)	75 unit (75 orang)	

• DAFTAR PNS

• NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLRU	JABATAN /ESELON
1	HARTAYA, ST, MM	196506061993091001	Pembina Tingkat I (IV/b)	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	HENING INDRATI, S.STP, MH.	198104241999122001	Pembina (IV/a)	KEPALA BIDANG PERUMAHAN
3	SRI AGUNG PRAMUDJI, SE	196807241993101001	Penata Tingkat I (III/d)	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Muda
4	AKHMAD AZWAR ANAS,	197905192005011007	Penata (III/c)	Teknik Tata Bangunan &

• NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLRU	JABATAN /ESELON
	S.T			Perumahan Muda
5	WIDI KRISMAHARDI, ST.,M.T.	198512292015021001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN
6	SYAFI'UL UMAM, S.T.	199411222019021004	Penata Muda (III/a)	Teknik Tata Bangunan & Perumahan Pertama
7	DWI ARISWATI, S.E.	197705292008012008	Penata Muda (III/a)	PENGELOLA KEUANGAN
8	ANANG PRIO PRAMBUDI	198702182015021001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	TEKNISI KECIPTAKARYAAN

• **DAFTAR TENAGA HARIAN LEPAS (THL)**

NO.	NAMA	BIDANG
1	SANTI ZUNITASARI, ST	Bidang Perumahan
2	WENDYASTUTI PANGESTUNING W. S.sos	Bidang Perumahan
3	SISKA WIDYA JILIANI, S.I,Kom	Bidang Perumahan
4	AHMAD SODIKIN, S.Kom, I	Bidang Perumahan
5	AKHMAD SAFII	Permakaman
6	M. NOOR SYAFI'I	Permakaman

E. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM perumahan rakyat pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten Jepara sebesar Rp. 855.000.000 (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah) dan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Rp. 1.820.000.000 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKLATUR PROGRAM	ANGGARAN (RP.000)
1	2	3	4	5	6

1	Penyediaan & rehab rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	855.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Penyediaan Rumah Layak Huni	Terpenuhinya jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.820.000

F. Dampak

Dampak/manfaat penerapan SPM adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni	

G. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan

N O .	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKAT OR PENCAPA IAN	TARG ET DLM RPJMD	TARG ET DLM RKPD	TARGE T DLM RENST RA	TARG ET DLM RENJ A	REALI SASI	STAT US CAPAI AN
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	36 orang	Tercapai
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	Tercapai

H. Permasalahan Dan Solusi

Terdapat dua jenis pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat, yaitu (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana Kabupaten dan (2) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Terkait dengan jenis pelayanan SPM yang pertama yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten, dilakukan pada saat masa pasca bencana dan diperlukan surat penetapan bencana dari Bupati karena dampak bencana meliputi lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota. Terkait dengan penetapan bencana dari Bupati terdapat permasalahan (1) belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana

daerah dan (2) perlu penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD (keselerasan bentuk bencana), solusi, dan rencana tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini.

Terdapat empat tahap penerapan SPM, yaitu: (1) pengumpulan data; (2) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (3) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (4) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Dikaitkan dengan korban bencana Kabupaten yang memiliki dampak bencana lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota, pada Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Jawa Tengah Tahun 2016-2020 yang termasuk di dalamnya adalah: (1) gelombang ekstrim dan abrasi; (2) tsunami; (3) letusan gunung Merapi; dan (4) letusan gunung Slamet. Dari data tersebut, kendala ada di pengumpulan data yang harus dilakukan secara terus menerus. Keterbatasan data ini menghambat pada penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, sehingga memunculkan permasalahan data yang belum diperbaharui. Solusi dan rencana tindak lanjut sebagaimana tabel di bawah ini.

PERMASALAHAN	SOLUSI	RECANA TINDAK LANJUT
A .PERENCANAAN		
- Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, Kabupaten, dan kabupaten/kota. - Belum ada koordinasi antara Disperkim dengan BPBD sehingga pengumpulan data korban bencana masih sulit. Pengumpulan data masih berasal dari proposal yang diajukan oleh desa yang terkena bencana	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, Kabupaten, dan kabupaten/kota	1. Perlu peraturan yang menetapkan tentang kriteria status bencana di daerah, khususnya bagi Kabupaten 2. Perlu koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang menangani bencana.
B. KOORDINASI		
- Perlu penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD (keselerasan	- Penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di	1. Perlu sinergitas atau Koordinasi antar OPD yang menangani kebencanaan

PERMASALAHAN	SOLUSI	RECANA TINDAK LANJUT
bentuk bencana). Indikator ini diharapkan dapat menunjukkan kewenangan dan masing-masing dan pelaksanaannya. - Belum ada mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.	BPBD.. - Adanya mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.	2. Perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang menjadi leading sector dalam penanganan bencana karena nanti berkaitan dengan bentuk penanganan yang dilakukan, misal: apakah pemerintah hanya menyediakan lahan relokasi untuk korban bencana atau sampai membangun rumah, atau justru hanya memfasilitasi saja 3. Perlu adanya mekanisme pengajuan permohonan bantuan saat bencana dikaitkan dengan keterlibatan kemampuan keuangan daerah.

Terkait dengan SPM yang kedua, yaitu fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :

PERMASALAHAN	SOLUSI	RECANA TINDAK LANJUT
A .PERENCANAAN		
- Pengumpulan data administrasi kependudukan penerima	- Koordinasi dengan Disdukcapil Kab.	- Pelaksanaan MOU bersama Disdukcapil

PERMASALAHAN	SOLUSI	RECANA TINDAK LANJUT
bantuan yang belum diperbaharui sehingga tidak sinkron dengan database yang ada didukcapil	Jepara	Kab. Jepara dalam rangka percepatan updating data kependudukan calon penerima bantuan
- Belum adanya data landbanking yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi	- Melaksanakan pendataan atau pencarian lahan yang sesuai dengan peruntukannya	- Melakukan kegiatan pendataan untuk landbanking perumahan dan permukiman
- Harga lahan yang tinggi dan tidak terjangkau oleh MBR (Penerima Bantuan)	- Fasilitasi negoisasi harga kepada pemilik lahan - Koordinasi dengan perbankan untuk bisa memberi pinjaman lunak kepada penerima bantuan	- Melakukan koordinasi kepada pemilik lahan - melakukan MOU dengan BKK Jepara
- Persyaratan penerima bantuan oleh provinsi yang harus masuk data kemiskinan (DTKS)	- Memasukkan data penerima bantuan ke DTKS - Mencari sumber lain selain dari anggaran APBD Provinsi	- Berkoordinasi dengan Dinsospermades Kab. Jepara dalam upaya percepatan pengusulan untuk dimasukkan dalam DTKS - Berkoordinasi dengan perusahaan untuk dapat memberikan CSR bagi penerima bantuan
- Pematangan lahan yang melibatkan banyak pihak seperti BPN, Warga sekitar pemilik lahan dan Pemdes	- Koordinasi secara intens	- Melaksanakan rakor secara berkesinambungan

PERMASALAHAN	SOLUSI	RECANA TINDAK LANJUT
B. KOORDINASI		
- Penyamaan persepsi. kepentingan dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan relokasi bagi MBR	- Membangun diskusi yang sehat dan berkesinambungan	- Penyelenggaraan rakor disetiap tahapan
C. PELAKSANAAN		
- Keterlambatan waktu penyediaan material oleh kontraktor yang telah ditunjuk oleh Disperakim Prov	- Koordinasi dengan Disperakim Provinsi	- Koordinasi dengan Disperakim Provinsi
- Kesiapan swadaya penerima bantuan	- Melakukan diskusi dengan penerima bantuan	- Melakukan diskusi dengan penerima bantuan
- Jaringan listrik belum tersedia sampai dilokasi	- Berkoordinasi dengan PLN	- Membuat surat ajuan dan pertemuan kepada PLN Regional Kudus untuk dapat memasang jaringan listrik sampai kelokasi

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi dalam penanganan masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasarnya untuk urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat terdiri atas :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

dengan indikator pencapaian :

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kabupaten Jepara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum, meliputi :
 - Standar Operasional Satpol PP;
 - Standar Sarana Prasarana Satpol PP;
 - Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat; dan
 - Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebencanaan meliputi :
 - Prosedur Operasional Penanggulangan Bencana;
 - Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
 - Peningkatan kapasitas Personil/ Sumber Daya Manusia
 - Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- c. Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, mutu sub urusan kebakaran meliputi :
 - Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan;
 - Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
 - Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;

- Kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran
- Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang berdampak kebakaran

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100%. Sedangkan target capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel : 2.1. Target Capaian Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2021
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan perkara	5 orang	4.750.000
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.250.608 orang	-
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	125 orang	305.000.000
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.020 orang	210.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2021
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93 orang	255.710.000

Untuk penghitungan pembiayaan mutu pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.2. Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	5 orang	4.750.000
		warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan		
		Penegakan Perda sesuai SOP		
		Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar		
		Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar		
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Prosedur operasional penanggulangan Bencana, Sarana prasarana penanggulangan bencana,	1.250.608 Orang	-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		Peningkatan kapasitas personil / sumber daya manusia, Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana		
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Prosedur operasional penanggulangan Bencana, Sarana prasarana penanggulangan bencana, Peningkatan kapasitas personil / sumber daya manusia, Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	125 orang	305.000.000
4.	Pelayanan dan evakuasi korban bencana	Prosedur operasional penanggulangan Bencana, Sarana prasarana penanggulangan bencana, Peningkatan kapasitas personil / sumber daya manusia, Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	1.020 orang	210.000.000
5.	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	93 orang	255.710.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN
		Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		
		Sarana dan prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi		
		Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia		
		Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran		
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negarara yang berdampak kebakaran		

Target 100% dari seluruh jumlah warga masyarakat Kabupaten Jepara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Mindset indikator penerapan SPM pelayanan trantibumlinmas dalam Permendagri 100 Tahun 2018 adalah terbalik, yaitu apabila tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada maka SOP penegakan produk hukum daerah telah sesuai, dan apabila ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan produk hukum daerah bisa diartikan dua: 1) penegakan Perda dan Perkada menyimpang dari SOP, dan 2) ketika penegakan Perda dan Perkada sudah sesuai SOP namun ada warga Negara yang terkena dampak bisa disebabkan musibah yang tidak dapat dikendalikan atau diluar kemampuan manusia.

Untuk target capaian SPM pelayanan yang terkait dengan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan

layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga masyarakat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang terkena bencana. Sedangkan warga masyarakat yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah untuk penyelamatan dan evakuasi yang tertangani dalam waktu tanggap daerah layanan WMK.

C. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan. Realisasi tersebut meliputi realisasi capaian dan realisasi mutu pelayanan SPM.

Untuk realisasi capaian penerapan SPM dan realisasi mutu pelayanan SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.3. Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2021

N O	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	RAPBD 2021	JUMLAH ORANG YANG TERLAYA NI	APBD TAHUN 2021	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5 orang	4.875 .000	5 orang	-	100
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi	1.250.60 8 orang	-	1.250.60 8 Orang	-	100

N O	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN
		rawan bencana					
3.	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	125 orang	305.0 00.00 0	125 orang	288.415 .646	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.020 orang	210.0 00.00 0	1.020 orang	197.473 .087	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93 orang	255.7 10.00 0	93 orang	252.770 .012	100

Tabel 2.4. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum	warga negara yang memperoleh layanan kerugian materiil	Warga negara yang mendapat layanan kerugian materiil	5 orang	5 orang	100	-
		Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan, pengobatan	Warga Negara yang mendapat biaya kerugian dan pengobatan		-		-
		Penegakan Perda sesuai SOP	Adanya SOP		-		-
		Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai	Perda yang terkait Trantibumlinmas		-		-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		standar					
		Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	Sarana prasana penunjang penegakan Perda		-		-
2	Pelayanan informasi rawan bencana.	Prosedur operasional penanggulangan Bencana, Sarana prasarana penanggulangan bencana, Peningkatan kapasitas personil / sumber daya manusia, Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.250.608 orang	1.250.608 orang	100	-

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Prosedur operasional penanggulangan Bencana, Sarana prasarana penanggulangan bencana, Peningkatan kapasitas personil / sumber daya manusia, Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	125 Orang	125 orang	100	305.000.000
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban	Prosedur operasional penanggulangan Bencana, Sarana prasarana penanggulangan	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan	1.020 orang	1.020 orang	100	210.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
	bencana	n bencana, Peningkatan kapasitas personil / sumber daya manusia, Pelayanan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana	informasi rawan bencana				
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan	Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK	93 orang	93 orang	100	252.770.012
		Prosedur Operasional penanganan	Adanya SOP				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
		kebakaran, penyelamatan dan evakuasi					
		Sarpras pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Sarana prasana yang tersedia				
		Kapasitas aparaturnya damkar/SDSM	SDM yang mempunyai standar kualifikasi				
		Pelayanan Pemadaman, dan evakuasi bagi warga Negara yang menjadi korban kebakaran	Pemadam, evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran				
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang berdampak kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi warga negara dampak kebakaran				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN
			n				

D. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara pada tahun 2021 sebanyak 40 (empat puluh) orang. Sedangkan personil yang mendukung urusan sub kebencanaan daerah sebanyak 40 orang, dan untuk personil yang mendukung sub urusan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 30 orang.

Rincian personil pendukung penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	DUKUNGAN PERSONIL
1	Pelayanan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	40 orang
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasiii rawan bencana	40 orang
3	Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	40 orang
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan korban bencana	40 oranng

5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan dan penyelamatan korban kebakaran	30 orang

- Berdasar kualifikasi Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	SMA	20 Orang
2.	S1/D4	17 Orang
3.	S2	3 orang
Urusan penyelamatan dan evakuasi kebakaran		
1.	SMA	21 orang
2.	S1/D4	8 orang
3.	S2	1 orang
Urusan penyelamatan dan evakuasi bencana		
1.	SMA	22 orang
2.	D3	2 orang
3.	S1/D4	14 orang
4.	S2	1 orang
	JUMLAH	

E. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 775.585.000,- dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGGARAN (RP.000)				
		APBN		APBD		SUMBER LAIN YANG SAH
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum	-	-	-	4.875	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	-	
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiaposiagaan terhadap Bencana	-	-	-	305.000	

4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-	210.000	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	-	255.710	

F. Dampak

Dampak/manfaat penerapan SPM adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta kondusifitas daerah
2.	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Meningkatnya data informasi dan kewaspadaan terhadap risiko bencana untuk masyarakat di kawasan rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan warga dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana terutama korban jiwa di daerah rawan bencana.
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Meningkatnya penanganan darurat bencana dalam upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran guna meminimalisir kerugian akibat kebakaran

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	DAMPAK/MANFAAT BAGI KEPENTINGAN UMUM
		dan evakuasi korban kebakaran	

G. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan

NO .	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	Tercapai
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.250.608	1.250.608	1.250.608	1.250.608	1.250.608	Tercapai
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	125 orang	125 orang	125 orang	125 orang	125 orang	Tercapai
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.020 orang	1.020 orang	1.020 orang	1.020 orang	1.020 orang	Tercapait

NO .	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93 orang	93 orang	93 orang	93 orang	93 orang	Tercapai

H. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah- langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
Terbatasnya jumlah Personil/SDM Satpol.	Memberdayakan personil/SDM yang ada
Terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan dan evakuasi korban kebakaran	Memanfaatkan sarana prasarana penunjang pelayanan dan evakuasi korban kebakaran
Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.	Perlunya penyusunan Kajian risiko bencana lengkap dengan regulasinya
- Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai. - Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik dari segi keahlian teknis maupun dari segi jumlah - Belum memadainya/ masih Kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	- Perlunya penyusunan Kajian risiko bencana lengkap dengan regulasinya - optimalisasi sumberdaya manusia yang ada dan mengikuti Bimtek/Diklat untuk meningkatkan SDM pegawai BPBD - Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana - Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia

PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI

6. Bidang Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Sosial di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Jepara sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi dalam penanganan masalah PMKS dan PSKS di Kabupaten Jepara.

A. Jenis Pelayanan Dasar

- Jenis Pelayanan Dasarnya untuk urusan bidang sosial terdiri atas :
1. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti
 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana

B. Target Pencapaian SPM

Tabel 2.1 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	JUMLAH APBD TAHUN 2021
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negera penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20 Orang Disabilitas	590.620.000
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20 Anak	774.900.800

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	20 Lansia	72.510.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	5 PGOT	17.607.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	20 Korban Bencana	250.000.000

Tabel 2.2 Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN (RP.000)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Sandang		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Disabilitas		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Disabilitas dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN (RP.000)
		Penyediaan Alat bantu		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	20	590.620.000
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk		
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial	Pengasuhan		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Sandang		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Anak		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Anak dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	20	774.900.800
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		
		Fasilitas Pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu		

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN (RP.000)
		Identitas Anak		
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti		
3	Rahabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Sandang		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Lanjut Usia		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Lanjut Usia dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Alat bantu		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti Sosial		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	20	72.510.000
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari		
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Penduduk		
		Akses ke Layanan Kesehatan Dasar		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN (RP.000)
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Pemulasaraan		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial	Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		
		Penyediaan Permakanan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Sandang		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan Merujuk Ke Panti Masyarakat		
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam Panti		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	5	17.607.000
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari		
		Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar		
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		
		Pemulangan ke Daerah Asal		
5	Perlindungan dan jaminan sosial	Penyediaan Permakanan	20	250.000.000

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	ANGGARAN (RP.000)
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Penyediaan Sandang		
		Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan		
		Pelayanan Dukungan Psikososial		

C. Realisasi

Tabel 2.3 Realisasi Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN (RP.000)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20 orang	121 Orang	100	544.645.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20 anak	25 anak	100	772.882.760
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh	20 orang	33 Orang	100	71.969.200

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN (RP.000)
	luar panti		eh rehabilitasi sosial dasar di luar panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh eh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	5 Orang	35 Orang	100	17.607.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Penyediaan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh eh perlindungan dan jaminan sosial	20 orang	318 Orang	100	250.000.000

Tabel 2.4. Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Kabupaten Jepara Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN (RP.000)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20 orang	121 Orang	100	544.645.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20 anak	25 anak	100	772.882.760
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	20 orang	33 Orang	100	71.969.200
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususyagelan dangan dan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial	5 Orang	35 Orang	100	17.607.000

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	TARGET (JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI)	REALISASI CAPAIAN MUTU PELAYANAN DASAR		
					JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	(%)	ANGGARAN (RP.000)
	penge mis di luar panti		dasar tuna sosial di luar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Penyediaan Permakanan	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	20 orang	318 Orang	100	250.000.000

D. Dukungan Personil

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	121 Orang	4
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	25 Anak	4
3.	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	33 Orang	4

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	DUKUNGAN JUMLAH PERSONIL
		di luar panti		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	35 orang	3
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	318 Orang	5

E. Alokasi Anggaran

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKALTUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Pemberdayaan para penyandang cacat tuna netra, cacat tubuh dan menujang hari disabilitas internasional	590.620.000
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Pelayanan adopsi dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH)	774.900.800
			Bimbingan dan Latihan Ketrampilan Praktis bagi Anak Terlantar dan Anak	

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	NOMENKALTUR PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN
			Kurang Beruntung di dalam dan Luar Panti (DBHCHT)	
			Pembinaan dan penanganan anak diluar panti	
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Bimbingan motivasi lanjut usia di panti jompo dan lanjut usia terlantar	72.510.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Penanganan Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Exs. Psikotik	17.607.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin akibat bencana alam dan musibah lainnya	250.000.000

F. Dampak

Dampak/manfaat penerapan SPM adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	Dampak/Manfaat bagi kepentingan umum
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	anak terlantar yang mendapatkan latihan dan ketrampilan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	lanjut usia terlantar yang mendapatkan permakanan
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Eks penyandang PGOT dan Psikotik yang ditangani
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	korban bencana alam dan musibah lainnya yang dapat ditangani

G. Konsistensi Perencanaan Dan Pelaksanaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	20 Orang Disabilitas	20 Orang Disabilitas	20 Orang Disabilitas	20 Orang Disabilitas	121 Orang Disabilitas	100%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	20 Anak	20 Anak	20 Anak	20 Anak	25 Anak	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET DLM RPJMD	TARGET DLM RKPD	TARGET DLM RENSTRA	TARGET DLM RENJA	REALISASI	STATUS CAPAIAN
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	33 Orang	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negera/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	5 PGOT	5 PGOT	5 PGOT	5 PGOT	35 PGOT	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	20 Korban Bencana	20 Korban Bencana	20 Korban Bencana	20 Korban Bencana	318 Korban Bencana	100%

H. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah- langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan SPM Bidang sosial :

1. Masih banyaknya keluarga fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang segera harus ditangani, seperti penyandang cacat permanen dan berat, anak terlantar, lansia terlantar / jompo, PGOT (Pengemis Gelandangan Orang Terlantar), sejak tahun 2017 – 2022 .
2. Perlu adanya penambahan lokalisasi tempat rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti Panti Asuhan / Jompo, PGOT, tempat ketrampilan penyandang cacat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat, meskipun pihak swasta sudah berusaha menumbuh kembangkan yayasan / organisasi yang bergerak dibidang sosial seperti Panti Asuhan / Panti Jompo.
3. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang peduli akan keberadaan PMKS dilingkungannya dengan menumbuhkan swadaya sosial masyarakat.
4. Masih terbatasnya jumlah pegawai / staf dalam mendokumentasikan data dan percepatan sistim pelaporan secara online.
5. Kurangnya optimalisasi kinerja secara aktif dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dimasing-masing Kecamatan didaerah Kabupaten Jepara dalam penanganan PMKS.

PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
Terbatasnya jumlah Personil/SDM.	Memberdayakan personil/SDM yang ada
Terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan dan evakuasi	Memanfaatkan sarana prasarana penunjang pelayanan dan evakuasi
Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.	Perlunya penyusunan Kajian risiko bencana lengkap dengan regulasinya
- Sumber Daya Manusia yang kurang memadai baik dari segi keahlian teknis maupun dari segi jumlah - Belum memadainya/ masih	- optimalisasi sumberdaya manusia yang ada dan mengikuti Bimtek/Diklat untuk meningkatkan SDM - Perlunya penambahan sarana dan prasarana operasional penanganan bencana

PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI
Kurangnya sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	- Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	Jumlah Warga Negera penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	1. Bantuan alat bantu untuk disabilitas yang belum bisa mencukupi semua kategori disabilitas 2. Bantuan pelatihan ketrampilan untuk menunjang usaha disabilitas yang masih kurang	Dilakukannya proses pendataan, identifikasi dan pembuatan database penyandang disabilitas untuk perencanaan mencukupi bantuan alat bantu dan menunjang pemberian bantuan pelatihan sesuai kebutuhan kategori disabilitas
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Data anak terlantar dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut	Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar	Jumlah Warga Negara	1. Data lanjut usia dalam bantuan sosial	1. Dilakukannya proses verifikasi dan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
	panti	Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti	(kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut. 2. Masih terdapat lanjut usia terlantar yang membutuhkan bantuan pelayanan Panti atau Balai Rehabilitasi yang belum terjangkau	validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan 2. Melakukan koordinasi dengan PSM dan Panti atau Balai Rehabilitasi untuk dapat melakukan proses penjangkauan tersebut
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negera / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	1. Masih adanya permasalahan dalam akses Panti atau Balai Rehabilitasi yang dapat menerima PM (gelandangan dan pengemis) setiap waktu tanpa pengecualian 2. Belum tersedianya	1. Adanya keterbukaan dan kemudahan untuk menerima PM (gelandangan dan pengemis) 2. Dilakukannya proses

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			bantuan sosial atau fisik yang dapat menunjang pengentasan tuna sosial tersebut, hanya tersedia fasilitas untuk membantu proses reunifikasi	pendampingan assessment secara berkala dan tepat sasaran yang kemudian hasilnya dapat digunakan sebagai acuan perencanaan pemberian bantuan sosial yang mampu untuk pengentasan tuna sosial tersebut
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	1. Terbatasnya ketrampilan kesiap siagaan bencana bagi SDM kebencanaan/relawan. 2. Keterbatasan sarpras pendukung kebencanaan	1. Perlu adanya peningkatan pelatihan SDM kebencanaan 2. Perlu adanya perawatan dalam pendukung kebencanaan

BAB V

PENUTUP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta tugas-tugas lain dari Pemerintah Pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah yaitu kewajiban melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 tahun. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyampaian tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah merupakan gambaran capaian kinerja selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/6931/OTDA Tanggal 18 Desember 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021. Buku ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan capaian kinerja maupun seluruh permasalahan yang menghambat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Jepara adalah tanggungjawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah di dalam koordinasi Kepala Daerah.

Buku yang disusun ini memuat tentang Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output) dan Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Selain itu, LPPD juga memuat tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi dan tugas pembantuan kepada desa.

Selain itu, buku LPPD ini juga memuat tentang Capaian Kinerja Makro, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daerah yang menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah yang memuat antara lain ; target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah, analisis efisien penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil yang telah dicapai dan analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2021 yang disusun berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Harapan kami, LPPD ini bisa menjadi bahan informasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan selanjutnya dapat dievaluasi secara obyektif dan menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah. Semoga, hasil evaluasi tersebut bisa memberikan masukan dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara, serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

Jepara, Maret 2022
BUPATI JEPARA

DIAN KRISTIANDI

INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
LPPD TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan.	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan.	%	29.458 ----- x 100 38.939	75,65 %
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar. ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	%	118.850 ----- x 100 119.490	99,46 %
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	%	48.743 ----- x 100 56.668	86,02 %
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutann	%	1.623 ----- x 100 235.677	0,69%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
2.	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk.	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten ----- x 100 % Jumlah Penduduk kabupaten.	%	957 ----- x 100 1.212.357	0,079 %
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama ----- x 100 % Jumlah RS kabupaten	%	5 ----- x 100 6	83,33%
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten	%	21.465 ----- x 100% 21.465	100%
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten	%	19.425 ----- x 100% 19.425	100 %
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	%	19.437 ----- x 100 19.437	100%
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di kabupaten.	%	91.464 ----- X 100 96.961	94,33 %
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten	%	32.696 ----- x 100 40.216	81,30 %

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten}} \times 100 \%$		$\frac{712.779}{787.287} \times 100$	90,54 %
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten}} \times 100\%$		$\frac{121.027}{127.316} \times 100$	95,06 %
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten}} \times 100 \%$		$\frac{292.630}{360.858} \times 100$	81,09 %
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten}} \times 100 \%$		$\frac{26.274}{30.525} \times 100$	86,07 %
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten}} \times 100 \%$		$\frac{2.105}{2.161} \times 100\%$	97.41 %
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di kabupaten}} \times 100 \%$		$\frac{3.741}{3.787} \times 100\%$	98.79 %
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten}} \times 100\%$		$\frac{25.479}{25.479} \times 100\%$	100%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)}} \times 100 \%$	%	Surat Keterangan	0
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)}} \times 100 \%$	%	Surat Keterangan.	0
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten}} \times 100 \%$		9.845. $\frac{\text{-----}}{28.247} \times 100\%$	34.8%
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.}}{\text{Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.}} \times 100 \%$	%	384.405 SR $\frac{\text{-----}}{402.129 \text{ KK}} \times 100\%$	96%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{298.456}{402.129 \text{ KK}} \times 100\%$	74%
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku (DPMPTSP)}} \times 100 \%$	%	$\frac{180}{180} \times 100\%$	100%
		25	Tingkat Kemantapan jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{768.008}{872.142} \times 100\%$	88,06 %
		26	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi/ pelatihan ahli	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{55}{650} \times 100\%$	8.4%
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi.	$\frac{\text{jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100 \%$	%	$\frac{0.}{704} \times 100\%$	0%
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban}} \times 100 \%$	%	$\frac{36}{25} \times 100\%$	144%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				bencana yang akan ditangani pada tahun 2021			
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni $\frac{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}{\text{0+0 +52}} \times 100 \%$	%	$\frac{75}{\text{0+0 +52}} \times 100\%$	69,33%
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani $\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha}}{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha}} \times 100 \%$	%	$\frac{49,27}{49,27} \times 100\%$	100%
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni $\frac{\text{Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{49.021}{305.628} \times 100\%$	16,03%
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU $\frac{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100 \%$	%	$\frac{1.178}{305.628} \times 100\%$	0,38%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	%	$\frac{35}{35} \times 100\%$	100%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100.000$	%	$\frac{7}{7} \times 100\%$	100%
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		Orang	1,250,608	100%
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Orang	125	100%
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Orang	1020	100%
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	%	$\frac{93}{115}$	80,86%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten			
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	Menit	11,11 menit	
6.	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	214 ----- x 100% 1.413	15,14%
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	318 ----- x 100% 318	100 %
7.	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	%	0	Suket Diskop

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100 \%$	%	$\frac{875}{95.051} \times 100\%$	0,92%
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100 \%$	%	$\frac{21.944.232,37}{95.051} \times 100\%$	23086,80%
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100 \%$	%	$\frac{155}{260} \times 100\%$	59,62%
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100 \%$	%	$\frac{6566}{18.473} \times 100\%$	35,54%
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja langsung APBD}} \times 100 \%$	%	$\frac{174.726.733.410}{868.992.472.822} \times 100\%$	20,11%
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)}} \times 100 \%$	%	$\frac{34}{362.092} \times 100\%$	0,0093 %
		49	Rasio kekerasan terhadap	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	%	20	

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan).	----- x 100 % Jumlah penduduk perempuan.		-----x100% 742.239	2,695 %
9.	Pangan.	50	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten (sisa dari jumlah kebutuhan) ----- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan kabupaten	%	59,6 ton ----- x 100% 100 ton	59,6%
10.	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100 % Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi		246.209 m2 ----- x 100% 246.209 m2	100%
		52	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum)	Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu ----- x 100 % Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum		0	0
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi ----- x 100% Luas izin lokasi yang diterbitkan		246.209 m2 ----- x 100% 246.209 m2	100%
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL) ----- x 100 % Jumlah penerima tanah obyek landreform		0	0
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah		0	0

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		0	0
11.	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%) Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	%	60,64 51,67 77,73 44,45	IKLH : 60,64 IKPA : 51,67 IKPU : 77,73 ITHL : 44,45
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100 % Total vol timbunan sampah Kabupaten	%	47.443,8 ----- x 100% 146.028,4	32,49%
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten ----- x 100 % Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	%	15 ----- x 100% 15	100%
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el.	%	888.984 ----- x 100% 889.679	99.92%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		61	Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100 \%$	%	$\frac{104.450}{331.578} \times 100\%$	31.50%
		62	Kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 – 18 tahun}} \times 100 \%$	%	$\frac{334.982}{351.488} \times 100\%$	95,30%
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100 \%$	%	$\frac{10}{20} \times 100\%$	50 % (Kecamatan tidak termasuk)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal.	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	%	$\frac{1}{1} \times 100\%$	100%
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri.	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100 \%$	%	$\frac{0}{121} \times 100\%$	0%
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total).	$5\sum ASFR$		19.451 (Jumlah Kelahiran Per Kelompok Umur)	2,05

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$		$\frac{167.087}{227.004} \times 100$	73,6 %
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$		$\frac{23.755}{227.004} \times 100\%$	10.46 %
15	Perhubungan	69	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	Rasio konektivitas kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Trayek / Lintas	(0.77x1)+(0.8x1)	1,57 traye/lintas
		70	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	V/C ratio di jalan kabupaten	LoS	0,21%	0,21%
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%	$\frac{11}{27} \times 100\%$	40,74%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	%	$\frac{9}{25} \times 100\%$	36 %
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)}} \times 100\%$	%	$\frac{799.047}{926.363} \times 100\%$	86,26%
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	%	$\frac{229}{670} \times 100\%$	34,18%
		75	Meningkatnya Usaha Mikro/Kecil yang menjadi wirausaha.	$\frac{\text{Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha kecil keseluruhan}} \times 100\%$	%	$\frac{3.069}{76.740} \times 100\%$	4,00%
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun 2021} - \text{jumlah investasi tahun 2020}) \text{ di kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun 2020 di kabupaten}} \times 100\%$	%	$\frac{7.304.118.903.839 - 9.692.176.368.109}{9.692.176.368.109} \times 100\%$	-24,64%
19	Kepemudaan	77	Tingkat partisipasi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha	%	46	0.02%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
	dan Olahraga		pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	di kabupaten ----- x 100.000 Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten.		----- X 100% 277.167	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	%	247 ----- X 100% 277.167	0.09 %
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		42	42 medali
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	30 ----- x 100% 30	100 %
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah	%	30 ----- x 100% 30	100 %
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi Jumlah area penilaian	%	514 ----- x 100% 5	102,80 %
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	%	37 ----- x 100% 40	93%
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		Belum dilakukan survey	0

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM)		Belum dilakukan survey	0
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU No 43	$T = (a + i + s + j)/4$		$(26\%+40\%+100\%+0,1478\%) / 4 = 41\%$	41%
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$		$(m + b + g + a + c + i)/6$ $(100\%+0+100\%+100\%+100\%+0) = 67\%$	67%
Urusan Pilihan							
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	Jumlah total produksi perikanan tangkap + Jumlah produksi Perikanan budidaya = $11.295,20 + 46.397.25 = 57.692,45$ ton	57.692,45 ton
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	(Jumlah wisatawan tahun 2021 – Jumlah wisatawan tahun 2020)	%	-2954 $----- \times 100\%$	-98 %

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			mancanegara per kebangsaan.	----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2020		3.004	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2021 – Jumlah wisatawan tahun 2020) ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun 2021	%	-59.916 ----- x 100% 349.325	-17 %
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100% Jumlah kamar yang tersedia	%	42.799 ----- x 100% 329.230	13%
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah) ----- x 100% Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah).	%	1.264.127 ----- 32.045.698	3,94%
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2021 ----- x 100% Realisasi PAD Tahun 2021	%	629.360.000 ----- x 100% 408.645.312.793	15%
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton) ----- x 100% Luas Panen (ha)	Ton/ha	576.940,5 64.936,3Ha	8,88 ton ton/ha
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2021) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2020) ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular	%	26.411-27.228 ----- x 100% 27.228	-3,0 %

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				tahun 2020			
28	Kehutanan						Tidak Ada
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin. ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi.			Kab. Jepara tidak ada perusahaan pemanfaatan panas bumi
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan. ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten.	%	51 ---- x 100% 91	56%
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk.	Realisasi ----- x 100% RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).	%	23.031,06 ----- x 100% 47.234,3	48,7%
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten	%	3137 ----- x 100% 3137	100%
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2020) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020	%	9898-8316 ----- x 100% 8316	19%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	$\frac{\text{Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten}} \times 100 \%$	%	$\frac{3}{3} \times 100\%$ (RIPIN Kemenperin)	100%
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	Izin	$\frac{32}{32}$	100%
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	izin	0	suket

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$	%	0	Suket
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	7 Informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Informasi produksi dan kapasitas produksi 2. Informasi bahan baku dan bahan penolong 3. Informasi bahan bakar/energy Informasi tenaga kerja	(50%+25%)+(10+0%+0%) Infor prosduksi fdan kapasitas produksi : 10%	85,0%
32	Transmigrasi					Kebijakan Pemerintah Pusat TA 2021 tidak ada pemberangkatan transmigran karena adanya pandemi covid-19 (Refocussing,	

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
						Realokasi Belanja TA 2021)	
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
33	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) ----- x 100% Jumlah APBD (realisasi)	%	447.736.053.056 ----- x 100% 2.590.169.356.220	17,29%
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- x 100% Jumlah PDRB Non Migas	%	408.645.312.793 ----- x 100% 20.187.576,68	20242,42 %
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	level 2,8	level 2,8
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3
		5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi) ----- x 100% Jumlah belanja APBD (realisasi)	%	1.898.208.874.213 ----- x 100% 2.309.123.965.349	82,20%
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	11 kali.	Bukti piagam WTP (tahun 2010 – 2020)	WTP

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
34	PENGADAAN.	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	%	0/152 x 100%	0
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif.	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode Kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode Kompetitif}} \times 100\%$	%	$\frac{170}{4.009} \times 100\%$	4,24%
		9	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui Pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	%	$\frac{377.577.943.4.807,58}{690.857.987.673.00} \times 100\%$	49,24%
35	KEPEGAWAIAN	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	%	$\frac{1.343}{1.007} \times 100\%$	133,366%
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Jumlah seluruh PNS (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}} \times 100\%$	%	$\frac{129}{2.030} \times 100\%$	6%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- X 100% seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	129 ----- x 100% 262	49%
36	MANAJEMEN KEUANGAN	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- X 100% Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan).	%	2.309.123.965.349 ----- x 100% 2.505.236.384.000.	92,17%
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi ----- --- X 100% Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)	%	408.645.312.793 ----- x 100% 408.911.029.000	99,94%
		15	Assets management.	Jumlah Asset Manajemen. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak).		5.992.573.019.807 Ya Ya Ya Ya Ya	
		16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.	Nilai Realisasi SiLPA ----- X 100% Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	%	269.469.390.871 ----- x 100% 2.153.110.336.831	12,52%

No	URUSAN	No	IKK Outcome	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
37	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK).	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units).	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. ----- X 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda.	%	1.153.963.832.366 ----- x 100% 1.015.722.316.094.	113,61%
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information).	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda. ----- X 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci.	%	7 ----- x 100% 7	100%

**INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT
LPPD TAHUN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN : JEPARA

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan						
		Pendidikan PAUD					
		1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	$\frac{522}{970} \times 100$	53.81 %
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah.		Orang	$\frac{37.693}{37.693} \times 100$	100 %
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan (termasuk beasiswa)		Orang	$\frac{0}{37.693} \times 100$	0 %
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	1.940	1.940
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	4.272	4.272
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	$\frac{2.576}{4.272} \times 100$	60.30 %
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1,		Orang	$\frac{704}{900} \times 100$	78.05%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			902	
			Pendidikan Dasar				
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	$\frac{689}{697} \times 100$	98.85%
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah.		Orang	$\frac{82.350}{82.350} \times 100$	100 %
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		orang	$\frac{26.996}{26.996} \times 100$	100 %
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	$\frac{38.553}{82.350} \times 100$	46,79 %
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang.	$\frac{1.976}{26.996} \times 100$	7,32%
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	5.478	5.478
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.122	2.122
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	4.915	4.915

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1.765	1.765
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	2.322	2.322
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	495	495
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1.287	1.287
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	555	555
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat		Orang	2.077	2.077
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1.044	1.044
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	$\frac{413}{428} \times 100$	96,50 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	$\frac{63}{93} \times 100$	67,74 %
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	$\frac{674}{905} \times 100\%$	74,48 %
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	$\frac{376}{564} \times 100\%$	66,67%
		Pendidikan Kesetaraan					
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Jumlah PKBM terakreditasi Dibagi Jumlah PKBM pada kabupaten yang bersangkutan x 100 %	Unit	$\frac{9}{17} \times 100$	52,94 %
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah	Jumlah siswa Paket A+B yg mendapatkan Perlengkapan Dasar Dibagi Jumlah Siswa Paket pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	Orang	$\frac{684}{684} \times 100$	100 %
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah siswa paket A+B yg bebas biaya pendidikan Dibagi Jumlah Siswa paket pada kabupaten yang bersangkutan x 100%	Orang	$\frac{544}{684} \times 100$	79,53 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	139	139
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	133	133
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	110	110
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	0	0
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	20	20
2	Kesehatan						
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan					
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai Standar		Unit	6	6 unit RS
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	6	6 unit RS
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			22 Puskesmas, 24.100 buku KIA, ANC Kit, Tablet Fe, Imunisasi TT	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal		Orang	324 dokter dan 723 bidan	
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (rekap sarana operasional dan contoh foto)			14 Puskesmas PONED, Bidan Kit, 24.100 Buku KIA, Tablet Vitamin ibu bersalin .	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar (dokter dan perawat)		Orang	Bidan PONED : 259 orang, Dokter PONED : 72 Orang, Bidan di RS :161 Orang	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			KN Kit, 24.100 Buku KIA, Form MTBM	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	723 bidan	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			SDIDTK Kit, 1.133 Posyandu, Pemberian Vitamin A balita	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	324 dokter, 216 Bidan Desa, 71 Tenaga Gizi, 5752 Kader Posyandu	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			11 SHK (School Health Kit)	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	788 Guru UKS SD/MI, 192 Guru UKS SMP/MTs, 123 guru UKS SMA /SMK /MA	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			174 Posbindu Kit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	22 Programmer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			313 Posyandu Lansia, 74 Lansia Kit, 22 Puskesmas Santun Lansia	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	22 Dokter Puskesmas, 22 Programmer Lansia (Perawat/Bidan),	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang			174 Posbindu Kit	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			Tersedia				
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	22 Programmer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			174 Posbindu Kit	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	22 Programmer PTM Puskesmas, 990 kader Posbindu	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			16 pedoman kesehatan jiwa	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	2 perawat terlatih, 1 dokter terlatih	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			FDC Kat I 313 paket Kombipak 10 paket FDC Anak 48 paket FDC Kat II 6 paket Pot sputum 13200 buah Kaca slide 775 buah Reagen Zn 720 paket Catridge TCM TBC 4640	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	23 Dokter TB terlatih 15 Perawat TB terlatih 21 petugas Laborat TB terlatih	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang Tersedia			18.500 rapid HIV dan 18.500 rapid sipilis	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar.		Orang	10 Dokter, 10 Perwat / Bidan, 10 Analisis kesehatan , 10 farmasi , 10 rekam medis , 6 PPIA , 3 Dokter PDP , 3 Dokter PPIA .	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.						
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir					
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab (ha)		Ha	97	DPU-PR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab (m)		M	13.050	DPU-PR
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kab (ha)		Ha	700	DPU-PR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab (m)		M	20.400	DPU-PR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab		Ada/Tidak	Ada.	Kep BUpati No. 520/421 th 2020 tentang rencana pola

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							tanam dan tata tanam kabupaten
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab		Ada/Tidak	Ada	Kep BUpati No. 520/421 th 2020 tentang rencana pola tanam dan tata tanam kabupaten
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab		Jumlah	27 das	DPU-PR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi					
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi primer (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{4.238 \text{ m}}{10.596 \text{ m}} \times 100\%$	40%
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi Sekunder dlm kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{302.378,22 \text{ m}}{1.249.933 \text{ m}} \times 100\%$	24.19%
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jaringan irigasi Tersier dlm kondisi baik (m)}}{\text{Panjang jaringan irigasi Tersier (m)}} \times 100\%$	%	$\frac{4143}{13.810} \times 100\%$	30%
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Penetapan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kab		Ada/Tidak	Ada	Perbup. No. 29 Tahun 2020 ttg Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara 2020 - 2040
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Buku JAKSTRADA Tahun 2015
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kab penyelenggaraan SPAM		Jumlah BUMD/UPTD	1 BUMD	PDAM
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	8	8 izin
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	0	0
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik					
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	298.156	298.156
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	300	300
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan		Rumah	298.456	298.456

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T.				
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	528	528
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	528	528
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic.		Rumah	528	528
		7	Kinerja Penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- x 100 % Rumah di wil pengembang SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha	%	298.156 ----- x 100% 402.129	74%
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T ----- x 100% rumah di wilayah pengembangan IPLT	%	2.851 ----- x 100% 402.129	1%
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T ----- x 100% rumah di wilayah pengembangan SPALD T	%	2.851 ----- x 100% 402.129	1%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat ----- x 100% jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	%	298.156 ----- x 100 402.129	74%
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia ----- x 100% jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	%	206 ----- x 100% 402.129	1%
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia ----- x 100% jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kabupaten	%	= (9 m x 12 m x 3 m) / (528 rumah x 2 m3) x 100%= 78%	78%
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambuungan rumah yang tersambung dengan IPALD ----- x 100% jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab	%	2.650 KK ----- x 100% 2.650 KK	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	%	$= \frac{528 \text{ m}^3}{((266.414 \text{ unit} + 2.650 \text{ unit}) / 10 \text{ tahun}) \times 2 \text{ m}^3} \times 100\%$ $= 1,52\%$	1,52 %
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten					
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku}}{\text{Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku}} \times 100\%$	%	$\frac{3}{3} \times 100\%$	100%
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	180	180
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Ada	Perda No. 26 th 2011
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	Ada	Keputusan bupati no 640/320 tentang tim profesi ahli Kabupaten Jepara tahun

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							2021-2023
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	36	SK Bupati No. 430/410 tahun 2018
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten		Bangunan	163	SK Bupati No. 430/410 tahun 2018
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kabupaten		Bangunan	163	SK Bupati No. 430/410 tahun 2018
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab. yang dipelihara/dirawat		Bangunan	163	SK Bupati No. 430/410 tahun 2018
		Rasio kemantapan jalan					
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kabupaten		Km	872.142 Km	872.142Km
		2	Panjang jalan yang dibangun		Km	14.842,49	14.842,49Km
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	15,40 m	15,40 m

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		Km	25.449,53 km	25.449,53 Km
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	10 M	10 M
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau Direhabilitasi		Km	11.692,55Km	11.692,55Km
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	123,5	123,5
		8	Panjang jalan yang dipelihara		Km	50.667,00Km	50.667,00Km
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	9 m	9 m
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli					
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kab		Orang	0.	0
		2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab		Orang	55	55
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten		Orang	6	6
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kab yang aktif dengan data termutakhir.		Ada/Tidak	Tidak Ada	Surat keterangan
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBD kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Potensi pasar jasa konstruksi/Rup 2021

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Ada	Potensi pasar jasa konstruksi/RUP 2021
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Ada	Potensi pasar jasa konstruksi/RUP 2021
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	Tidak Ada.	Tidak Ada
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Kep Bupati No. 142 th 2011
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Suket	DPU
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Suket	DPU

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	Suket	DPU
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Ada/Tidak	Tidak ada	DPU-PR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	Suket	DPU-PR
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Suket	DPU-PR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Ada	DPU-PR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak Ada	DPUPR
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kabupaten		Badan Usaha	570	570
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten		Badan Usaha	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kabupaten		Badan Usaha	570	570
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten		Badan Usaha	Suket	0
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Izin	Suket	0
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya		Pengawasan	Suket	0
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya.		Kecelakaan konstruksi	0	0
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Pengawasannya.		Pengawasan	0	0
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.						
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab					
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		unit	36	36
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	36	36
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam.		Orang	36	36

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	36	36
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		unit	36	36
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		unit	36	36
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban Bencana		Unit	0	0
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang Terfasilitasi		orang	36	36
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		ha	0,9	ha
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten					
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	75	75 rt
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	52	52
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Jumlah RT	23	23
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	0,9	0,9
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani					
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	0	0
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	12.172	12.172
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur kawasan kumuh		Ha	49,27	49,27
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	305.628	305.628
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	9.680	9.680
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	51.513	51.513
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni (lebih dari 1 tahun)		Rumah	0	0
		5	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} \times 100\%$	%	$\frac{406.073}{305.628} \times 100\%$	133%
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	12.	12
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	1178	1178
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan Lingkungan		Rumah	1178	1178
		4	Jumlah unit rumah yang terfasiltasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	1178	1178
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	1178	1178
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	0	0
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	12	12
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi		Pengembang	12	12
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan.		Pengembang	12	12
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.						
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.					
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	35	35 kejadian
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan		Orang	1.970	1.970
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/Perk ada	8	8

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Orang	1	1
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	Ada	Ada
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Sarpras	Ada	Ada
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	%	Tidak Melaksanakan	0
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	1.250.608 ----- x 100% 1.250.608	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	Tidak melaksanakan	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Jumlah satu dokumen RPB yg lengkap dan sudah disahkan			
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- x 100% Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah	%	Tidak melaksanakan	0
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan	%	125 ----- x 100% 13375	0,93%
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	125 ----- x 100% 13.375	0,93%
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	%	1.250.608 ----- x 100% 1.250.608	100%
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan ----- x 100%	%	1.250.608 ----- x 100% 1.250.608	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	%	Tidak ada status KLB	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam utk setiap penetapan darurat bencana ----- x 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	%	2 ---- X 100% 2	100%
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- x 100% Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat	%	869 ----- x 100% 869	100%
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- x 100% Perkiraan jumlah korban	%	1020 ----- x 100% 1020	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				keseluruhan dari bencana			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten		Layanan	322	322 layanan
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	2	2 pos
		3	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian di kantor kecamatan		orang	26	26 orang
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	0	0
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	9	9 unit
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		orang	28	28 orang
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Orang	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran				
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam Kebakaran.		kegiatan	0	0
6	SOSIAL.						
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	2	2 jenis (offline & online)
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Anak	1.413	1.413 anak
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang terbentuk		Unit	0	Belum Terbentuk
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dijangkau		orang	189	189
		5	Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		Unit	2	2 unit
		6	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	123	123 orang
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		shelter	1	1 buah shelter
		8	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang menerima paket sandang		Orang	123	123 orang

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	121	121 orang
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		paket	9	9 paket
		11	jumlah paket perbekalan yang tersedia		paket	0	0
		12	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		orang	0	0
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah/shelter.		orang	0	0
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/TKS dan/relawan sosial yang disediakan		Orang	41	58 orang
		15	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik , mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinsos, rumah singgah/shelter dan/ pusat kesejahteraan sosial		Orang	118	310 orang
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		paket	6	6 paket
		17	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang difasilitasi untuk		orang	0	0 orang

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			mendapatkan dokumen kependudukan				
		18	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		Orang	0	0 orang
		19	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	15	15 orang
		20	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	15	15 orang
		21	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng yang dirujuk		Orang	5	5 orang
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten					
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Makanan		Orang	318	318 orang
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket Sandang		Orang	0	0
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang Dimiliki			0	0
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok Rentan		Paket	0	0
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	0	0
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang		Orang	33	33 orang

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			Tersedia				
7	TENAGA KERJA						
		Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja					
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kab		Ada/Tidak	Tidak Ada	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	0	0
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Jumlah Perusahaan	75	75
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi					
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2020 ----- x 100% keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020	%	3 ----- x 100% 8	37,5%
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi.	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2020 ----- x 100% jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2020	%	4 ----- x 100% 5	80%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan.	Jumlah instruktur tahun 2020 ----- x 100% jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020	%	5 ----- x 100% 128	3,91%
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020 ----- x 100% jumlah seluruh LPK pd th 2020	&	2 ----- x 100% 42	4,76%
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2021 ----- x 100% jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020	%	7 ----- x 100% 42	16,67%
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	488	488 orang
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan ----- x 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021	%	128 ----- x 100% 126	102%
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2021 ----- x 100% jumlah lulusan pada tahun 2020	%	66 ----- x 100% 128	52%
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi ----- x 100%	%	144 ----- x 100% 40	36%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2021			
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	$\frac{\sum \text{CPMI dilatih}}{\sum \text{CPMI terdaftar}} \times 100\%$	%	$\frac{57}{57} \times 100\%$	100%
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)		orang	57	45 orang
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja					
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2021}}{\text{jumlah perusahaan pd th 2021}} \times 100\%$	%	$\frac{14}{976} \times 100\%$	1,43%
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		4,63%	4,63%
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)					
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020}}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10}} \times 100\%$	%	$\frac{62}{260} \times 100\%$	23,85%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				orang atau lebih			
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020}}{\text{Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh}} \times 100\%$	%	$\frac{3}{18} \times 100\%$	16,67%
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di Perusahaan		SP/SB	56	56
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala Upah}}{\text{Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)}} \times 100\%$	%	$\frac{65}{260} \times 100\%$	25%
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor}} \times 100\%$	%	$\frac{1.764}{976} \times 100\%$	181%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- x 100% Jumlah perusahaan pada tahun 2020	%	29 ----- x 100% 260	11,15%
		7	Jumlah mogok kerja		Mogok	0	0
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	0	0
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	5	5
		10	Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan		Perselisihan	0	0
		11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	41	41
		12	Jumlah Pekerja yang ter-PHK		Orang	79	79
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		perselisihan	10	10
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang Diberdayakan		LKS	0	0
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama ----- x 100% Jumlah kasus perselisihan	%	17 ----- x 100% 46	36,96%
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten					
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab			6.632	6.632
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			18.473	18.473

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			43	43
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam Kab			-	-
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	1	1
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		BKK	-	-
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota.		Orang	4.503	4.503
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		Orang	6.566	6.566
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Lembaga	40	40
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata.		Perjanjian	57	57
		11	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan.	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	%	N/A	N/A
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	%	$\frac{57}{57} \times 100\%$	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				$\Sigma \text{PMI/TKI}$			
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	%	$\frac{20}{20} \times 100\%$	100%
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	%	Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran	Kabupaten Jepara tidak memiliki layanan tenaga kerja migran
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.						
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD					
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat kabupaten yang telah dilatih PUG		Lembaga	33	33 Lembaga
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten		Program/kegiatan	43/53	43 Program/ 53 kegiatan
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab					
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	6	6 Media Massa
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		lembaga	12	12 lembaga

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- x 100% jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten		34 ----- x 100% 34	100%
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat Pelatihan		lembaga	40	40 lembaga
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD kab)		Lembaga	2	2 lembaga
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak					
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kab yang mendapatkan pelatihan		organisasi	0	0 organisasi
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kab yang sudah dilatih		Orang	0	0 orang
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		lembaga	Tidak ada	0
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten		Lembaga	Tidak Ada	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/ program	1	1 program
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah Terstandardisasi		Lembaga	Ada	1
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan Layanan}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100\%$	%	$\frac{20}{20} \times 100\%$	100%
9	Pangan.						
		Persentase Cadangan Pangan					
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	Ada	Gudang Cadangan Kab. Jepara
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Tidak Ada	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	Ada	100%
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada	100 %
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada	100 %
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan.	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada	100 %
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar.	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada	100%
10	Pertanahan.						
		Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati.	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya ----- x 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		18 ----- x 100% 18	100%
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum absentee ----- x 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		0	0
		3	SK Bupati /Walikota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah			0	0
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses Penerbitannya ----- x 100% Jumlah dokumen izin		0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				membuka tanah yang dimohon dalam 1 Tahun			
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kabupaten.	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- x 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 th		0	0
11	Lingkungan Hidup						
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten					
		1	Hasil Perhitungan kabupaten terhadap : a) Indeks Kualitas Air,(IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			a) Indeks Kualitas Air,(IKA) 51,67 b) Indeks Kualitas Udara (IKU) : 77,73 c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) : 44,45	IKA : 51,67 IKU : 83,15 IKTLH : 44,45
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten					
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab.	- Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah thd volume timbunan sampah - Tersedianya iformasi terkait kapasitas TPA thd volume		47.443,8 / 146.028,4 x 100 %	32,49%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				timbunan sampah - Tersedianya informasi terkait TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan			
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten					
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten ----- x 100% jumlah usulan permohonan yang teregestrasi.	%	15 ----- 100% 15	100%
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kab	Jumlah PPLHD yang ada ----- x 100% Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin ingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab	%	0 ----- x 100% 15	0
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kab	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda ----- x 100% Jumlah usulan MHA	%	0	0

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH.	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan ----- x 100% Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada.	%	0	0
		5	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kab yang Ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani ----- x 100% Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%	11 ----- x 100% 11	100%
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
			Perekaman KTP Elektronik				
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan	%	701 ----- x 100% 710	98,73%
		2	Penerbitan akta perceraian.	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perceraian	%	182 ----- x 100% 192	94,79%
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- x 100% Peristiwa perkawinan	%	12.921 ----- x 100% 12.921	100%
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah Penyajian data kependudukan skala kab dalam	%	2 ----- x 100%	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				1 tahun. ----- x 100% 2 semester		2	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		desa	8	8 desa
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun Sebelumnya		desa	0	0
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		lembaga	5	5 lembaga
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan Pemberdayaan		desa	184	184
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		TFR					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	Ada	1

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun.	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.			22,79
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	b_i $ASFR_i = \frac{f \times k}{p_i}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun	%	6,27	6,27
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE $\frac{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE}} \times 100\%$	%	$\frac{482.141}{1.493.147} \times 100\%$	32,29 %
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	18	18 stakeholder

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)					
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- x 100% Jumlah faskes	%	39 -----x100% 47	83 %
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif ----- x 100% Jumlah PUS	%	167.087 -----x100% 227.004	73,6 %
		3	Pemerintah Daerah kab yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		kelompok	69	69 kelompok
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern) ----- x 100% jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan	%	6.911 -----x100% 19.425	35,5 %
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)					
		1	Persentase kesertaan KB di kab dengan kesertaan rendah	Jumlah desa yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu kab ----- x 100% Jumlah desa dalam kab	%	1 -----x100% 195	0,51 %
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	7.640 -----x100% 10.435	73,2 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Jumlah Keluarga PBI			
15	Perhubungan.						
			Rasio konektivitas				
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C.	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia ----- x 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	%	125 ----- x 100% 170	73,53%
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala.	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- x 100 % Jumlah kendaraan wajib uji	%	15.208 : 2 = 7.604 ----- x 100% 12.385	61,40%
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kab, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.	Jumlah penetapan tariff lintas penyeberangan ----- x 100% Juml lintas penyeberngdlm kab	%	5 ---- x 100% 5	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kab ----- x 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan kota	%	30.750,24 ----- x 100% 43.420	70,82%
16	Komunikasi dan Informatika.						
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015) ----- x 100% Jumlah Kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pd Pemda	%	n/a	

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah		51 ----- x 100% 51	100%
		3	Persentase perangkat daerah yang pengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah		51 ----- x 100% 51`	100%
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- x 100% Jumlah layanan	%	312 ----- x 100% 312	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$		312 ----- x 100% 312	100%
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$		312 ----- x 100% 312	100%
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah}}{\text{Jumlah layanan publik dan layanan administrasi}} \times 100\%$		249 ----- x 100% 249	100%
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	18 ----- 100% 27	66,66 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				----- x 100% Jumlah perangkat daerah			
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	18 ----- x 100 % 27	66,66 %
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- x 100% Jumlah perangkat daerah	%	27 ----- x 100 % 27	Kecamatan tidak termasuk 100%
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- x 100% Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	%	18 ----- x 100% 18	100%
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- x 100% Jumlah perangkat daerah		24 ----- x 100% 27	88,89%
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo ----- x 100% Jumlah ASN Pengelola TIK	100%	N/A	N/A

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	Ada	1. Perbup 50 tahun 2019 tentang master plan smart city 2. Perbup no 42 th 2020 ttg tata kelola di lingkungan pemkab 3. Perbup no 62 2020 ttg penyele nggaraa n sistem pemerin tahan berbasi d elektronik
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab	$\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemda}}{\text{-----}} \times 100\%$	%	123 ----- x 100% 138	89,13%
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\text{Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{\text{-----}} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemkab}}{\text{-----}} \times 100\%$	%	52.441 --- x 100% 52.543	99,81 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP ----- x 100% Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik	%	162 ----- x 100% 162	100%
17	Koperasi dan UKM						
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas					
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kab	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan ----- x 100% Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	%	16 ---- x 100% 284	5,63%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan $\frac{\text{Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan}}{2} \times 100\%$	%	2 $\frac{2}{2} \times 100\%$	100%
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi $\frac{\text{Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	231 $\frac{231}{670} \times 100\%$	34.48%
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya $\frac{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya}}{\text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	163 $\frac{163}{284} \times 100\%$	57,39%
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan $\frac{\text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	191 $\frac{191}{670} \times 100\%$	28,51%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- x 100% Jumlah anggota koperasi yang ada	%	245 ----- x 100% 92.157	0,27%
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	5 ----- x 100% 670	0,75%
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				Tidak diisi
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	119 ----- x 100% 670	17,76%
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan ----- x 100% Jumlah koperasi yang ada	%	7 ----- x 100% 670	1,04 %
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran ----- x 100%	%	3 ----- x 100% 670	0,45%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah koperasi yang ada			
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kab	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{2}{670} \times 100\%$	0,30%
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah ka dalam 1 (satu) daerah kab	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{3}{670} \times 100\%$	0,45%
Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha							
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{\text{Jumlah pertumbuhan wirausaha baru}}{\text{Jumlah wirausaha yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{3.069}{76.740} \times 100\%$	4.00%
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diinput@ke dalam sistem data online (ODS)}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{0}{76.740} \times 100\%$	0
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang bermitra}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{168}{76.740} \times 100\%$	0,22%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk}} \times 100\%$	%	$\frac{149}{76.591} \times 100\%$	0,19%
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran}}{\text{Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran}} \times 100\%$	%	$\frac{200}{76.540} \times 100\%$	0,26%
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Pelatihan}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{2.320}{76.740} \times 100\%$	3,02%
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah usaha mikro yang ada}} \times 100\%$	%	$\frac{484}{76.740} \times 100\%$	0,63%
18	Penanaman Modal						
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten		Ada/Tidak	Ada	1
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Ada/Tidak	4	4
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah laporan	6	6 laporan
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Jumlah kegiatan	2	2 kali
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah kegiatan	Tidak Ada	Dialihkan karena pandemic covid-19
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Jumlah kegiatan	3	3
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah konsultasi	12	12
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah perizinan dan non perizinan	8.658	8.658
		9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah realisasi	7.304.118.903.839	7.304.118.903.839
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kab		Jumlah aparatur	14	14 orang
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Jumlah perusahaan	255	255 orang

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kab.		Ada	1	1
19	Pemuda dan Olahraga						
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	92	92
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	29	29
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan					
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan ----- X 100% Jumlah Penduduk Usia 16-30 Th	orang	264 ----- X 100% 277.167	0.10%
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Jumlah Pengelola Organisasi ----- X 100% Jumlah Penduduk Usia 16-30 Th	orang	46 ----- X 100% 277.167	0.02%
		Peningkatan Prestasi Olahraga					
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih yang memiliki kompetensi ----- X 100% Jumlah Pelatih	orang	129 ----- X 100% 129	100%
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		kali	10	10 kali

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
20	Statistik						
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	3	1. Jepara Dalam Angka 2. PDRD 3. Statistik Sektoral Kab Jepara
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Ada/tidak	0	0
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan			229	229
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS			0	Tidak ada
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS			0	0
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- x 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral		15 ----- X 100% 17	88,24%
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistic	Jumlah metadata indikator statistik sektoral ----- x 100%		22 ----- X 100% 17	129,41%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				jumlah indikator statistik sektoral			
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah					
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal disbanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- x 100% Jumlah kegiatan strategis yang ada	%	8 ----- 1005 10	80%
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah system elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- x 100% Jumlah SE yang ada.	%	290 ----- 100 290	100%
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah.	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- x 100% Jumlah SE yang ada	%	290 ----- 100% 290	100%
		4	Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan.	Jumlah titik teramankan ----- x 100% Jumlah titik pada PHKS	%	51 ---- X 100% 51	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
22	Kebudayaan						
		Terlestarikannya Cagar Budaya					
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		obyek	40	40 obyek
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian,penayaan keberagaman)		obyek	2	2
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Obyek	40	40 obyek
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata		Tim	16	16 Tim
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Tim	0	Tidak ada
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Tim	3	3 Tim
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	Tidak ada
		8	Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Cagar Budaya	0	Tidak ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		9	Pemanfaatan cagar budaya kab (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	1	1 Cagar Budaya
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		koleksi	512	512 buah
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Orang	1.152	1.152 orang
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.			6	6
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	1	1 Tim
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupatwn		Tim	1	1 Tim
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim	0	Tidak ada
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		orang	10	10 orang
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	0	Tidak ada
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Unit	2	2 unit
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	6	6 kali
23	Perpustakaan						
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	%	$\frac{88,619}{1.213.170} \times 100\%$	7,3 %
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya}} \times 100\%$	%	$\frac{25,036}{1.213.170} \times 100\%$	2,1 %
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$\frac{\text{Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di Wilayahnya}}{\text{Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)}} \times 100\%$	%	$\frac{867}{1.213.170} \times 100\%$	0,0715 %
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan}}{\text{Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya}} \times 100\%$	%	$\frac{18}{426} \times 100\%$	4,2 %
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		kali	562	Perpustakaan Keliling, Lomba

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
							dalam rangka Minat Baca dan Lomba Perpustakaan, Sosialisasi Gemar Membaca
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah kuno	Tidak Ada	0
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah kuno	Tidak Ada	0
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Budaya etnis	239 eksemplar	239 eksemplar
24	Kearsipan						
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan					
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dibagi jumlah seluruh arsip x 100%	%	12.000 ----- x 100 % 45.500	26 %
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan	Jumlah arsip inaktif yang telah	%	49.500 ----- x 100%	36 %

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			daftar arsip	dibuatkan daftar arsip dibagi Jumlah seluruh arsip inaktif kali 100%		136.500	
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu Balik dibagi Jumlah seluruh arsip Statis kali 100%	%	88.635 ----- x 100% 88.635	100%
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN dibagi Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota kali 100%	%	100 ----- x 100% 270.635	0,03695 %
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah	0	0
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah	0	0
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab yang sesuai NSPK di kabupaten		Jumlah	317	317

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab yang sesuai NSPK		jumlah	1975	1975
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian		Jumlah	4	4
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab yang sesuai NSPK.		Jumlah	0	0
URUSAN PILIHAN							
25	Kelautan dan Perikanan						
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)					
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		RT	276	276 RT
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten	%	10 ---- x 100% 10	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah kabupaten yang diterbitkan		Jumlah	5 izin	5 izin
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		orang	177 orang	177 orang
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		ekor	806.900.826	806.900.826 ekor
26	Pariwisata						
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan					
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			24	24
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			156	156
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten		TUDP	0	0
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Orang	50	50 orang
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri.		Kegiatan	10	10 kali
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten		Orang	0	Tidak Ada

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Industi	6	6 industri
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi.	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi}}{\text{Jumlah tenaga kerja pariwisata}} \times 100\%$	%	$\frac{58}{1.195} \times 100\%$	4,8%
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor Kepariwisataan	$\frac{\text{Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan}}{\text{Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan}} \times 100\%$	%	$\frac{510}{510} \times 100\%$	100%
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha Masyarakat		Lokasi	24	24 lokasi
27	Pertanian						
			Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit	101	101 unit
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Unit	72	72 unit
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		dokumen	27	27 dokumen
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	$\frac{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}}{\text{Jumlah prasarana yang aktif digunakan}} \times 100\%$	%	$\frac{101}{101} \times 100\%$	100%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah prasarana yang dibangun.			
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kabupaten	$\frac{\text{Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab}}{\text{Jumlah usulan usaha pertanian}} \times 100\%$	%	$\frac{27}{28} \times 100\%$	96,4%
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	$= \frac{\text{Luas area yg ditanggulangi}}{\text{Luas area yg terkena bencana}} \times 100$ Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	%	$\frac{77,36 \text{ ha}}{77,36 \text{ ha.}} \times 100\%$	100 %
28	Kehutanan (tidak menyelenggarakan urusan kehutanan)						
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura				
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga				
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura				
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA				
29	ESDM (Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten)						

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab				Kab. Jepara tidak ada perusahaan pemanfaatan panas bumi
30	Perdagangan						
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)					
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin took swalayan yang di terbitkan < 5 hari kerja Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	izin	8/8 Toko swalayan	100 % Toko swalayan
		2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ----- x 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	%	7 ----- x 100% 7	100%
		3	persentase gudang yang tidak memiliki TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- x 100% Jumlah gudang yang ada di Kab kabupaten	%	7 ----- x 100% 42	16%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :			-	-
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		0	Surat Keterangan Disperindag
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		0-	Tidak ada penerbitan STPW

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- x 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	%	0	Tidakada penerbitan STPW
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah ----- x 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagPengecer	%	0 ----- x 100 0	0%
		6	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SPKA yang terbit ≤ 1 hari kerja 1 x 24 jam ----- x 100%	%	0	SPKA sudah menjadi kewenangan

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
				Jumlah permohonan penerbitan SPKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar			pusat
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ $K = \text{Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya}$ $a = \text{Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)}$ $b = \text{sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)}$	%	$K = (a+b) \times 100$ $= (0,5+0) \times 100$ $= 50\%$	50 %
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	$\frac{\text{Jumlah prosentase komoditi}}{\text{Jumlah komoditi}} \times 100\%$	%	$\frac{31,11}{64} \times 100\%$	0,49%
		9.	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan			$X = \frac{a}{(b \times c)} \times 100\%$ $= \frac{23.031,06}{(47.234,3 \times 28.356)} \times 100\% = 0,0017\%$	0,0017%

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		10.	Presentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya(UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota	%	3.137 ----- x 100% 3.137	100%
		11.	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku ----- x 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	%	0 ----- x 100% 0	0%
31	Perindustrian						
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab					

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		0/0	0%
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda.			= a+b = 30+20 = 50	50%
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	1710 ----- x 100% 1710	100% disperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- x 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	%	0 ----- x 1-00% 0	0 izin disperindag

No	URUSAN	No	IKK Output	Rumus	SATUAN	DATA LPPD	
						Elemen Data	Capaian Kinerja
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini					
		1	Persentase data perusahaan indusri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kabupaten	Jumlah data perusahaan industri kecil & perusahaan kawasan industri di kab di SIINas ----- x 100% Total populasi perusahaan industri besar & perusahaan kawasan industri di kab		32 ----- x 100% 193	1,6%
31	Transmigrasi.						
		1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			Kebijakan Pemerintah Pusat, tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena adanya pandemic Covid-19	
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya				
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya				